



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing diperlukan landasan perencanaan yang strategis dan komprehensif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa rencana pembangunan industri kabupaten merupakan instrumen penting untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pelaku usaha serta pemangku kepentingan dalam sektor industri sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan industri daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.

7. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama Daerah.
8. Sentra Industri adalah kawasan yang menjadi pusat kegiatan Industri dengan fokus pada produk sejenis, penggunaan bahan baku serupa, atau proses produksi yang sama.
9. Sumber Daya Industri adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh suatu daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri.
10. Sarana dan Prasarana Industri adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat/sarana dan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama/prasarana untuk mencapai tujuan dalam proses produksi dan kegiatan Industri.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 3

- (1) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. industri tekstil, aneka dan kerajinan;
 - b. industri alas kaki;
 - c. industri kertas dan barang dari kertas;
 - d. industri pangan;
 - e. industri farmasi;
 - f. industri pengepresan logam;
 - g. industri mainan anak;
 - h. industri elektronika dan telematika; dan
 - i. industri pembangkit energi.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

BAB III RPIK

Pasal 4

RPIK Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. potensi Sumber Daya Industri Daerah;
- d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. Bab IV : Strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
- (3) Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri di daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan industri daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan industri di daerah bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pembangunan industri diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (5) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan industri di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui :

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
 - b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri;
 - c. penguatan kemitraan dengan industri kecil dan/atau industri menengah;
 - d. penyelenggaraan kerjasama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi industri;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dalam pengembangan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. penyelenggaraan kerjasama dalam pengelolaan aset, sumber daya industri, dan/atau sarana prasarana industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan industri dapat dilakukan melalui :
- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan industri di daerah

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan RPIK Tahun 2025-2045.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sumber daya manusia;
 - b. peningkatan permodalan;
 - c. peningkatan kemampuan pemasaran;
 - d. penguatan sarana dan prasarana;
 - e. penguatan kerja sama; dan
 - f. peningkatan kemampuan industri dalam menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu pada Sistem Informasi Industri Nasional.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan kesesuaian RPIK; dan
 - b. evaluasi target dan sasaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri.
- (3) Selain pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 meliputi permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2025


BUPATI BANDUNG,
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (18/262/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Peraturan daerah ini disusun untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan Industri di Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu sektor strategis, Industri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

RPIK Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Industri nasional, rencana pembangunan daerah, potensi Sumber Daya Industri, tata ruang wilayah, serta keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pelaku Industri dalam pelaksanaan penyelenggaraan perindustrian.

Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan pembangunan Industri di Kabupaten Bandung dapat berlangsung secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 128

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pembangunan. Salah satu kunci penting dalam pembangunan adalah kemampuan negara dalam hal Pembangunan Ekonomi. Keberhasilan Pembangunan Ekonomi akan mampu memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya, dan juga bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini harus mampu mengambil langkah dan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.

Sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan dalam pembangunan wilayah, hampir semua negara memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Karenanya sektor Pembangunan Industri ini perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan industri merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Potensi pembangunan industri yang cepat dalam mencapai kemajuan ini bukan hanya merujuk pada industri di tingkat Nasional, apabila mampu dikembangkan di wilayah Kabupaten maka akan membawa kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat dengan pesat. hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi saat ini yang lebih memberikan banyak value pada pengembangan industri.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri, mengingat Kabupaten Bandung dekat dengan pusat Kota Bandung yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat. Kabupaten dengan luas wilayah 176.238,67 Ha (4,75% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat) dan beribukota di Kecamatan Soreang, yang terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada 60 49' – 70 18' Lintang Selatan dan 1070 14' – 1070 56' Bujur Timur dan berada di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah Kabupaten Bandung ini telah memberikan banyak hasil alam, baik itu hasil di daratan berupa pertanian, industri dan pariwisata.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung tahun 2023 sebesar 3.721,111 jiwa. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 1.762,40 km², rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per km².

Dengan keberadaan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh wilayah, Kabupaten Bandung memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai jenis industri. Pembangunan sektor industri di daerah ini tidak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kontribusi signifikan yang diberikan oleh sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 52,53% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), dengan angka sekitar Rp. 80.869,4 (milyar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, mengalahkan sektor-sektor lainnya.

Sebagai sektor yang paling dominan, industri pengolahan tidak hanya memberikan dampak besar pada PDRB, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan daya saing daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan ini mencakup berbagai subsektor, mulai dari manufaktur, pengolahan makanan dan minuman, hingga industri berbasis sumber daya alam.

Jumlah sebaran industri di Kabupaten Bandung yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung adalah sebanyak 57.116 dan baru terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 988 jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bandung, dimana jenis

terdapat beberapa industri besar baik dari industri mikro, industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Sebaran industri Kabupaten Bandung memiliki potensi industri yang sangat besar dan beragam. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti manufaktur, tekstil, makanan dan minuman, serta industri berbasis sumber daya alam lainnya. Adanya kombinasi antara industri mikro, IKM, dan industri besar di Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri mikro dan IKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing lokal dan menciptakan produk-produk unggulan yang dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Sementara itu, industri besar yang berkembang di Kabupaten Bandung juga turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan industri di Kabupaten Bandung adalah memastikan integrasi antara berbagai skala industri, dari mikro hingga besar, dengan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung serta akses ke teknologi dan pasar yang lebih luas juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing industri di Kabupaten Bandung. Isu Permasalahan Sektor Industri di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Perusahaan Industri dalam Hal Perizinan

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian perkembangan dan kegiatan industri. Dengan adanya kegiatan-kegiatan industri yang tidak berizin, artinya kegiatan tersebut tidak terdata dengan baik dan pengawasan akan sulit dilakukan. Eksternalitas negatif dari keberadaan industri tidak berizin tersebut tentunya akan sulit dikelola. Pada akhirnya, berdampak buruk bagi masyarakat lain yang tinggal di sekitar industri tanpa izin tersebut.

2. Belum Optimalnya Pelaporan Industri pada SIINAS

SIINAS merupakan sistem informasi terpadu terkait perindustrian di Indonesia. Sistem ini merupakan instrumen yang tidak hanya mempermudah perusahaan untuk mendaftarkan perusahaannya saja. Sistem ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha yang berkembang di daerahnya. Masih rendahnya pemahaman terkait

pelaporan industri melalui SIINAS menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan pengawasan dan memantau perkembangan kegiatan industri dan usaha.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan industri di Kabupaten.

1. Rendahnya daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM)
 - a. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri tidak dapat bersaing akibat dari rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku.
 - b. Bahan baku, barang modal, bahan pendukung masih tergantung pada produk impor akibat masih terbatasnya bahan baku dan pendukung yang berasal dari lokal.
 - c. Rendahnya harapan standar industri akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha industri dalam menerapkan standar industri
 - d. Belum tersedianya regulasi yang mengatur rencana pembangunan industri daerah akibat belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perindustrian Daerah.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan akibat kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan.
 - f. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM akibat kurangnya modal usaha yang dimiliki.
 - g. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pelaku IKM akibat kurangnya tingkat pendidikan IKM.
 - h. Belum optimalnya pengelolaan modal/ pembiayaan/ manajemen usaha akibat kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM.
 - i. Belum optimalnya legalitas usaha/legalitas produk akibat kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal.
 - j. Belum optimalnya penggunaan media promosi/media sosial akibat kurangnya penguasaan IT di kalangan IKM.
 - k. Belum terbentuknya asosiasi industri per komoditi IKM akibat kurangnya motivasi membentuk asosiasi per komoditi.
2. Kurangnya IKM berpotensi ekspor
 - a. Rendahnya peluang usaha bagi IKM akibat belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM
 - b. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap bisnis ekspor akibat

kurangnya informasi pasar, pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri, dan kurangnya modal.

Sektor industri memainkan peran yang krusial dalam pembangunan nasional dengan berbagai kontribusi yang signifikan. Pertama, industri menyediakan lapangan kerja secara besar-besaran, tidak hanya di sektor manufaktur tetapi juga dalam rantai pasokan yang meliputi jasa pendukung seperti transportasi, distribusi, dan layanan terkait lainnya. Dengan demikian, industri membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor industri menyumbang secara substansial terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Melalui produksi barang dan jasa, industri menciptakan nilai tambah yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan tetapi juga meningkatkan kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Industri juga memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur. Pertumbuhan industri memicu permintaan akan fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi, yang krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di dalam negeri.

Di samping itu, sektor industri menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi. Perusahaan industri sering kali melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional tetapi juga membantu menghadapi persaingan global.

Peran sektor industri juga terlihat dalam kontribusinya terhadap ekspor nasional. Produk industri sering menjadi barang ekspor utama suatu negara, yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa dan memperkuat posisi ekonomi dalam perdagangan internasional.

Terakhir, sektor industri berpotensi dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kerja yang layak dan meningkatkan daya beli, industri dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada pengurangan tingkat kemiskinan di suatu negara. Secara keseluruhan, sektor industri tidak hanya berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara tetapi juga sebagai fondasi untuk

pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, asalkan dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dari potensi yang ada di Kabupaten Bandung khususnya potensi pengembangan ekonomi sektor industri, maka diperlukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Sumber Daya Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
15. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 188 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomo 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2034.

1.3 Sistematika Pembahasan

Dalam laporan akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/ Kabupaten/ Kata.
- B. Dasar Hukum 1. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- C. Sistematika Penulisan Mencakup: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Bab V Penutup.

BAB II GAMBARAN KONDISI KABUPATEN BANDUNG TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).
- B. Sumber Daya Industri Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.
- C. Sarana dan Prasarana Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas Jangnan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas Jangnan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi /Kabupaten/Kota
- C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

BANDUNG

- A. Strategi Pembangunan Industri Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif
- B. Program Pembangunan Industri
 - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/ kabupaten/kota
 - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri
 - 5. Pemberdayaan Industri Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota selama 20 tahun ke depan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Bandung merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah bagian utara mengelilingi wilayah ibukota. Wilayah Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,505 Ha, yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Adapun Batas wilayah administratif Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

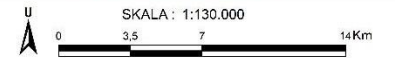
Utara : Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi
Selatan : Kabupaten Cianjur dan Garut
Barat : Kabupaten Bandung Barat
Timur : Kabupaten Sumedang dan Garut

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 m dol. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan. Jarak ibukota Kabupaten Bandung ke ibu kota Provinsi di Kota Bandung adalah sekitar 17 Km. Beberapa kecamatan memiliki jarak di atas 30 Km ke ibukota Kabupaten Bandung di antaranya Kecamatan Nagreg, Kertasari, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibum, Solokan Jeruk, Paseh, Cileunyi dan Pangalengan. Sedangkan kecamatan dengan jarak di bawah 10 Km dari ibukota Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Margaasih, Margahayu, Banjaran, Katapang, Cangkuang dan Kutawaringin. Dengan demikian, secara umum wilayah ibukota kabupaten Bandung masih mudah terjangkau dari setiap kecamatan.



**KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BANDUNG
2025**

**PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BANDUNG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



□ Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

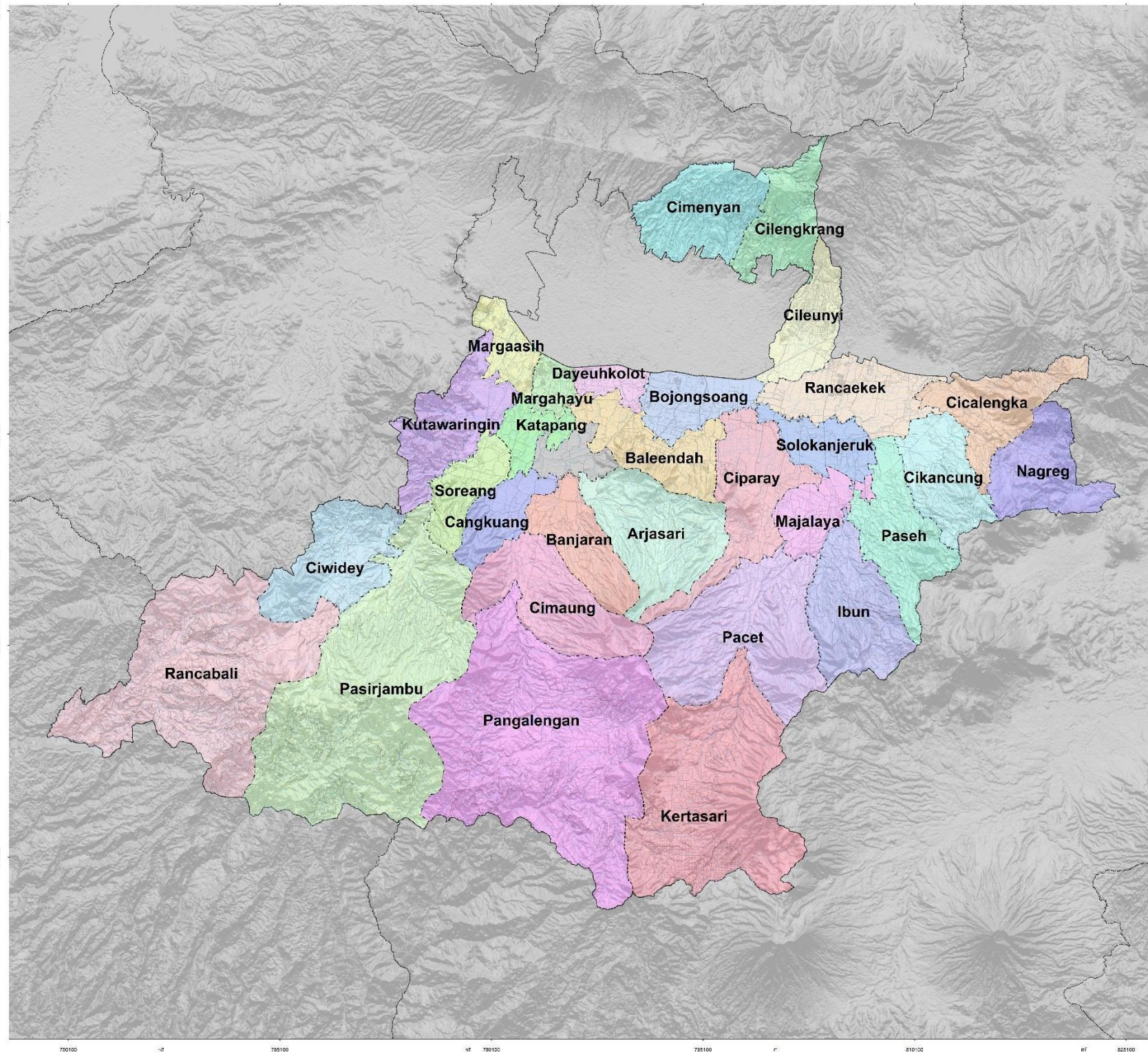
Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota

Jaringan Jalan
 - - - - - Jaringan Jalan

Perairan
 - - - - - Sungai

Administrasi Kecamatan

- | | |
|-------------|--------------|
| Arjasari | Kertasari |
| Baleendah | Kutawaringin |
| Banjaran | Majalaya |
| Bojongsoang | Margaasih |
| Cangkuang | Margahayu |
| Cicalengka | Nagreg |
| Cikancung | Pacet |
| Cilengkrang | Pangalengan |
| Cileunyi | Paseh |
| Cimaung | Pasirjambu |
| Ciminyan | Rancabali |
| Ciparay | Rancaekek |
| Ciwidey | Solokanjeruk |
| Dayeuhkolot | Soreang |
| Ibun | |



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
 1. Peta Digital Rupa Bumi Skala 1:50.000
 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044
 3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

2.1.1.1 Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, luas kondisi geologi tertinggi di Kabupaten Bandung yaitu batuan gunung api plio – plistosen dengan luasan sebesar 108.750,693 Ha. Sedangkan untuk luasan terkecil yaitu pada kondisi geologi danau/waduk/situ sebesar 123,993 Ha. Total luas kondisi geologi di Kabupaten Bandung sebesar 174.836,46 Ha diluar lokasi ketersediaan danau. Untuk lebih jelasnya mengenai luas pada masing-masing jenis geologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Kondisi Geologi Kabupaten Bandung

No	Geologi	Luas (Ha)
1	Batuan Terobosan Neogen	262,909
2	Batuan Gunungapi Neogen (Mio - Plio)	11.340,170
3	Batuan Gunungapi Plio - Plistosen	108.750,693
4	Batuan Gunungapi Kuartar	20.354,904
5	Aluvial dan Endapan Kuartar	34.127,780
Kabupaten Bandung		176.238,505

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024

2.1.1.2 Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi air tanah, luas terbesar yaitu pada jenis hidrologi aquifer produktif sedang sebesar 72.32,223 Ha dan yang paling terkecil pada jenis hidrologi setempat aquifer berproduktif sedang seluas 566,940 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luas pada masing-masing kondisi hidrologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Kondisi Hidrologi Kabupaten Bandung

No	Curah Hujan	Hidrologi	Luas (Ha)
1	2500-3000	Aquifer Produktif Kecil dan Setempat Produktif	2.279,867
2		Aquifer Produktif Sedang	72.323,223
3		Aquifer Produktif Tinggi	2.560,796
4		Daerah Air Tanah Langka	31.430,281
5		Setempat Aquifer Berproduktif Sedang	566,940
6		Setempat Aquifer Produktif	67.076,442
Kabupaten Bandung			176.238,505

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024

2.1.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan

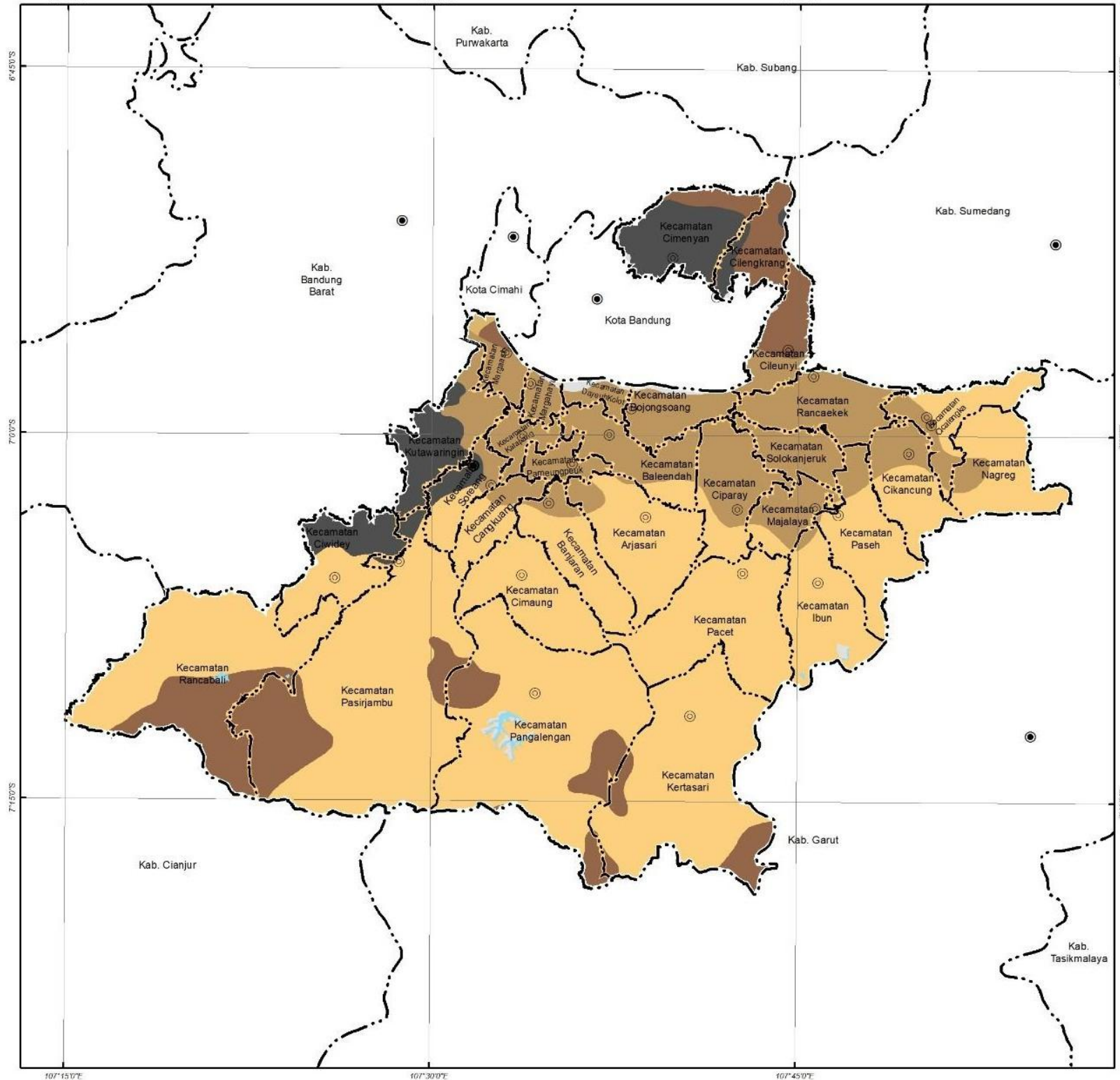
Terdapat 26 jenis penggunaan lahan di Kabupaten Bandung, diantaranya yaitu belukar, danau/waduk, hutan dan lainnya. Jenis guna lahan tertinggi di Kabupaten Bandung berada pada jenis sawah yaitu seluas 40.802,311 Ha. Kemudian luasan tertinggi kedua berada pada jenis guna lahan hutan seluas 37.290,980 Ha. Luasan ketiga tertinggi berada pada jenis guna lahan perkebunan/kebun seluas 22.759,263 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luas penggunaan lahan di masing-masing jenis guna lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Awan Dan Bayangan	0,570
2	Bandara	67,800
3	Belukar	17.694,392
4	Danau/Waduk	357,382
5	Hutan	37.290,980
6	Industri	1.408,881
7	Institusi	339,619
8	Jalan	3.567,724
9	Jalan KA	26,757
10	Kebun Campur	8.170,953
11	Lapangan Golf	122,032
12	Pasar/Pertokoan	3,940
13	Perkebunan/Kebun	22.759,263
14	Perumahan /Komplek Permukiman	16.306,184
15	Rawa	12,742
16	Rumput	52,812
17	Sawah	40.802,311
18	Sawah Tadah Hujan	10,962
19	Semak	3.821,573
20	Stadion/Lapangan	26,215
21	Stasiun/Terminal	2,434
22	Sungai	443,513
23	Taman	19,251

24	Tambang	37,440
25	Tanah Kosong	838,619
26	Tegal/Ladang	22.054,156
Kabupaten Bandung		176.238,505

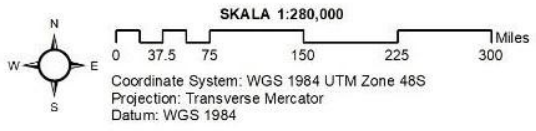
Sumber: Hasil Olah GIS, 2024



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG**

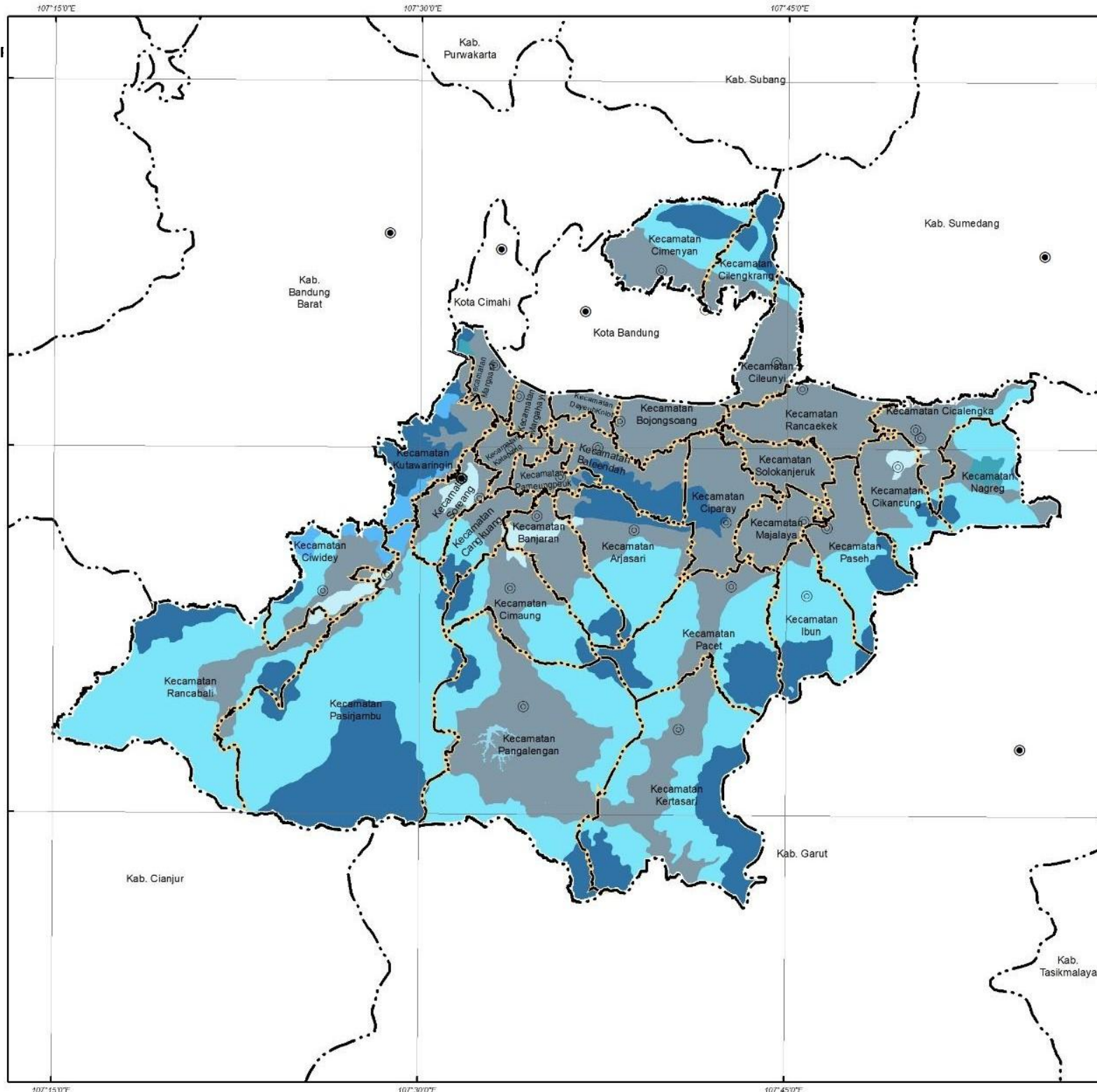
**KAJIAN KEBUTUHAN RUMAH KEMASAN
KABUPATEN BANDUNG**

Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

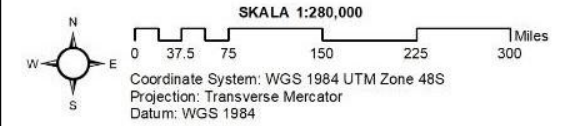


- Legenda**
- | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Kantor Bupati | Batas Kabupaten | Batuan Gunungapi Neogen (Mio - Plio) |
| Kantor Camat | Batas Kecamatan | Batuan Gunungapi Plio - Plistosen |
| | Waduk/Situ | Batuan Terobosan Neogen |
| | | Danau/Waduk/Situ |

SUMBER DATA:
 RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung

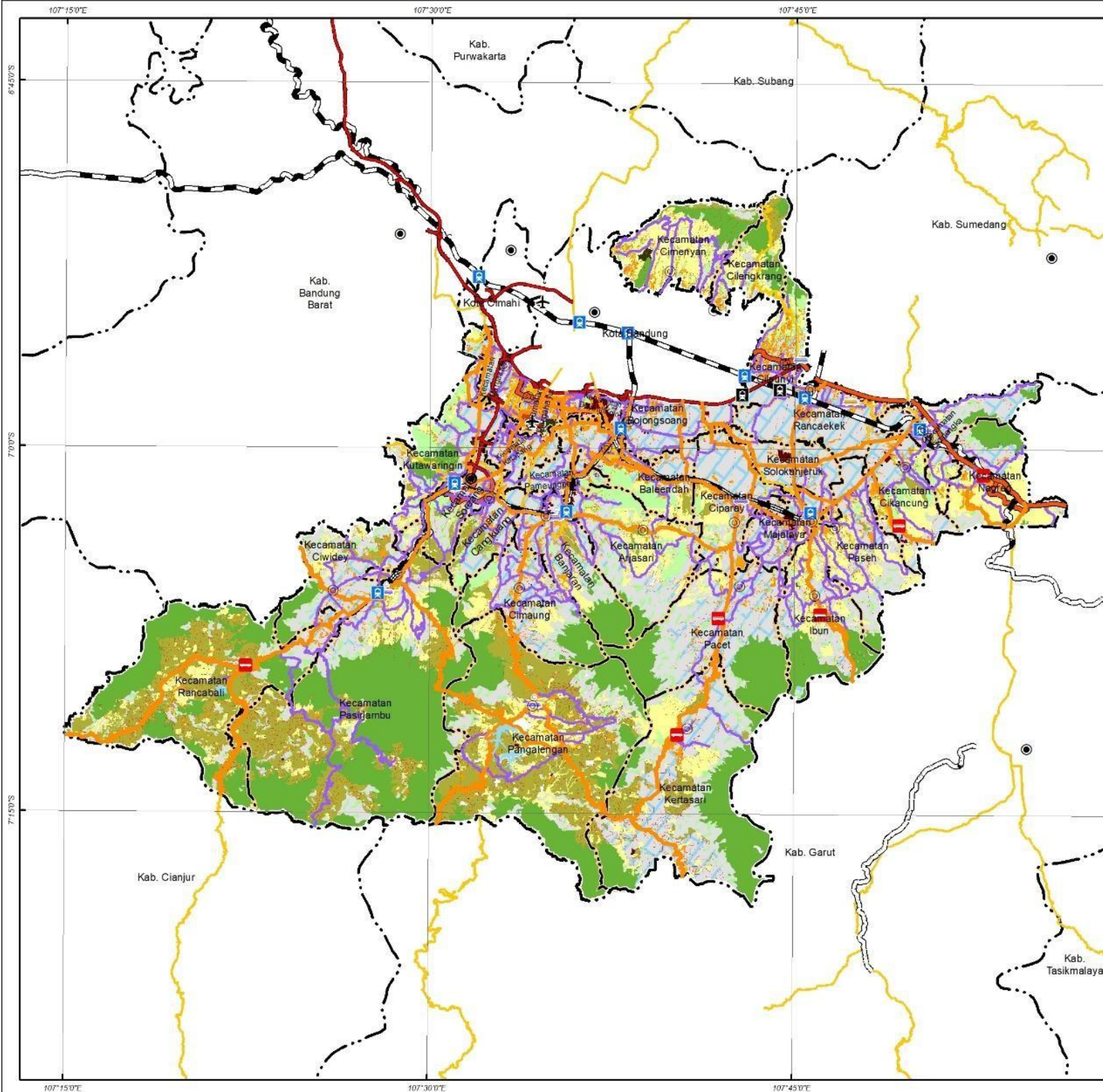


Legenda

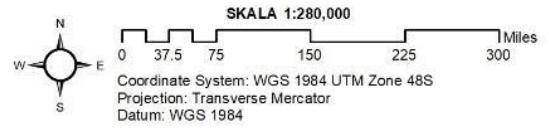
- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Hidrologi |
| ● Kantor Bupati | — Batas Kabupaten | ■ Aqifer Produktif Kecil dan Setempat Produktif |
| ⊙ Kantor Camat | — Batas Kecamatan | ■ Aqifer Produktif Tinggi |
| | Waduk/Situ | ■ Aqifer Produktif Sedang |
| | ■ Waduk/Situ | ■ Daerah Air Tanah Langka |
| | | ■ Setempat Aqifer Nonproduktif Sedang |
| | | ■ Setempat Aqifer Produktif |

SUMBER DATA:

RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



**Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan
Kabupaten Bandung**



- Legenda**
- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Pusat Pemerintahan | Pengembangan Terminal | Stasiun |
| ● Kantor Bupati | ■ Pengembangan Sub Terminal | ⊠ Stasiun |
| ⊙ Kantor Camat | — Pengembangan Terminal Antarmoda | ⊠ Stasiun KA Cipta |
| Batas Administrasi | — Rencana Pembangunan Terminal Type A | Bandara |
| — Batas Kabupaten | — Rencana Pembangunan Terminal Type B | ✈ Bandara |
| — Batas Kecamatan | — Pengembangan Terminal Type C | |
| Waduk/Situ | | |
| ■ Waduk/Situ | | |
| Jaringan Jalan | Penggunaan Lahan | ■ Perkebunan/Kebun |
| — Rei Kereta Api | ■ Semak/Belukar | ■ Perumahan |
| — Arteri Primer | ■ Simpul Transportasi | ■ Rawa |
| — Kolektor Primer | ■ Perairan | ■ Rumput |
| — Lokal Primer | ■ Hulian | ■ Sawah |
| — Jalan Tol | ■ Industri | ■ Sawah Tadah Hujan |
| | ■ Institusi | ■ Taman |
| | ■ Badan Jalan | ■ Tambang |
| | ■ Kebun Campur | ■ Tanah Kosong |
| | ■ RTH | ■ Tegal/Ladang |
| | ■ Pasari/Pertokoan | |

SUMBER DATA:
RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

2.1.1.4 Kondisi Rawan Bencana

1. Rawan Bencana Banjir

Banjir merupakan kondisi meningkatnya volume air sehingga mengakibatkan suatu daerah daratan menjadi tergenang/terendam (BNPB). Untuk menentukan wilayah potensi rawan tergenang banjir digunakan metode GFI (*Geomorphic Flood Index*). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, bahwa ketinggian banjir di Kabupaten Bandung mencapai 22.391,700 Ha.

Tabel 2.4 Kondisi Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bandung

No	Kejadian	Ketinggian	Luas (Ha)
1	1	1	22.391,700
2	2	2	5.750,610
3	3	2	1.880,060
4	4	3	366,480
5	5	3	1.337,560
6	6	3	954,850
Kabupaten Bandung			32.681,260

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024

2. Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa kategori rawan bencana gempa bumi terluas di Kabupaten Bandung berada pada kategori menengah dengan luas 92.691,027 Ha.

Tabel 2.5 Kondisi Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bandung

Kategori Rawan Bencana Gempa Bumi	Luas (Ha)
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah	92.691,027
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi	83.610,001
Kabupaten Bandung	176.301,028

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024

3. Rawan Bencana Gerakan Tanah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa zona kerentanan terluas berada pada zona kerentanan Gerakan tanah menengah seluas 84.787,012 Ha di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.6 Kondisi Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Bandung

	Kategori Kerentanan Rawan Bencana Gerakan Tanah	Luas (Ha)
	Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah	28.305,448
	Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah	60.466,479
	Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah	84.787,012
	Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi	2.389,599
	Kabupaten Bandung	175.948,537

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024

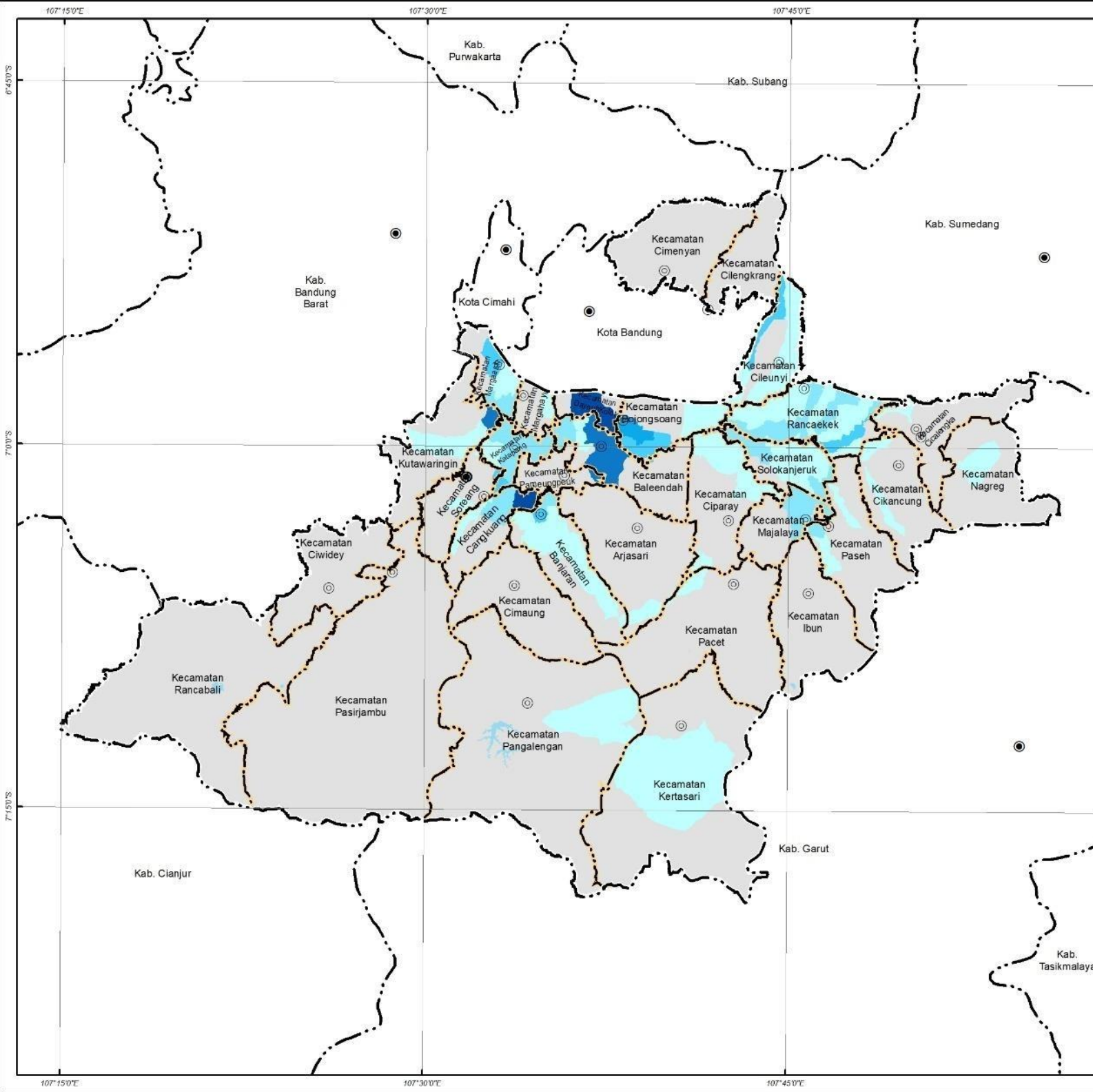
4. Rawan Bencana Gunung Berapi

Jenis rawan bencana gunung berapi di Kabupaten Bandung berada di beberapa lokasi salah satunya di Tangkuban perahu. Lokasi rawan bencana terluas berada di jenis rawan letusan gunung api di daerah Guntur – Garut seluas 2.475,699 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi rawan bencana gunung berapi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

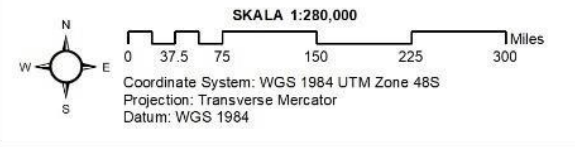
Tabel 2.7 Kondisi Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Bandung

Jenis Rawan Bencana Gunung Berapi	Status Rawa Bencana Gunung Berapi	Lokasi Rawan Bencana Gunung Berapi	Luas (Ha)
Rawan Aliran Lahar	Berpotensi Terhadap Aliran Lahar	Tangkuban Parahu-Bandung	43,131
	Rawan Terhadap Aliran Lahar/Banjir	Papandayan-Garut	79,070
	Waspada Terhadap Lahar Hujan	Guntur-Garut	281,321
Rawan Letusan Gunung Api	Rawan Terhadap Hujan Abu Lebat dan Kemungkinan Dapat Terkena Lontaran Batu (Pijar)	Papandayan-Garut	1.787,987
	Waspada Terhadap Jatuhan Piroklastik	Guntur-Garut	2.475,699
Rawan Letusan Gunung Api	Bahaya Terhadap Lontaran Piroklastik	Guntur-Garut	290,421
	Rawan Terhadap Awan Panas, Aliran Lava, Aliran Lahar, Gas Beracun, Lontaran Batu (Pijar), Hujan Abu*	Papandayan-Garut	282,909
	Rawan Terhadap Lontaran Batu (Pijar) dan Hujan Abu Lebat	Papandayan-Garut	367,548
Rawan Letusan Gunung Api	Bahaya Terhadap Awan Panas, Aliran Lava, dan Lontaran Piroklastik	Guntur-Garut	6,646
Kabupaten Bandung			5.614,731

Sumber: Hasil Olah GIS, 2024



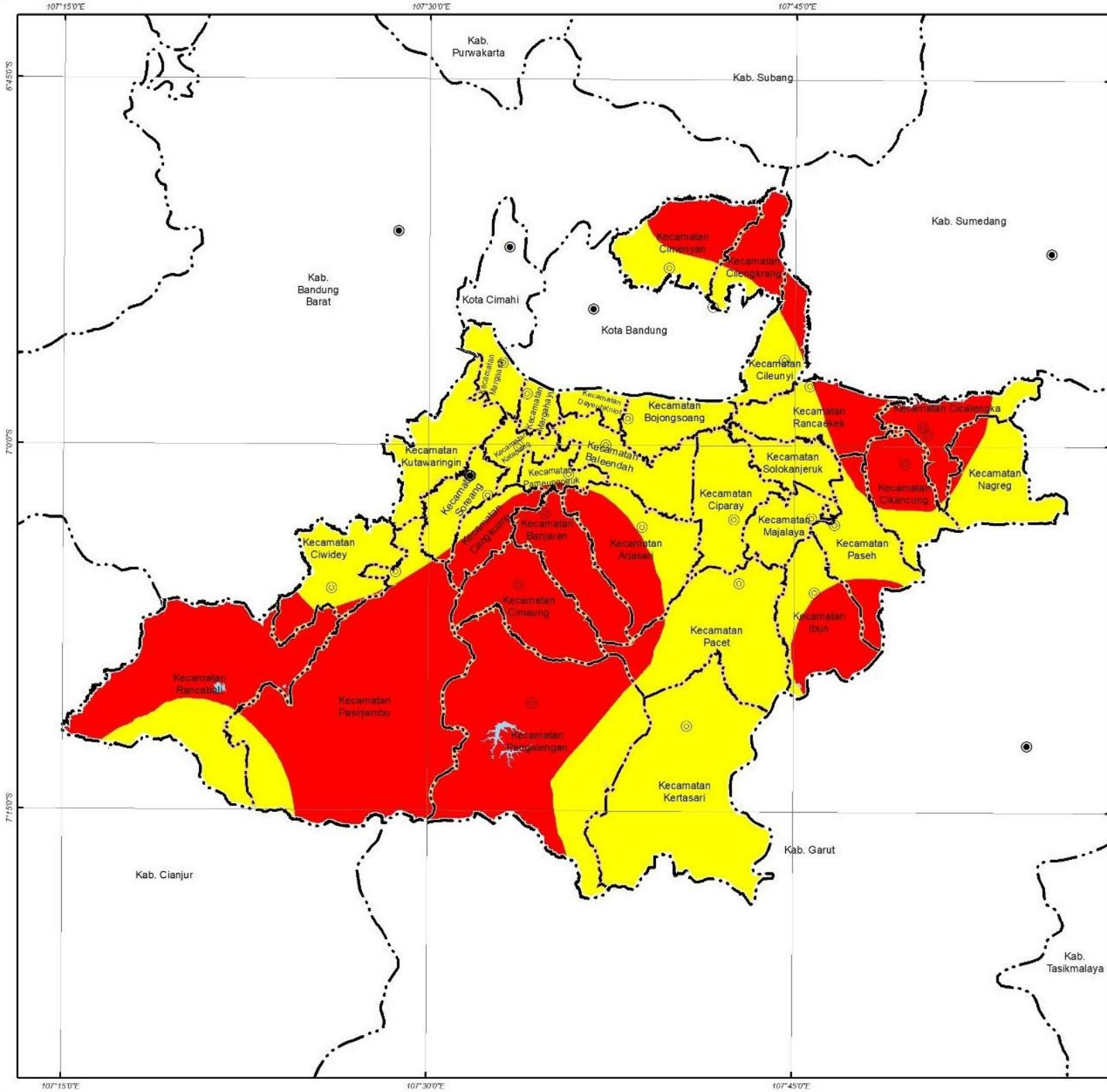
**Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Banjir
Kabupaten Bandung**



Legenda

	Pusat Pemerintahan		Batas Administrasi		Kejadian, Ketinggian
	Kantor Camat		Batas Kecamatan		1, 1
	Waduk/Situ				2, 2
					3, 2
					4, 3
					5, 3
					6, 3

SUMBER DATA:
RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

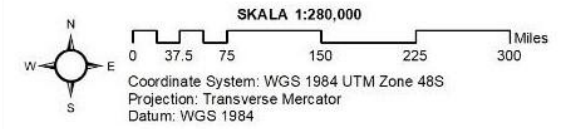


DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG

Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Gempa

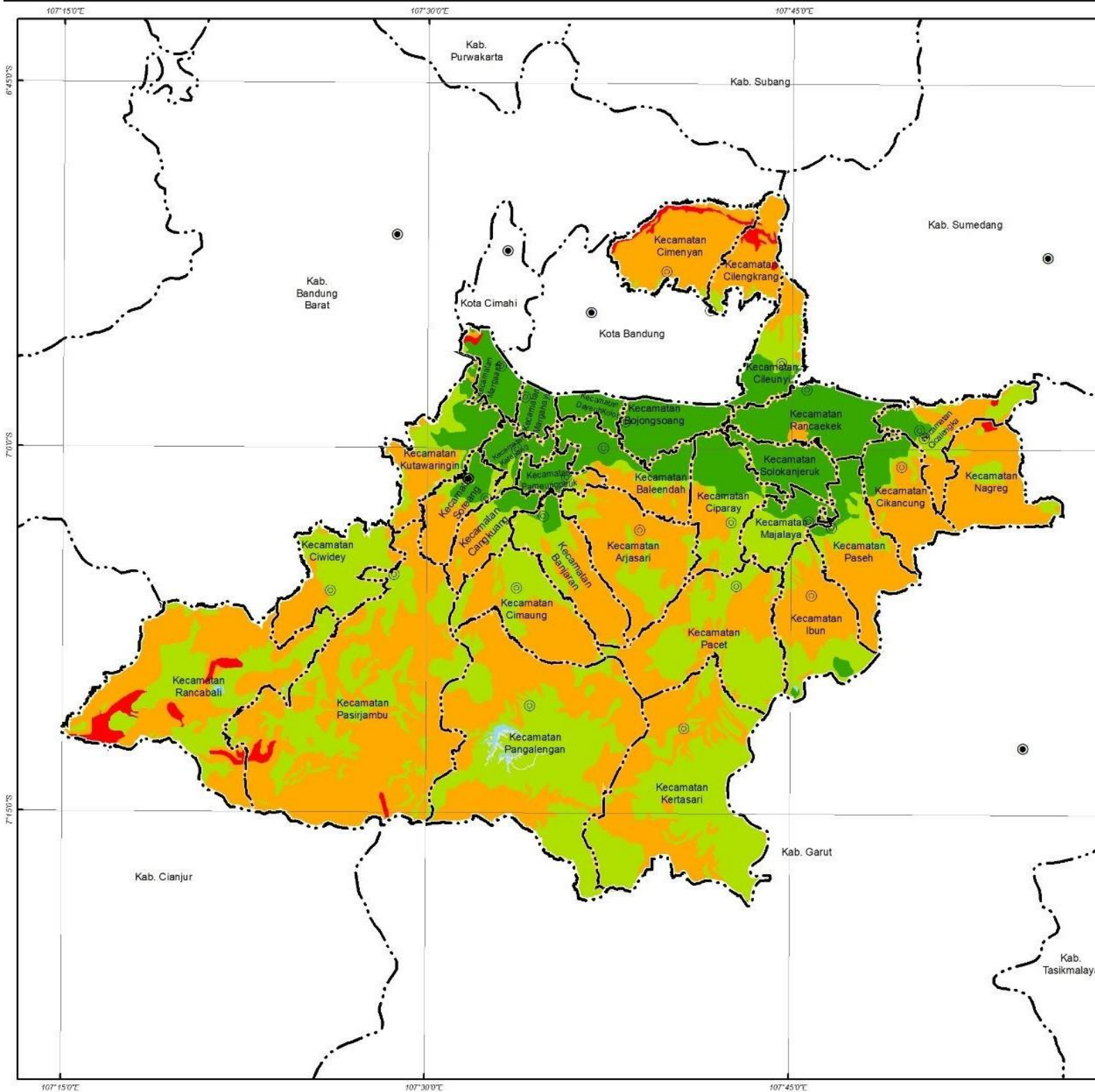
Bumi Kabupaten Bandung



Legenda

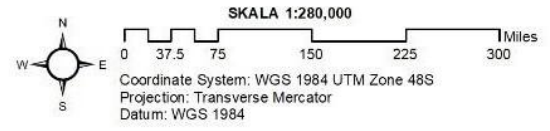
- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pusat Pemerintahan | Batas Administrasi | Klasifikasi |
| ● Kantor Bupati | — Batas Kabupaten | Rawan Gempa Bumi Menengah |
| ⊙ Kantor Camat | — Batas Kecamatan | Rawan Gempa Bumi Tinggi |
| Waduk/Situ | | |
| ■ Waduk/Situ | | |

SUMBER DATA:
RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



**KAJIAN KEBUTUHAN RUMAH KEMASAN
KABUPATEN BANDUNG**

**Gambar 2.13 Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah
Kabupaten Bandung**



Legenda

	Pusat Pemerintahan		Batas Administrasi		Klasifikasi
					Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
					Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
					Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
					Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi
			Waduk/Situ		
					Waduk/Situ

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 3.721,111. Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung berada di Kecamatan Baleendah sebesar 274.244 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi kedua dan ketiga berada di Kecamatan Cileunyi sebesar 192,693 jiwa dan Kecamatan Rancaekek 189,653 jiwa.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
	2023	2020-2023
Ciwidey	89,863	1,42
Rancabali	51,589	0,35
Pasirjambu	93,775	1,02
Cimaung	89,418	1,40
Pangalengan	157,296	0,71
Kertasari	72,183	0,47
Pacet	118,278	1,01
Ibun	89,712	1,11
Paseh	140,119	1,04
Cikancung	100,495	1,41
Cicalengka	125,022	0,85
Nagreg	60,807	1,47
Rancaekek	189,653	0,81
Majalaya	161,696	0,24
Solokanjeruk	88,774	0,83
Ciparay	177,677	1,06
Baleendah	274,244	1,43
Arjasari	109,176	1,22
Banjaran	136,524	1,18
Cangkuang	83,935	1,92
Pameungpeuk	88,676	1,74
Katapang	136,164	1,58
Soreang	119,422	0,86
Kutawaringin	105,625	1,11

Margaasih	151,722	0,77
Margahayu	120,638	-0,29
Dayeuhkolot	105,855	-0,45
Bojongsoang	114,654	0,64
Cileunyi	192,693	1,19
Cilengkrang	58,637	1,68
Cimendan	116,789	0,70
Kabupaten Bandung	3.721,111	0,97

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024

2.1.2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 1.762,40 km², rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per km². Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Margahayu yang mencapai 11.446 jiwa per km², sedangkan yang terendah di Kecamatan Rancabali dengan tingkat kepadatan penduduk 348 jiwa per km².

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Per km ²)
	2023
Ciwidey	1.854
Rancabali	348
Pasirjambu	391
Cimaung	1.626
Pangalengan	805
Kertasari	475
Pacet	1.286
Ibun	1.644
Paseh	2.746
Cikancung	2.504
Cicalengka	3.474
Nagreg	1.233
Rancaekek	4.191

Majalaya	6.376
Solokanjeruk	3.697
Ciparay	3.847
Baleendah	6.599
Arjasari	1.680
Banjaran	3.181
Cangkuang	3.411
Pameungpeuk	6.065
Katapang	8.662
Soreang	4.681
Kutawaringin	2.233
Margaasih	8.268
Margahayu	11.446
Dayeuhkolot	9.597
Bojongsoang	4.123
Cileunyi	6.102
Cilengkrang	1.947
Cimencyan	2.200
Kabupaten Bandung	114.054

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024

2.1.3 Aspek Infrastruktur

2.1.3.1 Sarana Prasarana Transportasi

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Jaringan Jalan yang masuk dalam wilayah kewenangan Kabupaten Bandung sepanjang 1.160,297 km dengan 44,77 persen jalan sudah beraspal. Jalan sepanjang 1.160,297 km ini merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Selain itu, jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi.

Tabel 2.10 Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan Pemerintah

Tingkat Kewenangan	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)
Nasional	105,68	105,68	105,68
Provinsi	127,53	127,53	127,53
Kabupaten	1.160,293	1.160,293	1.160,297

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

Adapun kondisi jalan di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 dengan kondisi jalan baik sepanjang 589,379 km dan kondisi rusak berat sepanjang 133,360 km.

Tabel 2.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung

Kondisi Jalan	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)
Baik	659,485	661,535	589,379
Sedang	336,784	349,674	437,558
Rusak	82,49	72,387	-
Rusak Berat	81,531	76,697	133,360

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

2.1.3.2 Kondisi Daerah Aliran Sungai

Air permukaan yang ada di Kabupaten Bandung bersumber dari sungai, mata air, danau, dan rawa. Air permukaan tersebut umumnya

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber air baku, irigasi pertanian, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24-60 m) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan. Sementara itu, pemanfaatan air tanah dalam (60-200 m) biasanya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga.

Kabupaten Bandung memiliki 4 danau alam, 3 danau buatan, serta 172 buah sungai dan anak – anak sungai. Sebagian besar sungai di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dilihat dari luas tangkapan DAS, Kabupaten Bandung memiliki 4 Sub DAS yang potensial sebagai sumber air baku antara lain Sub DAS Citarik, Sub DAS Cisarea, Sub DAS Cisangkuy, dan Sub DAS Ciwidey. DAS yang ada di Kabupaten Bandung terdiri dari DAS Cibuni, DAS Cikandang, DAS Cilaki dan DAS Cimanuk. Sedangkan penyebaran DAS Citarum Hulu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan tabel di bawah ini, Kabupaten Bandung rata-rata dilewati daerah aliran sungai Citarum dengan luas sebesar 134.619,24 hektar.

Tabel 2.12 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bandung

Kecamatan	Citarum Hulu (Ha)	DAS Cibuni (Ha)	DAS Cikandang (Ha)	DAS Cilaki (Ha)	DAS Cimanuk (Ha)	Total (Ha)
Arjasari	6335,87					6335,87
Baleendah	4070,11					4070,11
Banjaran	3562,90					3562,90
Bojongsoang	2831,51					2831,51
Cangkuang	2366,15					2366,15
Cicalengka	4220,90					4220,90
Cikancung	3766,56				151,02	3917,59
Cilengkrang	3511,06					3511,06
Cileunyi	3067,24					3067,24
Cimaung	5974,35					5974,35
Cimendan	4768,13					4768,13

Ciparay	5502,41					5502,41
Ciwidey	5219,28					5219,28
Dayeuhkolot	1127,49					1127,49
Ibun	5285,77				254,70	5540,48
Katapang	1624,62					1624,62
Kertasari	7174,46		2502,26	3946,05		13622,77
Kutawaringin	4774,74					4774,74
Majalaya	2413,79					2413,79
Margaasih	1816,07					1816,07
Margahayu	1064,54					1064,54
Nagreg	2714,95				1527,09	4242,04
Pacet	9569,96					9569,96
Pameungpeuk	1436,71					1436,71
Pangalengan	12891,88			8778,46		21670,34
Paseh	4664,70				130,38	4795,08
Pasirjambu	10342,20	64,00		9722,95		20129,16
Rancabali	3064,48	11066,92		1321,26		15452,66
Rancaekek	4511,23					4511,23
Solokanjeruk	2440,41					2440,41
Soreang	2504,75					2504,75
Total	134619,24	11130,92	2502,26	23768,72	2063,20	174084,34

2.1.3.3 Jaringan Listrik

Pada energi ini akan dibahas terkait sumber daya air dan energi listrik di Kabupaten Bandung pada tahun 2022. Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah produksi listrik di Jawa Barat. Merujuk pada informasi dari PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, pelanggan listrik PLN UP3 Majalaya terbagi ke dalam lima area. Kelima area tersebut di antaranya adalah Majalaya, Soreang, Rancaekek, Banjaran, dan Baleendah. Untuk jumlah pelanggan listrik terbesar terdapat sebanyak 878.672 pelanggan di tahun 2022.

Tabel 2.13 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Kabupaten Bandung

No	Wilayah	Jumlah Pelanggan
1	Majalaya	167.968
2	Soreang	198.592
3	Rancaekek	164.960

4	Banjaran	173.865
5	Baleendah	173.287

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

2.1.3.4 Sumber daya Air

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya, dimana sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberi manfaat dan atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Kabupaten Bandung terdapat beberapa sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi yang terdiri atas jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air.

2.1.4 Aspek Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu wilayah maupun kawasan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun suatu organisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya diluar indikator yang lain. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional maupun pembangunan daerahnya (Putong, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ekonomi terbagi menjadi sembilan sektor yaitu :

1. pertanian;
2. pertambangan dan penggalian;
3. industri pengolahan;
4. listrik, gas dan air bersih;
5. konstruksi/bangunan;
6. perdagangan, hotel dan restoran;
7. pengangkutan dan komunikasi;
8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
9. jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Berikut merupakan PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Bandung.

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.548,09	9.628,77	9.655,32	9.978,40	10.845,71
Pertambangan dan Penggalian	2.483,83	2.165,06	2.522,29	3.229,31	2.832,86
Industri Pengolahan	66.451,88	65.570,53	69.429,74	76.746,90	80.869,40
Pengadaan Listrik dan Gas	136,36	125,7	128,57	127,27	135,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,75	47,37	51,71	54,25	54,37
Konstruksi	7.640,10	7.775,19	8.194,24	8.672,37	9.638,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.282,32	15.262,90	16.532,07	18.110,54	19.925,05
Transportasi dan Pergudangan	4.465,22	4.455,17	4.477,87	5.243,11	6.501,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.501,62	3.019,92	3.112,01	3.389,40	3.831,29
Informasi dan Komunikasi	1.904,34	2.332,00	2.539,58	2.656,69	2.892,35

Jasa Keuangan dan Asuransi	817,11	861,33	909,89	963,65	1.065,3
Real Estat	1.461,97	1.470,25	1.643,77	1.792,77	1.997,7
Jasa Perusahaan	559,74	490,1	543,82	611,15	694,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.595,58	2.478,3	2.449,45	2.448,29	2.613,78
Jasa Pendidikan	3.877,79	4.239,07	4.535,73	4.782,26	5.256,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.059,89	1.044,9	1.084,54	1.207,2	1.430,8
Jasa lainnya	2.622,22	2.636,33	2.666,25	2.988,50	3.365,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	123.985,75	123.602,78	123.602,78	143.002,07	153.950,74

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024

2.1.4.1 Potensi Ekonomi di Kabupaten Bandung

Potensi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi komoditas unggulan berdasarkan lapangan usaha yang diambil dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah yang tidak terbatas pada bentuk barang dan jasa dengan mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung secara makro ditunjukkan oleh nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bandung sebesar Rp.

143.001,98 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan pada PDRB tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 131.469,45 juta rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar Rp. 88.437,95 dibandingkan PDRB tahun sebelumnya yaitu 83.947,14 juta rupiah.

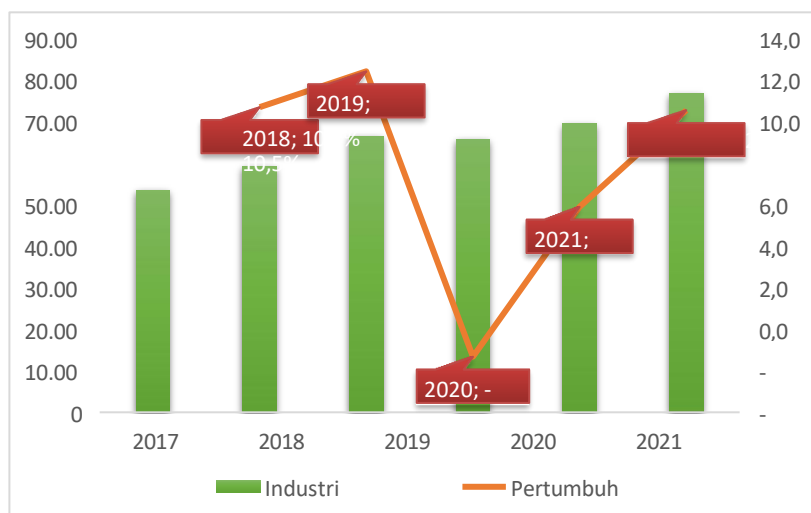
Pertumbuhan Ekonomi secara riil ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 3,88 persen. Angka tersebut meningkat sebesar 0,08 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,80 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung berdasarkan PDRB atas harga berlaku dan konstan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022
(Milyar Rupiah)

PDRB Kabupaten Bandung								LPE (%)					
No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017- 2018	2018- 2019	2019 -	2020 -	2021- 2022	Rata -
										2020	2021		rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.180,37	8.822,88	9.548,09	9.628,77	9.655,32	9.978,40	7,85	8,22	0,84	0,28	3,35	4,11
2	Pertambangan dan Penggalian	2.190,04	2.432,72	2.483,83	2.165,06	2.522,29	3.229,30	11,08	2,10	- 12,8 3	16,50	28,03	4,21
3	Industri Pengolahan	53.410,54	59.116,97	66.451,88	65.570,53	69.429,74	76.746,90	10,68	12,41	-1,33	5,89	10,54	6,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	132,91	131,93	136,36	125,7	128,57	127,26	- 0,74	3,36	- 7,82	2,28	- 1,02	- 0,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,43	39,62	42,75	47,37	51,71	54,24	15,07	7,90	10,81	9,16	4,89	10,74
6	Konstruksi	6.289,85	7.104,23	7.640,10	7.775,19	8.189,24	8.672,37	12,95	7,54	1,77	5,33	5,90	6,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.878,21	14.774,55	15.282,32	15.267,38	16.532,07	18.110,54	6,46	3,44	- 0,10	8,28	9,55	4,52
8	Transportasi dan Pergudangan	3.997,83	4.236,27	4.465,22	4.455,17	4.477,85	5.243,11	5,96	5,40	- 0,23	0,51	17,09	2,91

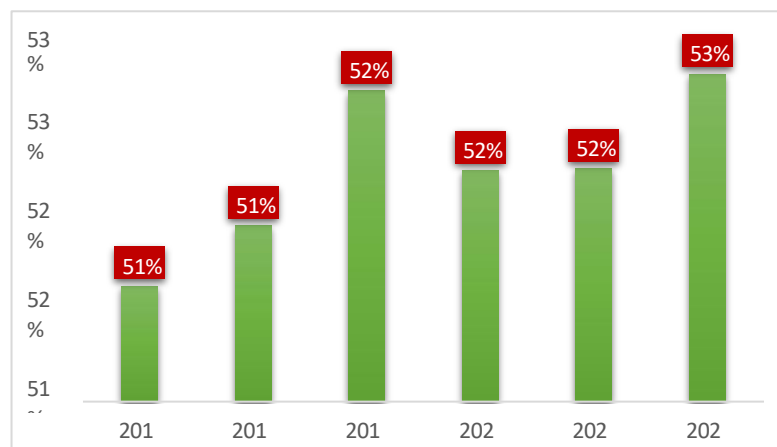
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.504,80	2.766,08	3.036,55	3.016,97	3.109,63	3.389,39	10,43	9,78	- 0,64	3,07	9,00	5,66
10	Informasi dan Komunikasi	1.579,87	1.721,50	1.904,34	2.332,00	2.539,58	2.656,69	8,96	10,62	22,46	8,90	4,61	12,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	706,11	777,63	817,11	861,33	909,89	963,64	10,13	5,08	5,41	5,64	5,91	6,56
12	Real Estat	1.135,60	1.273,92	1.461,97	1.470,25	1.643,77	1.792,76	12,18	14,76	0,57	11,80	9,06	9,83
13	Jasa Perusahaan	442,54	498,9	559,74	490,01	543,82	611,15	12,74	12,19	- 12,4 6	10,98	12,38	5,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.272,25	2.439,24	2.595,58	2.478,30	3.449,45	2.448,29	7,35	6,41	- 4,52	39,19	- 29,02	12,11
15	Jasa Pendidikan	3.125,71	3.561,84	3.877,79	4.239,07	4.535,73	4.782,25	13,95	8,87	9,32	7,00	5,44	9,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	837,26	926,48	1.059,89	1.044,90	1.084,54	1.207,19	10,66	14,40	- 1,41	3,79	11,31	6,86
17	Jasa Lainnya	2.147,28	2.357,33	2.622,22	2.636,33	2.666,25	2.988,50	9,78	11,24	0,54	1,13	12,09	5,67
TOTAL		102.865,6 0	112.982,0 9	123.985,7 4	123.604,3 3	131.469,4 5	143.001,9 8	9,83	9,74	- 0,31	6,36	8,77	6,41
RERATA								9,74	8,53	0,56	8,12	7,10	6,72

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Bandung, diketahui bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang tinggi yaitu pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.



Gambar 2.16 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung terjadinya naik turun kontribusi ditinjau dari PDRB adanya kecenderungan mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan.



Gambar 2.17 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Total PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2017-2022

2.1.4.2 Kontribusi (Share) Sektor Non-Migas Kabupaten Bandung

Berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan, kontribusi (*share*) ekonomi yang memberikan kontribusi besar bagi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 adalah sektor industri pengolahan sebesar 52,64% dan Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor sebesar 12,97%. Sama halnya dengan kontribusi (*share*) ekonomi yang memberikan kontribusi besar bagi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung berdasarkan harga konstan pada tahun 2022 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 53,67 % dan Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor sebesar 12,66 %. Untuk lebih jelasnya kontribusi ekonomi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Kontribusi Ekonomi Kabupaten Bandung Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.180,37	8.822,88	9.548,09	9.628,77	9.655,32	9.978,40	7,95	7,81	7,7	7,79	7,34	6,98
2	Pertambangan dan Penggalian	2.190,04	2.432,72	2.483,83	2.165,06	2.522,29	3.229,30	2,13	2,15	2	1,75	1,92	2,26
3	Industri Pengolahan	53.410,54	59.116,97	66.451,88	65.570,53	69.429,74	76.746,90	51,92	52,3	53,6	53,05	52,81	53,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	132,91	131,93	136,36	125,7	128,57	127,26	0,13	0,1	0,11	0,1	0,1	0,09%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,43	39,62	42,75	47,37	51,71	54,24	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	6.289,85	7.104,23	7.640,10	7.775,19	8.189,24	8.672,37	6,11	6,29	6,16	6,29	6,23	6,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	13.878,	14.774,	15.282,	15.267,	16.532,	18.110,	13,4	13,0	12,3	12,3	12,5	12,6

	dan Sepeda Motor	21	55	32	38	07	54	9	8	3	5	7	6
8	Transportasi dan Pergudangan	3.997,8 3	4.236,2 7	4.465,2 2	4.455,1 7	4.477,8 5	5.243,1 1	3,89	3,7 5	3,6	3,6	3,41	3,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.504,8 0	2.766,0 8	3.036,5 5	3.016,9 7	3.109,6 3	3.389,3 9	2,44	2,4 5	2,45	2,44	2,37	2,37
10	Informasi dan Komunikasi	1.579,8 7	1.721,5 0	1.904,3 4	2.332,0 0	2.539,5 8	2.656,6 9	1,54	1,5 2	1,54	1,89	1,93	1,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	706,11	777,63	817,11	861,33	909,89	963,64	0,69	0,6 9	0,66	0,7	0,69	0,67
12	Real Estat	1.135,6 0	1.273,9 2	1.461,9 7	1.470,2 5	1.643,7 7	1.792,7 6	1,1	1,1 3	1,18	1,19	1,25	1,25
13	Jasa Perusahaan	442,54	498,9	559,74	490,01	543,82	611,15	0,43	0,4 4	0,45	0,4	0,41	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.272,2 5	2.439,2 4	2.595,5 8	2.478,3 0	3.449,4 5	2.448,2 9	2,21	2,1 6	2,09	2,01 %	2,62	1,71
15	Jasa Pendidikan	3.125,7 1	3.561,8 4	3.877,7 9	4.239,0 7	4.535,7 3	4.782,2 5	3,04	3,1 5	3,13	3,43	3,45	3,34
16	Jasa Kesehatan dan	837,26	926,48	1.059,8	1.044,9	1.084,5	1.207,1	0,81	0,8	0,8	0,85	0,82	0,84

	Kegiatan Sosial			9	0	4	9		2				
17	Jasa Lainnya	2.147,2	2.357,3	2.622,2	2.636,3	2.666,2	2.988,5	2,09	2,0	2,11	2,13	2,03	2,09
		8	3	2	3	5	0		9				
	Total	102.86	112.98	123.98	123.60	131.46	143.00	100	100	100	100	100	100
		5,60	2,09	5,74	4,33	9,45	1,98						

Analisis LQ adalah analisis ekonomi wilayah yang digunakan untuk menentukan sub sektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Sub sektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Berdasarkan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 yang merupakan sektor basis adalah Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2.17 LQ Kabupaten Bandung Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata LQ 2017-2021	Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.356,85	5.435,18	5.568,48	5.575,89	5.646,20	5.582,33	0,95	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1.638,15	1.730,32	1.702,09	1.709,49	1.734,15	1.685,75	1,73	Basis
3	Industri Pengolahan	36.963,26	39.727,65	43.323,38	41.922,97	43.430,18	46.555,85	1,21	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	95,65	94,02	94,86	90	91,97	89,99	0,31	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,95	26,61	27,69	30,52	32,96	34,26	0,42	Non Basis
6	Konstruksi	4.912,75	5.306,68	5.524,71	5.602,97	5.666,93	5.731,10	0,81	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.222,30	10.600,07	10.652,38	10.259,70	10.963,58	11.471,73	0,88	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	2.705,2	2.820,29	2.916,67	2.795,90	2.736,22	3.020,0	0,74	Non Basis

		1					5		
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.767,70	1.894,01	2.030,80	1.965,59	1.967,98	2.070,81	0,90	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1.644,42	1.802,98	1.994,22	2.464,99	2.700,28	2.859,97	0,54	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	530,82	557,47	573,7	606,53	628,41	615,19	0,29	Non Basis
12	Real Estat	918,27	1.014,60	1.113,27	1.109,15	1.249,68	1.321,03	1,03	Basis
13	Jasa Perusahaan	343,4	372,64	405,35	347,52	379,98	408,99	1,09	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.515,99	1.544,14	1.593,40	1.491,42	1.451,99	1.454,50	1,01	Basis
15	Jasa Pendidikan	2.289,58	2.432,68	2.587,15	2.697,74	2.832,43	2.885,12	1,11	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	599,94	648,82	708,39	684,26	709,13	785,65	1,04	Basis
17	Jasa Lainnya	1.510,22	1.605,06	1.730,90	1.704,42	1.725,07	1.865,63	0,95	Non Basis
TOTAL		73.039,46	77.613,22	82.547,44	81.059,06	83.947,14	88.437,95		

2.1.4.3 Ekspor Kabupaten Bandung

Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri untuk dijual di pasar internasional. Dalam konteks ekonomi, ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam perdagangan internasional dan dapat menjadi sumber pendapatan devisa bagi suatu negara. Perusahaan atau individu yang melakukan ekspor disebut eksportir.

Ekspor bisa berbentuk berbagai macam barang dan jasa, termasuk produk pertanian, manufaktur, teknologi, dan layanan profesional. Kegiatan ekspor juga biasanya melibatkan proses administrasi, termasuk perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan internasional dan nasional. Adapun pada tahun 2023 dimana Negara Prancis merupakan wilayah dengan ekspor terbesar dengan nilai 12.239.467,80 Dolar.

Tabel 2.18 10 Besar Wilayah Negara Ekspor Industri Tahun 2023

No	Negara	Nilai Ekspor (Dolar)
1	France	12.239.467,80
2	Germany	8.488.970,36
3	Netherlands	6.806.172,01
4	Finland	5.099.220,83
5	Belgium	4.761.738,69
6	Spain	4.701.914,36
7	Italy	2.971.172,74
8	Estonia	2.384.226,60
9	Greece	1.485.425,96
10	Slovenia	1.341.545,97

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
Tahun 2024

Tabel 2.19 Jenis Komoditas Ekspor Terbesar

	Tahun	Komoditas	Besaran (Dollar)
	2022	Garmen	8.184.972,90
	2023	Garmen	29.415.920,12

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
Tahun 2024*

No	Jenis Lapangan Usaha	LQ	Interpretasi	PB	Interpretasi	Kuadran
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,95	LQ < 1	-0,07	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
2	Pertambangan dan Penggalian	1,73	LQ > 1	-0,08	PB < 0	Berkembang
3	Industri Pengolahan	1,21	LQ > 1	0,02	PB > 0	Unggulan, Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	LQ < 1	-0,08	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,42	LQ < 1	-0,02	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
6	Konstruksi	0,81	LQ < 1	-0,04	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,88	LQ < 1	-0,01	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
8	Transportasi dan Pergudangan	0,74	LQ < 1	0,05	PB > 0	Unggulan, Terbelakang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,90	LQ < 1	0,00	PB = 0	Terbelakang
10	Informasi dan Komunikasi	0,54	LQ < 1	0,00	PB = 0	Terbelakang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	LQ < 1	-0,08	PB < 0	Berkembang, Terbelakang
12	Real Estate	1,03	LQ > 1	0,00	PB > 0	Potensial
13	Jasa Perusahaan	1,09	LQ > 1	0,02	PB > 0	Potensial

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	LQ > 1	-0,05	PB < 0	Berkembang, Potensial
15	Jasa Pendidikan	1,11	LQ > 1	-0,04	PB < 0	Berkembang, Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	LQ > 1	0,05	PB > 0	Unggulan, Potensial

2.1.4.4 Share Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bandung

Produktivitas kerja perekonomian daerah. Analisis shift share akan menggambarkan sektor unggulan, potensial berkembang dan terbelakang yang menjadi faktor kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 yang merupakan sektor unggulan adalah Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Pendidikan. Untuk lebih jelasnya analisis shift share berdasarkan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Shift Share Kabupaten Bandung Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022

No	Jenis Lapangan Usaha	LQ	Interpretasi	PB	Interpretasi	Kuadran
17	Jasa Lainnya	0,95	LQ < 1	0,03	PB > 0	Unggulan, Terbelakang

Sumber: Hasil Analisis 2024

Sektor industri pengolahan Kabupaten Bandung memiliki potensi dan menjadi sektor unggulan Kabupaten. Sektor industri pengolahan memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung ekonomi daerah kabupaten.

1. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri pengolahan cenderung membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, baik dalam level teknis maupun manajerial. Dengan demikian, sektor ini dapat menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Nilai Tambah Tinggi: Industri pengolahan mengubah bahan mentah menjadi

produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, royalti, dan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

3. Stimulus bagi Sektor Lain: Kegiatan industri pengolahan sering kali memicu pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti jasa transportasi, distribusi, penyediaan bahan baku, serta jasa penunjang seperti perbankan, logistik, dan konsultan. Ini menciptakan efek multiplier yang positif bagi perekonomian daerah.
4. Diversifikasi Ekonomi: Pengembangan industri pengolahan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian atau pertambangan. Diversifikasi ini memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim ekonomi global.
5. Penyerapan Hasil Produksi Lokal: Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, industri pengolahan mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan di daerah tersebut. Ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara sektor-sektor ekonomi primer dan industri.

6. Inovasi dan Teknologi: Pengembangan industri pengolahan mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah di pasar global yang semakin terintegrasi.
7. Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas: Industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Keterlibatan lokal dalam industri ini membuka peluang bagi penduduk setempat untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
8. Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung kegiatan industri pengolahan, diperlukan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan kondisi bisnis, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.4.5 Sebaran Industri di Kabupaten Bandung

Jumlah sebaran industri di Kabupaten Bandung yang ter data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung adalah sebanyak 57.116 dan baru terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 988 jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bandung, dimana jenis terdapat beberapa industri besar baik dari industri mikro, IKM dan industri besar, adapun sebaran 5 (lima) besar industri terbesar baik itu industri IKM dan industri besar pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Jumlah Industri IKM terbanyak berdasarkan Jenis Industri

Tahun	Jenis Industri	Jumlah Industri
2021	Perdagangan & reparasi	3.381
	Jasa Lainnya	724
	Industri Makanan	651
	Industri Tekstil	264
	Industri Lainnya	119
2022	Perdagangan & reparasi	13.474
	Industri Makanan	4.884
	Jasa Lainnya	3.213

	Tanaman pangan & perkebunan	814
	Industri Lainnya	763
2023	Perdagangan & reparasi	17.091
	Industri Makanan	14.386
	Jasa Lainnya	3.793
	Industri Tekstil	1.073
	Tanaman pangan & Perkebunan	738

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

Tahun 2024

Adapun untuk industri besar dimana terbanyak untuk jenis industri di Kabupaten Bandung yaitu jenis industri penyempurnaan kain dengan jumlah industri sebanyak 84 industri, adapun data lengkap lebih detail pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Jenis Industri Besar terbanyak di Kabupaten Bandung

Tahun	Jenis Industri	Jumlah Industri
2021	Industri Tekstil	168
	Perdagangan & reparasi	67
	Jasa Lainnya	39
	Konstruksi	36
	Perumahan, Kawasan industri & perkantoran	35
2022	Perdagangan & reparasi	13.474
	Industri Makanan	4.884
	Jasa Lainnya	3.213
	Tanaman pangan & perkebunan	814
	Industri Lainnya	763
2023	Perdagangan & reparasi	17.091
	Industri Makanan	14.386
	Jasa Lainnya	3.793
	Industri Tekstil	1.073
	Tanaman pangan & Perkebunan	738

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

2.1.5 Kondisi Industri Besar

2.1.5.1 Sebaran Industri Besar

Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan.

Adapun sebaran industri besar di Kabupaten dimana terdapat 2.432 yang dimana sebaran terbanyak berada di Kecamatan Bojongsoang dengan jumlah industri sebanyak 307.

Tabel 2.23 Sebaran Industri di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jumlah Industri
Kec. Arjasari	42
Kec. Baleendah	152
Kec. Banjaran	59
Kec. Bojongsoang	307
Kec. Cangkuang	41
Kec. Cicalengka	90
Kec. Cikancung	82
Kec. Cilengkrang	7
Kec. Cileunyi	125
Kec. Cimaung	14
Kec. Cimenyan	43
Kec. Ciparay	30
Kec. Ciwidey	15
Kec. Dayeuhkolot	264
Kec. Ibum	7
Kec. Katapang	169
Kec. Kertasari	6
Kec. Kutawaringin	116
Kec. Majalaya	183
Kec. Margaasih	108
Kec. Margahayu	111
Kec. Nagreg	18
Kec. Pacet	42

Kec. Pameungpeuk	47
Kec. Pangalengan	28
Kec. Paseh	10
Kec. Pasirjambu	20
Kec. Rancabali	8
Kec. Rancaekek	145
Kec. Solokanjeruk	50
Kec. Soreang	93
TOTAL	2.432

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2024

Tabel 2.24 Klasifikasi Industri Besar di Kabupaten Bandung

No	Klasifikasi Industri
1	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
2	Industri Barang Dari Kawat
3	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya
4	Industri Barang Dari Tali
5	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
6	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
7	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl
8	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi
9	Industri Cat Dan Tinta Cetak
10	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
11	Industri Kain Rajutan
12	Industri Kakao
13	Industri Karpet Dan Permadani
14	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
15	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang
16	Industri Kertas Lainnya
17	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali
18	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia
19	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
20	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula
21	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Coklat
22	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
23	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
24	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
25	Industri Mesin Tekstil
26	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik
27	Industri Pakaian Jadi Rajutan
28	Industri Pemintalan Benang
29	Industri Pemintalan Benang Jahit
30	Industri Pencetakan Kain

31	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
32	Industri Penyempurnaan Benang
33	Industri Penyempurnaan Kain
34	Industri Penyempurnaan Tekstil
35	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic
36	Industri Persiapan Serat Tekstil
37	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung
38	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
39	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
40	Industri Produk Roti Dan Kue
41	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
42	Industri Sepatu Olahraga
43	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
44	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda
45	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
46	Industri Tekstil Lainnya Ytdl
47	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
48	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam Khusus Lainnya
49	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton
50	Perdagangan Besar Sayuran
51	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

Adapun nilai investasi/produksi untuk industri besar adalah sebesar Rp.

24.797.652.159.303,70.

Tabel 2.25 Nilai Investasi (Rupiah)

Skala Usaha	Nilai Produksi (Rp)
Industri Besar	407.124.235.939.214,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

2.1.5.2 Penanaman Modal Industri Besar

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

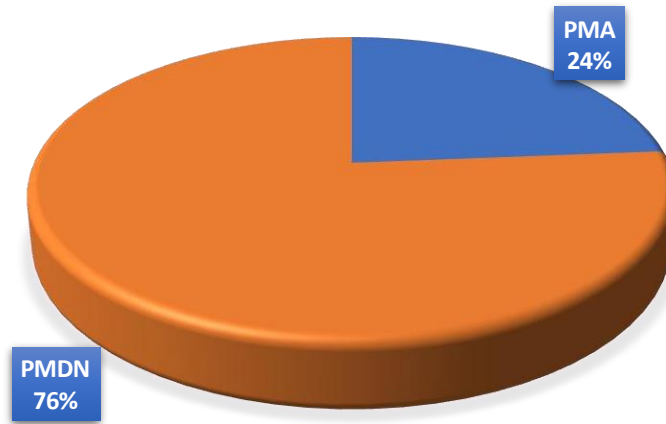
Adapun jenis penanaman modal yaitu adanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal di Kabupaten terdapat penanaman modal memiliki nilai investasi sebesar Rp.37.630.401.262.585,00, dimana di jenis penanaman modal di dominasi oleh penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar Rp. 27.791.099.303.323,00, sedangkan untuk penanaman modal asing sebesar 9.839.301.959.262,00.

Tabel 2.26 Penanaman Modal Industri Besar Kabupaten Bandung

No.	Penanaman Modal	Nilai Modal (Rp)
1	PMA	9.839.301.959.262
2	PMDN	27.791.099.303.323
Total		37.630.401.262.585

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024



Gambar 2.18 Persentase Penanaman Modal Industri Besar

2.2 Sumber Daya Industri

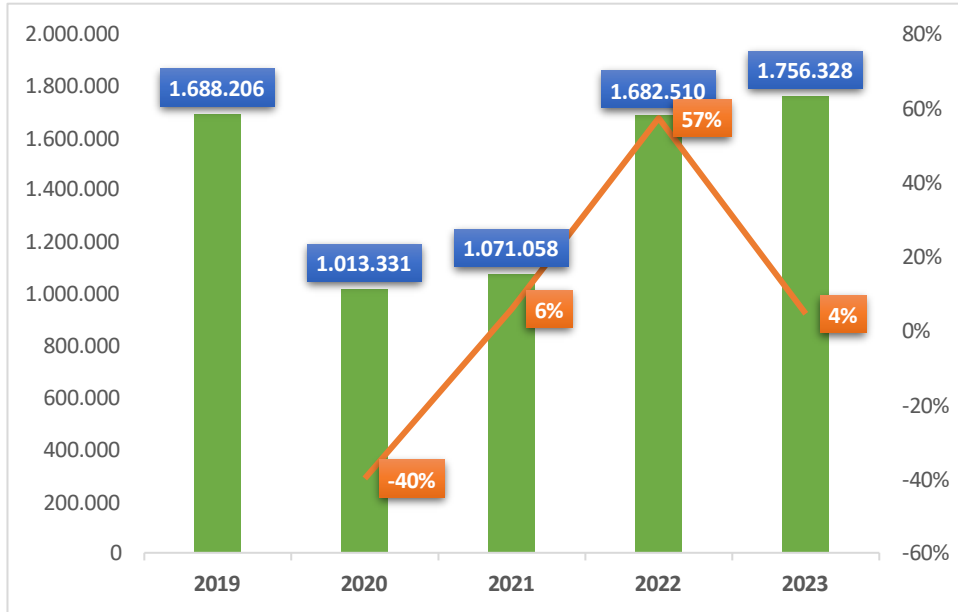
2.2.1 Sumber Daya Manusia Industri

Tenaga kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bandung dimana secara umum mengalami pertumbuhan hanya pada tahun 2019-2020 adanya penurunan karena pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemangkasan tenaga kerja, namun sejak tahun 2020 adanya terus pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.27 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung	Tahun (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tenaga Kerja	1.688.206	1.013.331	1.071.058	1.682.510	1.756.328

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka 2020-2024



Gambar 2.19 Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bandung

Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung dari tahun 2022-2024 terus mengalami tren positif dimana adanya mengalami penurunan, pada tahun 2024 TPT di Kabupaten Bandung sebesar 6,36%.

Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung		
	2022	2023	2024
Kabupaten Bandung	6,98	6,52	6,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Adapun berkaitan dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung, itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama untuk di bidang tenaga kerja industri di Kabupaten Bandung, saat ini jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang industri setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja industri baik itu tenaga lokal ataupun asing sebanyak 150.305 untuk tenaga kerja lokal dan 103 tenaga kerja asing. Untuk data lebih tertuang pada tabel berikut.

Kec. Kertasari	2.862	-	836	-	756	-		
Kec. Kutawaringin	975	-	2.837	-	4.315	-	2073	0
Kec. Majalaya	3.706	-	6.851	4	13.667	3	8109	33
Kec. Margaasih	1.545	1	6.190	8	6.917	15	7052	4
Kec. Margahayu	3.386	6	4.753	1	5.781	-	4041	0
Kec. Nagreg	393	-	2.148	2	3.078	-	1099	0
Kec. Pacet	377	-	1.357	-	2.291	-	2017	0
Kec. Pameungpeuk	1.561	-	2.826	4	2.285	-	1519	7
Kec. Pangalengan	1.470	-	3.889	-	3.201	-	1562	0
Kec. Paseh	427	-	2.519	-	2.494	-	1583	0
Kec. Pasirjambu	407	-	2.126	-	4.000	-	1190	0
Kec. Rancabali	501	-	793	-	1.413	-	403	0
Kec. Rancaekek	2.458	3	6.852	1	5.270	4	4639	5
Kec. Solokanjeruk	837	-	6.928	23	3.913	5	8732	7
Kec. Soreang	1.927	-	5.804	-	6.965	-	2493	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2024

Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Klasifikasi Industri

No.	Klasifikasi Industri	Tenaga Kerja	
		TKI	TKA
1	Industri Besar	42.081	2.188
2	Industri Menengah	3.319	341
3	Industri Kecil	100.787	18.027

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 2024

2.2.2 Sebaran Industri

Sebaran Industri merujuk pada distribusi atau penyebaran lokasi industri di suatu wilayah. Sebaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan akses pasar.

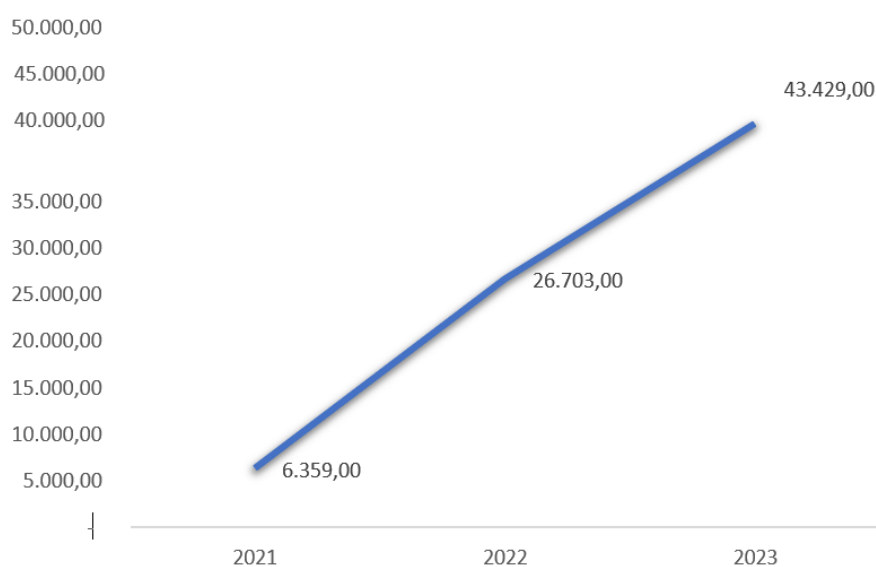
Adapun pertumbuhan industri dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami pertumbuhan, dimana jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 sebanyak 43.429 unit dengan jumlah industri terbesar berada di Kecamatan Cileunyi yaitu 3.011 unit.

Tabel 2.31 Jumlah Industri di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Tahun (Jumlah)		
		2021	2022	2023
1	Kec. Arjasari	156	1.278	1.127
2	Kec. Baleendah	363	1.391	2.839
3	Kec. Banjaran	210	1.065	1.383
4	Kec. Bojongsoang	339	1.225	2.259
5	Kec. Cangkuang	99	971	1.437
6	Kec. Cicalengka	263	573	1.578
7	Kec. Cikancung	86	395	795
8	Kec. Cilengkrang	85	541	568
9	Kec. Cileunyi	387	1.598	3.011
10	Kec. Cimaung	98	484	789
11	Kec. Cimenyan	211	1.247	1.248
12	Kec. Ciparay	718	1.115	2.861
13	Kec. Ciwidey	108	485	1.000
14	Kec. Dayeuhkolot	298	859	1.763
15	Kec. Ibum	55	399	626
16	Kec. Katapang	278	1.354	1.701
17	Kec. Kertasari	21	290	420
18	Kec. Kutawaringin	173	738	1.337
19	Kec. Majalaya	232	689	1.291
20	Kec. Margaasih	395	1.113	1.716
21	Kec. Margahayu	342	1.265	1.494
22	Kec. Nagreg	117	460	1.559

23	Kec. Pacet	55	533	1.086
24	Kec. Pameungpeuk	117	514	856
25	Kec. Pangalengan	242	1.109	1.190
26	Kec. Paseh	78	441	1.141
27	Kec. Pasirjambu	68	498	1.062
28	Kec. Rancabali	54	226	625
29	Kec. Rancaekek	399	1.549	2.012
30	Kec. Solokanjeruk	98	334	704
31	Kec. Soreang	214	1.964	1.951
Jumlah		6.359	26.70	43.429

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024



Gambar 2.20 Pertumbuhan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

2.2.3 Sumber Daya Alam

2.2.3.1 Produktivitas Pertanian dan Hortikultura

Sektor pertanian kabupaten Bandung dihasilkan dari beberapa kecamatan potensi pertanian di Kabupaten Bandung, diantaranya kecamatan Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Paseh dan Cimenyan dan beberapa kecamatan lain yang turut menyumbang produksi walau dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2022 Produksi beberapa tanaman sayuran yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Bandung mengalami peningkatan.

Tabel 2.32 Produksi Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bandung

No	Komoditas	Luas Lahan (ha)		Produksi (kuintal)	
		2021	2022	2021	2022
1	Bawang Merah	5.002	6.603	589.003	768.367
2	Cabai Besar	2.421	1.661	508.092	336.794
3	Cabai Keriting	3.338	2.824	698.200	544.344
4	Cabai Rawit	1.342	1.567	236.799	326.632
5	Kentang	3.390	3.646	706.782	688.652
6	Kubis	2.680	2.115	663.029	414.840
7	Tomat	2.131	1.665	1.009.111	608.297
8	Bawang Putih	27	41	3.163	4.159
9	Buncis	539	537	152.244	123.978
10	Kangkung	417	372	81.518	69.216

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

2.2.3.2 Produktivitas Buah – Buahan dan Sayuran

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.

Produksi buah-buahan yang berada di Kabupaten Bandung beragam dari berbagai jenis produksi meliputi mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, alpukat, jambu biji. Dari semua jenis buah-buahan yang di produksi komoditas pisang dengan jumlah produksi terbesar pada tahun 2022 sebesar

244.464 kuintal. Sedangkan untuk produksi sayuran meliputi melinjo, petai dan jengkol dengan komoditas unggulan yaitu petai.

Tabel 2.33 Produksi Buah – Buah dan Sayuran Kabupaten Bandung

No	Komoditas	Produksi (kuintal)	
		2021	2022
Buah - Buah			
1	Alpukat	131.637	283.135
2	Anggur	5	226
3	Belimbing	2.599	8.393
4	Duku	1.514	1.136
5	Jambu Air	44.114	98.022
6	Jambu Biji	45.044	156.144
7	Jeruk Besar	5.293	555
8	Jeruk Siam	104.239	201.486
9	Mangga	23.817	88.396
10	Manggis	206	1.229
11	Nangka	42.961	81.256
12	Nanas	448	698
13	Pepaya	16.428	34.941
14	Pisang	274.870	244.464
15	Rambutan	9.544	8.159
16	Salak	1.753	689
17	Sawo	11.797	18.339
18	Sirsak	3.959	16.189
19	Sukun	37.073	45.612
20	Buah Naga	2.142	26.427
21	Jeruk Lemon	17.971	48.003
21	Lengkeng		3.082
Sayuran			
1	Melinjo	5.192	16.564
2	Petai	39.037	61.683
3	Jengkol	5.744	12.301

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

2.2.3.3 Produktivitas Perkebunan

Areal perkebunan di Kabupaten Bandung cenderung berada di wilayah pengembangan pegunungan. Perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat, adapun jenis tanaman perkebunan yang terdapat di Kabupaten Bandung terdiri atas kelapa, kopi, kakao dan teh.

Tabel 2.34 Produksi Hasil Perkebunan

No	Komoditas	Luas Lahan (ha)		Produksi (kuintal)	
		2021	2022	2021	2022
1	Kelapa	398	398	107.37	196.35
2	Kopi	13.628	13.853	7.770,36	8.246,31
3	Kakao	17	17	1,25	1,25
4	Teh	1.717	1.171	3.152,71	3.177,30
5	Tembakau			1.486,08	1.696,95

Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

2.2.3.4 Pariwisata

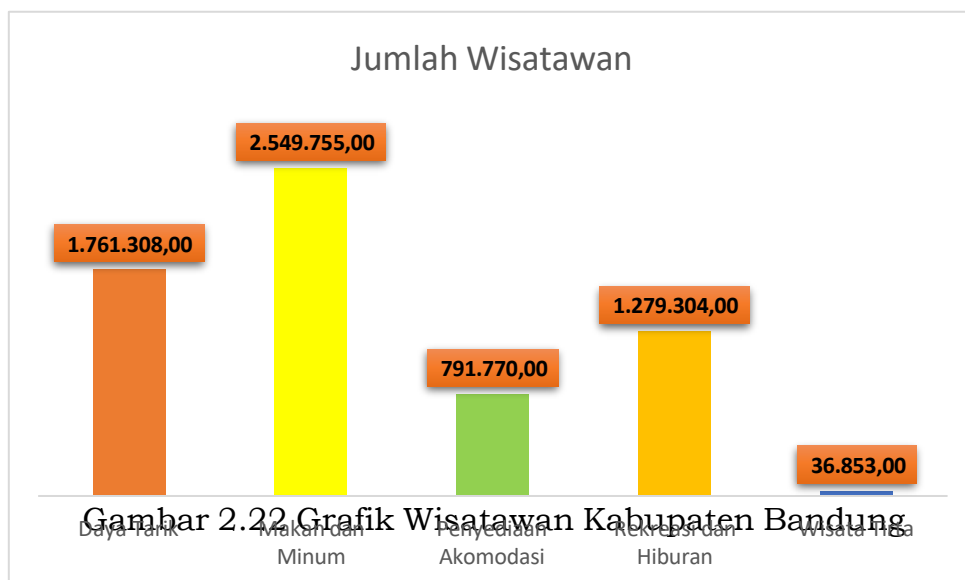
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata. Adapun industri pariwisata di Kabupaten Bandung terdiri atas daya tarik, rekreasi hiburan, makan minum, penyedia akomodasi dan wisata tirta dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara sebesar 7.044.300 wisatawan.



Gambar 2.21 ODTW Kabupaten Bandung Tabel 2.35 Jumlah Wisatawan Kabupaten Bandung

Industri Pariwisata	Jumlah (Jiwa)
Daya Tarik	1.761.308,00
Makan dan Minum	2.549.755,00
Penyediaan Akomodasi	791.770,00
Rekreasi dan Hiburan	1.279.304,00
Wisata Tirta	36.853,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2024



Gambar 2.22 Grafik Wisatawan Kabupaten Bandung

2.2.4 Sumber Daya Energi

2.2.4.1 Panas Bumi

Sistem panas bumi (*geothermal*) adalah salah satu bentuk energi panas alami yang dihasilkan dari dalam bumi dengan fluida yang terkandung di dalamnya. Sumber daya energi panas bumi pada umumnya berkaitan dengan mekanisme pembentukan magma dan kegiatan vulkanisme, mekanisme tersebut diakibatkan karena adanya pergerakan lempeng yang terjadi di batas lempeng. Sebaran produksi panas bumi di Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) meliputi WKP Wayang Windu, WKP Patuha, WKP Kamojang dan WKP Darajat, dari WKP tersebut terdiri dari beberapa zona meliputi.

Tabel 2.36 WKP Wayang Windu

No	Zona	Desa	Kecamatan
1	Zona 1	Margamukti	Pangalengan
2	Zona 2	Margamluya	Pangalengan
		Pangalengan	Pangalengan
		Sukamanah	Pangalengan
		Banjarsari	Pangalengan
		Wanasuka	Pangalengan
		Tarumajaya	Kertasuka
		Cibereum	Kertasuka
		Cikembang	Kertasuka
3	Zona 3	Pulosari	Pangalengan
		Margamekar	Pangalengan
		Margaluyu	Pangalengan
		Warnasari	Pangalengan
		Lamajang	Pangalengan
		Tribaktimulia	Pangalengan
		Sukapura	Kertasari
		Resmitinggal	Kertasari

Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Pemanfaatan dan Pembagian Produksi Panas Bumi

Tabel 2.37 WKP Patuha

No	Zona	Desa	Kecamatan
1	Zona 1	Sugihmukti	Pasirjambu
		Alamendah	Rancabali
		Panundaan	Ciwidey
2	Zona 2	Tenjolaya	Pasirjambu
		Margamulya	Pasirjambu
		Patengan	Rancabali
		Sukaresmi	Rancabali
		Ciwidey	Ciwidey
3	Zona 3	Cukang Genteng	Pasirjambu
		Cibodas	Pasirjambu
		Cisondari	Pasirjambu
		Cikoneng	Pasirjambu
		Pasirjambu	Pasirjambu
		Mekarmaju	Pasirjambu
		Mekarsari	Pasirjambu

Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Produksi Panas Bumi

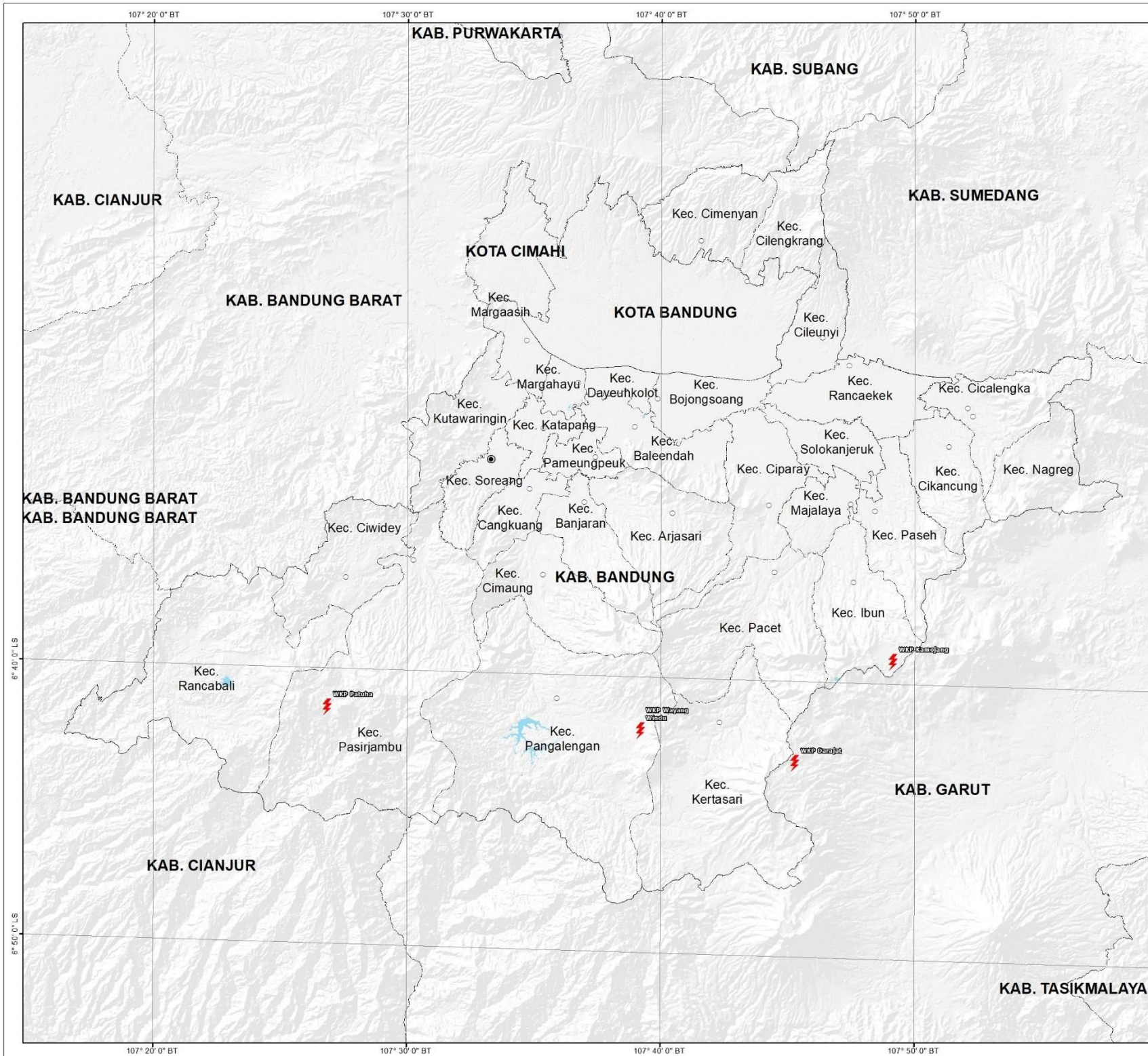
Tabel 2.38 WKP Kamojang


No	Zona	Desa	Kecamatan
1	Zona 1	Laksana	Ibun
		Ibun	Ibun
2	Zona 2	Mekarwangi	Ibun
		Dukuh	Ibun
		Neglasari	Ibun
3	Zona 3	Pangguh	Ibun
		Karyalaksana	Ibun
		Lampegan	Ibun
		Tanggulan	Ibun
		Talun	Ibun
		Sudi	Ibun
		Cibebet	Ibun

Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Produksi Panas Bumi

Tabel 2.39 Darajat

No	Zona	Desa	Kecamatan
1	Zona 1	Cihawuk	Kertasari
2	Zona 2	Cikembang	Kertasari
		Cibereum	Kertasari
		Sukapura	Kertasari
		Tarumajaya	Kertasari
3	Zona 3	Santosa	Kertasari
		Neglawangi	Kertasari
		Resmitinggal	Kertasari



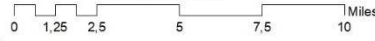



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG**

**KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN**

**PETA SEBARAN PANAS BUMI
KABUPATEN BANDUNG**

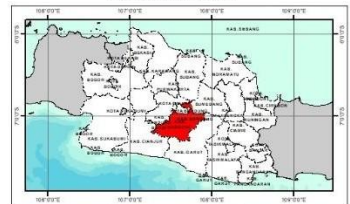
SKALA : 1:130.000





Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang ditunjukkan

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Bupati ○ Kantor Camat 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan <p>Waduk/Situ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Waduk/Situ 	<p>Sebaran Panas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ WKP Darajat ⚡ WKP Kamejang ⚡ WKP Pabuha ⚡ WKP Wayang Windu
--	---	--

SUMBER PETA

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044
2. Pengolahan data tahun 2024

2.2.5 Lembaga Diklat

Lembaga Diklat Industri adalah institusi yang menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja serta pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing dalam sektor industri. Pemerintah Kabupaten saat telah menjalin kerja sama dengan lembaga diklat/ Litbang terkait perindustrian, diantaranya:

1. Sucofindo;
2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
3. Balai Besar Industri Agro;
4. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri;
5. Islamic Fashion Institute (IFI);
6. Masyarakat Kopi Indonesia;
7. Universitas Pasundan;
8. Universitas Padjajaran;
9. Telkom University;
10. Institut Teknologi Bandung;
11. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;
12. Badan Standarisasi Nasional (BSN) Jawa Barat
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Kementerian Hukum Kanwil Jawa Barat, dan;
15. LPK Yani

2.2.6 Pembiayaan Industri

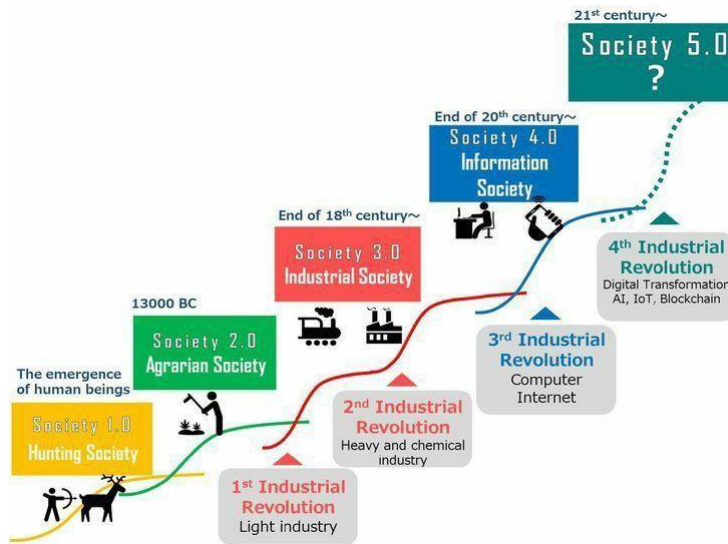
Program terkait pengembangan industri Kabupaten Bandung bersumber dari beberapa pembiayaan industri, dana dari pemerintah masih mendominasi dalam pembiayaan industri, beberapa sumbernya seperti APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Pusat. Dengan beberapa sumber pembiayaan tersebut, sudah cukup dalam menjalankan program-program terkait pengembangan industri di Kabupaten Bandung. Pembiayaan industri tersebut dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk meningkatkan pengembangan

sumber daya manusia terkait kompetensinya untuk mengembangkan IKM.

2.2.7 *Internet Of Things*

Saat ini industri pada era 4.0 dimana pada era tersebut juga mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup masyarakat, yang pada saat ini masyarakat mulai memasuki era *society 5.0* yang mana lebih familiar dan sering memanfaatkan teknologi internet atau sering kali disebut dengan *Internet of Things (IoT)* dalam kesehariannya. Pada masa ini, banyak hal dapat dilakukan melalui kegiatan remote atau jarak jauh dengan dukungan internet. *Internet of Things (IoT)* ialah suatu konsep dimana objek atau perangkat fisik di sekitar kita saling terkoneksi dan dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Gagasan intinya adalah memberikan kemampuan kepada objek-objek ini untuk mengumpulkan dan menukar data. Oleh karena itu, IoT menciptakan suatu ekosistem di mana perangkat elektronik, kendaraan, bangunan, dan objek lain dapat mengumpulkan dan menukar data guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pelayanan. Dimana era 4.0 yang mana melibatkan internet pada berbagai aspek industri dan kehidupan (*internet of things*) tak terkecuali di bidang kesehatan. Dengan adanya internet pengendalian teknologi melalui jarak jauh mungkin untuk dilakukan, sehingga berbagai aktivitas yang dilakukan tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Revolusi industri ini pun kemudian juga mempengaruhi masyarakat yang juga berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan sekarang, sebagai bentuk adaptasi dengan era industri 4.0, masyarakat telah berada dalam *society 5.0*.



Gambar 2.24 *Timeline* perkembangan era society 5.0

Pada era society 1.0, manusia hidup dari berburu dan meramu serta hidup nomaden atau berpindah-pindah. Di era society 2.0 masyarakat mulai menetap dan mulai bercocok tanam. Pada era society 3.0, masyarakat mulai mengenal industri dan pada society 4.0 mulai mengenai informasi. Pada era industri 4.0, masyarakat masuk ke dalam era society 5.0 yang mana merupakan *smart society* yang familiar dengan internet, big data, dan kecerdasan buatan.

Untuk saat ini kondisi industri kecil menengah di Kabupaten Bandung, dimana sebagian besar untuk sistem pemasaran masih bersifat konvensional belum dipasarkan menggunakan sistem digital, hal itu akan berpengaruh pada nilai produksi. Karena saat ini untuk pemasaran masih hanya dipasarkan ke daerah terdekat rumah produksi, jika para pengusaha industri ini bisa memanfaatkan digital apalagi saat ini sudah memasuki era industri 4.0 dimana digitalisasi merupakan hal penting terutama untuk pemasaran produk sehingga dapat dikenal lebih luas dan akan berdampak pada nilai jual, dari para pengusaha adanya keinginan agar adanya pemberdayaan atau pelatihan dari Pemerintah setempat terkait pemasaran produk agar lebih meningkatkan nilai produksinya.

2.2.8 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan arahan bagi manusia agar tumbuh sesuai dengan apa yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menjadi jati diri yang hakiki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan tersedianya sarana dalam hal Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana Pendidikan secara nasional Pasal 42, disebutkan bahwa setiap satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan.

Sarana pendidikan di Kabupaten Bandung dengan pendidikan formal terdiri dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi dengan jumlah 2.391 unit. Adapun jumlah sarana pendidikan terbanyak berada di Kecamatan Ciparay dengan jumlah sarana pendidikan sebanyak 137 unit, sedangkan untuk jumlah sarana pendidikan terendah berada di Kecamatan Cilengkrang sebanyak 29 unit.

Tabel 2.40 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Jumlah Sekolah (Unit)				Jumlah
	SD/MI	SMP/MT S	SMA/MA/SM K	Perguruan Tinggi	
Ciwidey	39	13	6		58
Rancabali	33	8	1		42
Pasirjambu	48	18	3		69
Cimaung	38	17	3		58
Pangalengan	75	17	2		94
Kertasari	46	10	4		60
Pacet	72	38	17	1	128
Ibun	54	21	4	1	80
Paseh	78	25	5		108
Cikancung	46	14	4		64

Cicalengka	52	21	5	2	80
Nagreg	34	11	2	1	48
Rancaekek	79	29	4		112
Majalaya	79	24	6	1	110
Solokan Jeruk	46	12	1		59
Ciparay	84	39	9	5	137
Baleendah	83	32	5	1	121
Arjasari	56	27	10		93
Banjaran	57	22	3	2	84
Cangkuang	31	12	5		48
Pameungpeuk	37	14	3		54
Katapang	45	11	1	2	59
Soreang	48	22	6	1	77
Kutawaringin	51	19	5		75
Margaasih	47	16	4		67
Margahayu	48	14	2	1	65
Dayeuhkolot	49	17	1	1	68
Bojongsoang	40	15	5	1	61
Cileunyi	66	30	7	4	107
Cilengkrang	21	7	1		29
Cimendan	51	20	2	3	76
Total	1.633	595	394	27	2.391

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2024

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1 Sistem Pengolahan Air Limbah

Air limbah adalah salah satu masalah utama dalam berbagai sektor industri maupun domestik, sehingga dibutuhkan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. IPAL sendiri merupakan seperangkat sistem, teknik, dan alat yang dibuat untuk pemrosesan dan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Bandung terdiri atas infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dan air limbah domestik.

Tabel 2.41 Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bandung

No	Pengelolaan Air Limbah	Lokasi
1	Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kecamatan Dayeuhkolot
		Kecamatan Majalaya
		Kecamatan Rancaekek
2	Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPAL Bojongsoang
		IPAL Buninagara
		IPAL Regional Lagadar
		IPAL Soreang
		IPAL Cibeet
		IPAL Soreang

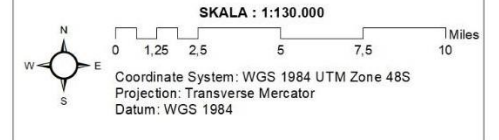
Sumber: Peraturan Daerah No 1 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2024



Gambar 2.25 IPAL Bojongsoang

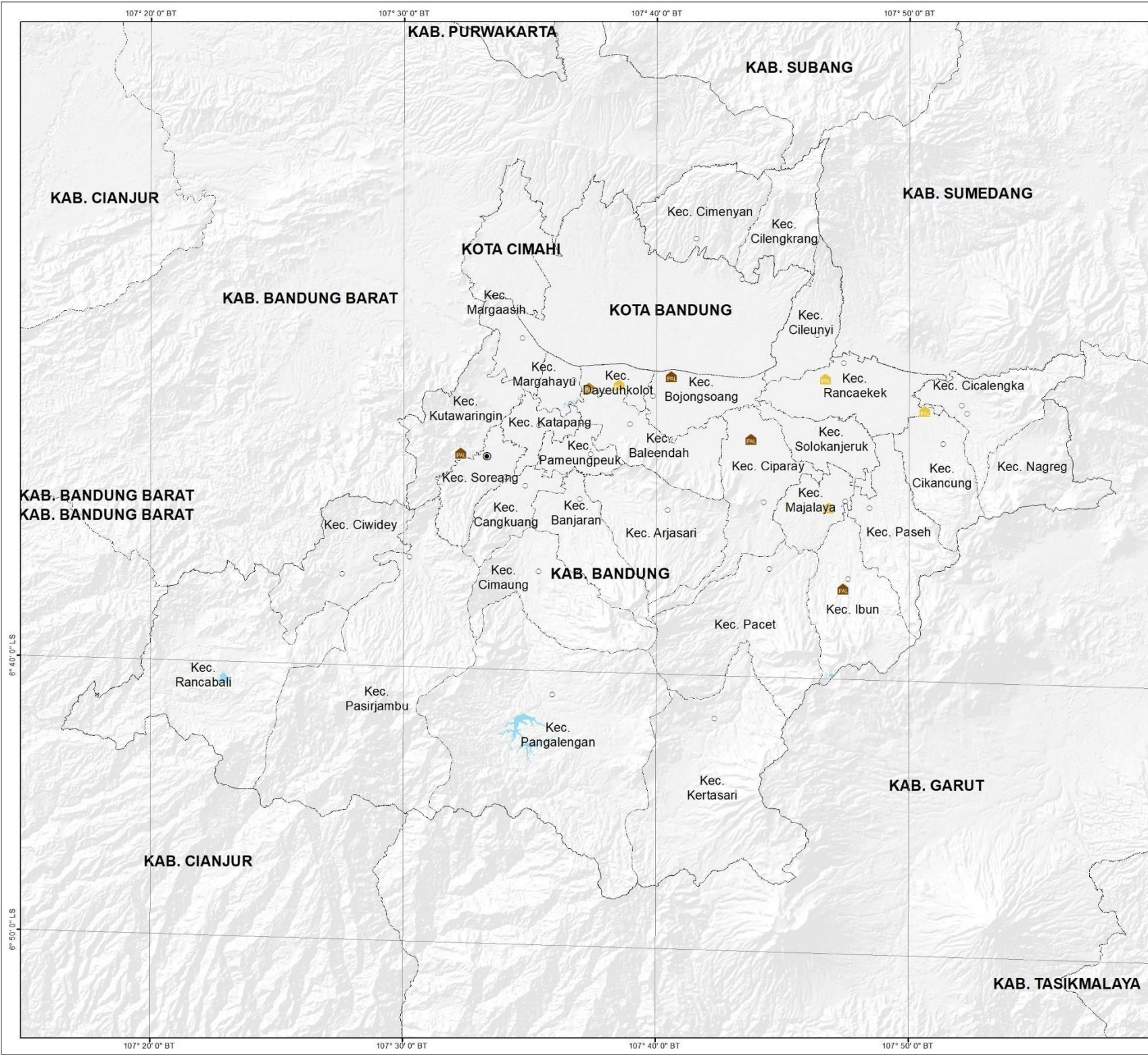
**KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN**

**PETA IPAL
KABUPATEN BANDUNG**



- KETERANGAN :**
-  Ibukota Pemerintahan
 -  Kantor Camat
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 -  IPAL Industri
 -  IPAL Terpadu
 -  Waduk/Situ
 -  PLT

SUMBER PETA
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044
2. Pengolahan data tahun 2024



2.3.2 Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai 'pintu masuk' untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung terdiri atas SPA (Stasiun Peralihan Antara), TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

Tabel 2.42 Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung

No.	Sistem Pengelolaan Sampah	Lokasi
1	SPA Bojongsoang	Kecamatan Bojongsoang
2	SPA Cicalengka	Kecamatan Cicalengka
3	SPA Jelegong	Kecamatan Kutawaringin
4	SPA Kutawaringin	Kecamatan Kutawaringin
5	TPS3R Baleendah	Kecamatan Baleendah
6	TPS3R Banjaran	Kecamatan Banjaran
7	TPS3R Katapang	Kecamatan Katapang
8	TPS3R Kutawaringin	Kecamatan Kutawaringin
9	TPS3R Margaasih	Kecamatan Margaasih
10	TPS3R Margahayu	Kecamatan Margahayu
11	TPS3R Soreang	Kecamatan Soreang
12	TPST Babakan Ciparat	Kecamatan Ciparay
13	TPST Regional Legoknangka	Kecamatan Nagreg

Sumber: Peraturan Daerah No 1 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2024

2.3.3 Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis terkait pemasaran maupun pengembangan usaha, sehingga jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Jaringan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan industri di Kabupaten dimana tersebar di seluruh kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bandung.



**KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN**

PETA PRASARANA TELEKOMUNIKASI

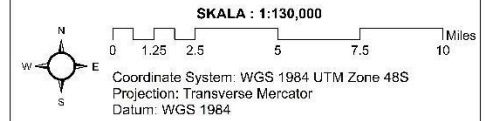
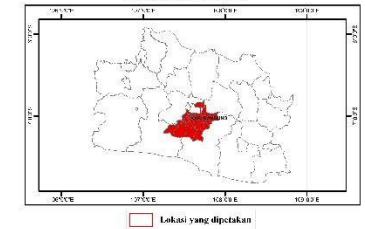


DIAGRAM LOKASI

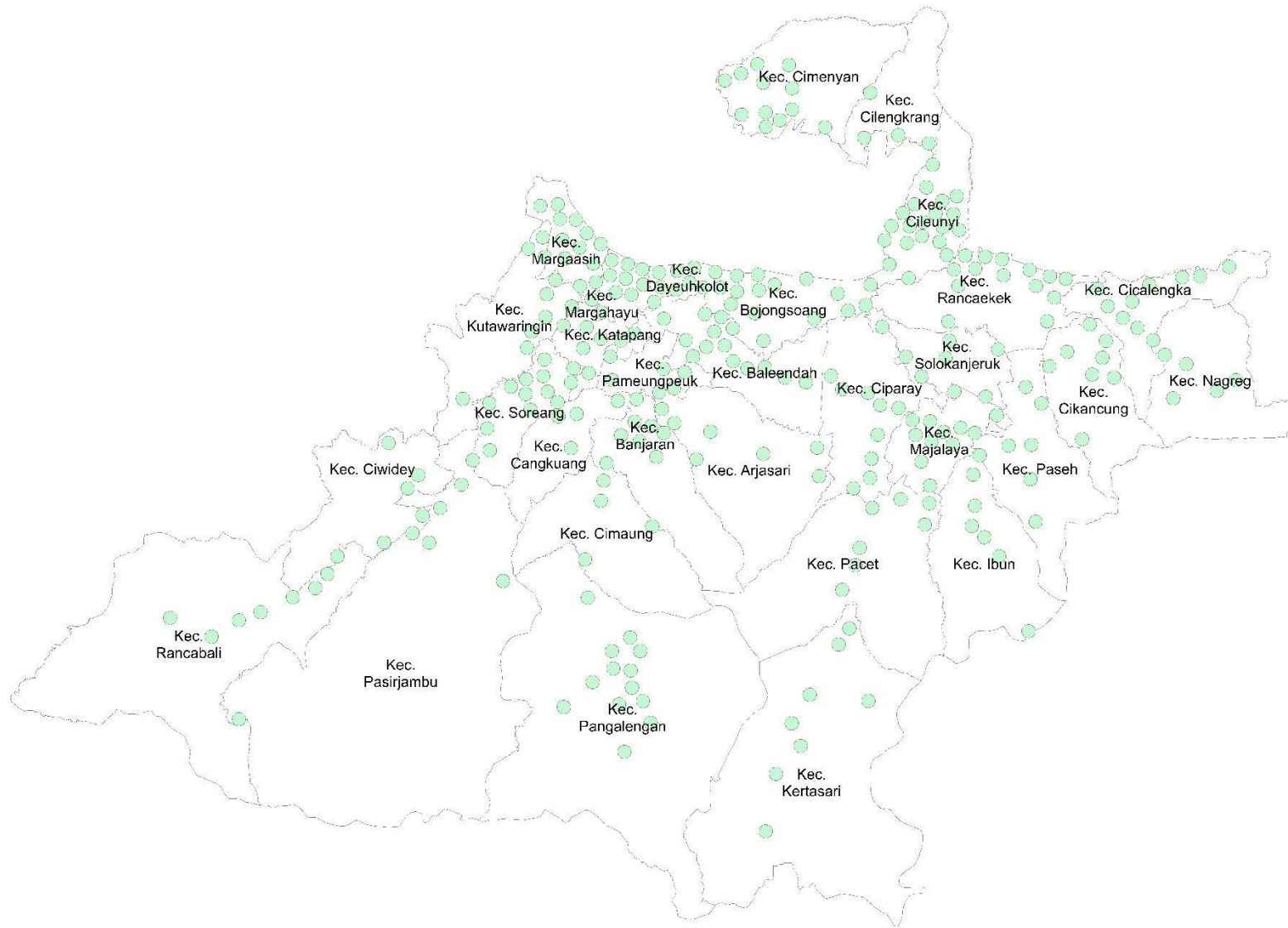
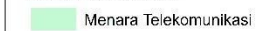


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan



Menara Telekomunikasi



2.3.4 Sebaran Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bandung memiliki luas kurang lebih 4.614,88 hektar.

Tabel 2.43 Kawasan Industri Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bandung

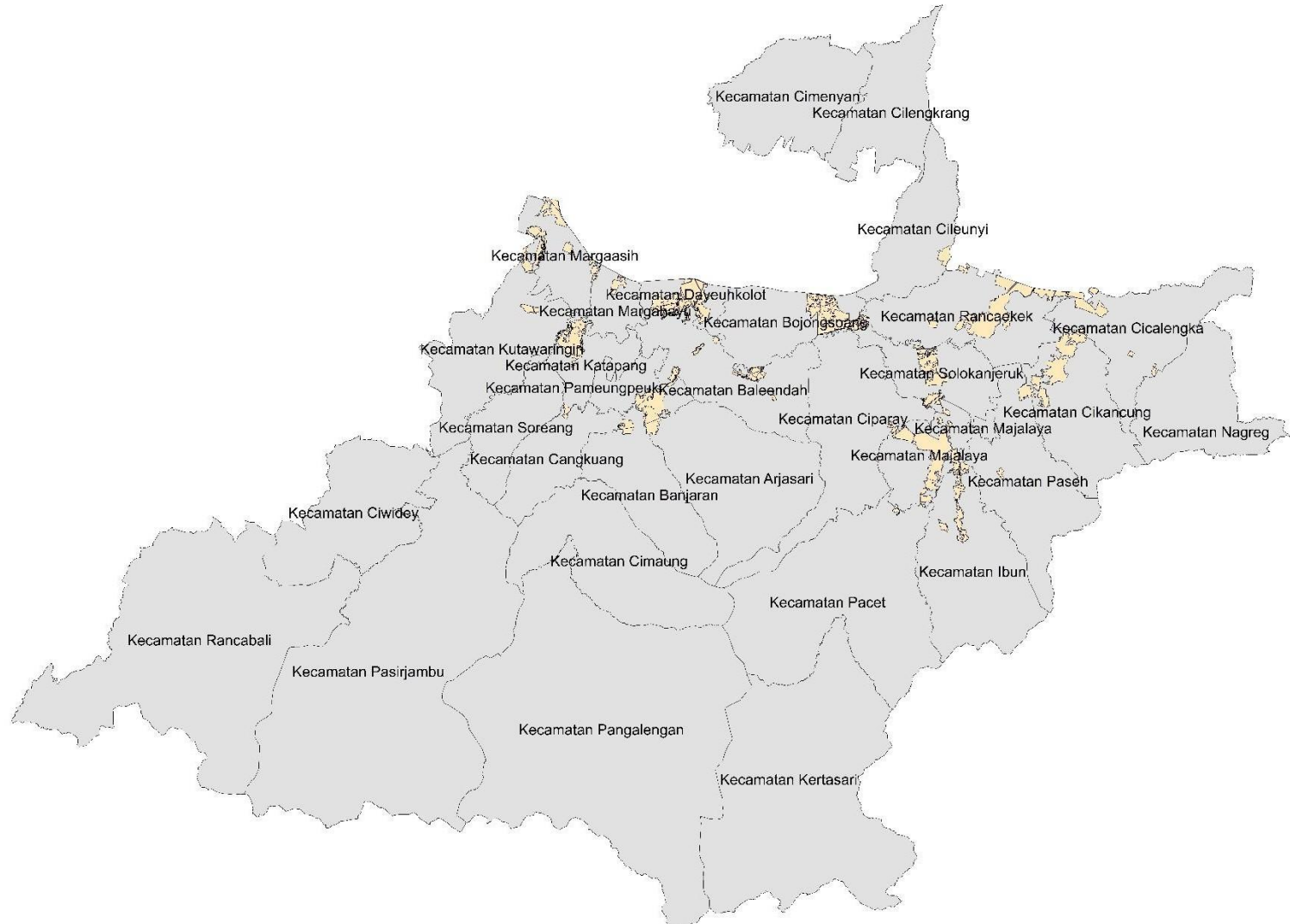
Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Arjasari	112,29
Kecamatan Baleendah	140,15
Kecamatan Banjaran	61,35
Kecamatan Bojongsoang	444,77
Kecamatan Cangkuang	5,81
Kecamatan Cicalengka	153,71
Kecamatan Cikancung	385,17
Kecamatan Cileunyi	57,52
Kecamatan Ciparay	11,09
Kecamatan Dayeuhkolot	468,83
Kecamatan Ibum	172,21
Kecamatan Katapang	277,34
Kecamatan Kutawaringin	135,85
Kecamatan Majalaya	571,93
Kecamatan Margaasih	240,02
Kecamatan Margahayu	50,67
Kecamatan Nagreg	0,00
Kecamatan Pacet	9,19
Kecamatan Pameungpeuk	209,08
Kecamatan Paseh	67,98
Kecamatan Rancaekek	730,96
Kecamatan Solokanjeruk	308,94
Luas Total	4.614,88

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN**

**PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
KABUPATEN BANDUNG**



KETERANGAN :

- Pusat Pemerintahan**
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Desa
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Kawasan Peruntukan Industri**
 - Kawasan Peruntukan Industri

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Peta Citra Satelit Pleiades Tahun 2016-2019 , Yang Telah di Koreksi Geometris BIG Tahun 2021
- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Raster Informasi Geospasial (RIG), Tahun 2021
- Hasil Analisis dan Rencana Tahun 2022
KETERANGAN (DISCLAIMER) :
- Peta Citra yang diperoleh dari LAPAN adalah hasil dari citra best yang ada pada saat penyusunan peta dasar
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

2.3.5 Kawasan Pergudangan

Gudang merupakan perantara antara proses produksi dari pabrik, distribusi hingga konsumsi dalam bidang ekonomi, sehingga pergudangan ini menjadi salah satu unsur yang penting didalam sektor industri. Salah satu fungsi dari Gudang adalah untuk menyimpan persediaan bahan baku atau produksi sebelum menuju proses yang lebih lanjut, istilah ini biasa disebut dengan storage and movement. Alasan diperlukannya gudang pada sektor industri yaitu untuk menyimpan dalam proses menunggu transaksi, sehingga dapat mencapai stabilitas harga. Ketika permintaan terhadap suatu barang berkurang, pelaku industri dapat menyimpan hasil produksi pada sebuah gudang hingga permintaan kembali naik.

Kabupaten Bandung memiliki sejumlah kawasan pergudangan yang strategis dan modern untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis dan industri. Berikut beberapa kawasan pergudangan unggulan di wilayah tersebut:

1. Parahyangan Eco Business Park

Terletak di Jalan Industri Cimareme I, Kecamatan Padalarang, kawasan ini menawarkan tiga tipe gudang: Malabar, Patuha, dan Papandayan, dengan luas bangunan mulai dari 162 m² hingga 540 m².

2. Kutawaringin Industrial Park

Berlokasi di Kutawaringin, kawasan ini menyediakan kompleks pergudangan dan perindustrian

3. Komplek Industri De Prima Terra

4. Pergudangan Margaasih

5. Pergudangan Kopo Katapang

2.3.6 Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan kawasan bangunan, tempat atau kawasan dengan memiliki batasan-batasan tertentu di wilayah Pabean Indonesia yang di dalamnya telah diberlakukan ketentuan khusus terkait bidang Pabean terhadap barang-barang yang dimasukkan dari luar daerah Pabean atau dari dalam daerah Pabean di Indonesia. Adapun terdapat beberapa kawasan berikat yang berada di Kabupaten Bandung yang tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.44 Kawasan Berikat di Kabupaten Bandung

No.	Nama Kawasan Berikat	Alamat	Komoditas
1.	PT Ade Textile Industries (PT Adetex)	Jl. Raya Banjaran KM. 17 Banjaran, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Textil dan Garment
2.	PT Celebit Circuit Technology Indonesia	Jl. Buah Dua RT 01 RW 04. Desa Rancaekek. Kecamatan Rancaekek. Kabupaten Bandung. Jawa Barat	Elektronik
3.	PT Cosmo Manufacturing Indonesia	Jl. Nanjung No. 82, Kel. Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tekstil
4.	PT Derma International	Jl. Panyawungan No. 8 RT. 01 RW.03 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
5.	PT Feng Tay Indonesia Enterprises	Jalan Raya Banjaran KM. 14,6. Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Alas kaki (sepatu)

6.	PT Gelindo Garmentama	Jalan Cangkuang Kulon No.38 Moh.Toha RT.004, RW.012, Kelurahan Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	Garment
7.	PT Gistex	Jl. Nanjung No. 82 RT 005 RW 011, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tekstil
8.	PT Gistex Garmen Indonesia	Jl. Panyawungan Km. 19 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
9.	PT Grace Hill Garments Indonesia	Jl. Pasawahan Nomor 4, RT 05/RW 01, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
10.	PT Greentex Indonesia Utama II	Jalan Raya Banjaran KM 16,5, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
11.	PT Hakatex	Jalan Moh. Toha KM 5,6, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Bodjong Loa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tekstil
12.	PT Indoneptune Net Manufacturing	Jl. Raya Bandung Garut Km. 25, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Jaring /Jala Ikan, Tambang,Benang,& Tali
13.	PT Indoplas	Jalan raya cicalengka - majalaya, hegarmanah, cicalengka, Kabupaten Bandung	Alas kaki (sepatu)

	Footwear Indonesia		
14.	PT Indonesia Rabboni Garment	Jl. Raya Banjaran KM 10.2, Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat	Garment
15.	PT Ing International	Jl. Raya Rancaekek Majalaya Nomor. 389, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
16.	PT Jiale Indonesia Garment	Jl. Leuwidulang-Cimaranggi No. 288 RT. 001 RW. 004, Sukamaju Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
17.	PT Leading Garment Industries	Jl. Mengger Hilir Nomor 97 (Moch. Toha KM 5,6), Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
18.	PT Mahameru Centratama Spinning Mills	Jl. Cisirung KM. 2 Moh. Toha 6,5 Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa barat	Tekstil
19.	PT Metro Garmin	Jalan Moch Toha KM 7.5 (Jalan Raya Dayeuhkolot 243) Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
20.	PT Nirwana Alabare Garment	Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 289, Desa Solokan, Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk,	Garment

		Kabupaten Bandung, Jawa Barat	
21.	PT Pan Asia Jaya Abadi	Jl. Mochamad Toha Km 6,8 (Cisirung), Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tekstil dan Garment
22.	PT Pop Star	Jl. Nanjung Km. 3 Nomor. 99, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
23.	PT Popular Daenong Indonesia	Jalan Nanjung Nomor 82, Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
24.	PT Ricky Garmen Exportindo	Jl. Raya Bandung Garut Km. 28, RT 001 RW 004 Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
25.	PT Saimoda Garmindo	Jl. Raya Banjaran Km. 16 Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
26.	PT Seikou Seat Cover	Jl. Kopo Km. 11,2 No. 90, Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment, Automotive Seat dan Accessories , Bag
27.	PT Shinko Toyobo Garment	Jalan Panyawungan KM 19, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
	PT Trimas Sarana Garment	Jl. Raya Kopo Km. 7 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu,	

28.	Industry	Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
29.	PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing	Jl. Raya Kopo Soreang,Km 11,5, Kelurahan Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Garment
30.	PT Trisenta Interior Manufacturing	Jl. Raya Kopo Km. 7 Nomor. 84 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Tekstil

*Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
A Bandung,2024*

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

2.4.1 Sebaran IKM

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) di Kabupaten Bandung tersebar di berbagai daerah dimana terdapat jumlah IKM sebanyak 5.092 IKM dengan 4.624 industri kecil dan 468 industri menengah dengan sebaran terbesar berada di Kecamatan Cileunyi dengan jumlah 541 IKM.

Tabel 2.45 Sebaran IKM di Kabupaten Bandung Berdasarkan SII nas

Kecamatan	Kecil	Menengah	Total
Arjasari	39	9	48
Baleendah	392	21	413
Banjaran	112	3	115
Bojongsoang	570	52	622
Cangkuang	88	1	89
Cicalengka	61	18	79
Cikancung	61	9	70
Cilengkrang	117	4	121
Cileunyi	464	77	541
Cimaung	75		75
Cimendan	293	15	308
Ciparay	45	40	85
Ciwidey	16		16
Dayeuhkolot	186	16	202
Ibun	20		20
Katapang	300	46	346
Kutawaringin	11		11
Majalaya	153	12	165
Margaasih	135	38	173
Margahayu	316	23	339

Kecamatan	Kecil	Menengah	Total
Nagreg	321	35	356
Pacet	36	4	40
Pameungpeuk	9	2	11
Pangalengan	101	4	105
Paseh	54		54
Pasirjambu	97		97
Rancaekek	54	2	56
Solokanjeruk	30	1	31
Soreang	257	16	273
Total	4.624	468	5.092

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung hasil rekap SIIInas Tahun 2024

Adapun terdapat nilai pendapatan yang dihasilkan oleh IKM dalam satu tahun yaitu Rp. 4.302.018.128.263,00 dan nilai produksi sebesar 346.771.567,10 kg.

Tabel 2.46 Nilai Produksi (Rupiah)

Skala Industri	Nilai Produksi (Rp)
Kecil	2.652.562.095.185,00
Menengah	1.458.387.759.837,00
Total	4.110.949.855.022,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

Tabel 2.47 Nilai Produksi (Kg)

Skala Usaha	Nilai Produksi (Kg)
Kecil	257.800.778,40
Menengah	74.488.502,70
Total	332.289.281,10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

2.4.2 Sentra IKM

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau

mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Sentra IKM yang ada di Kabupaten Bandung tersebar dan ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sentra IKM, dimana sentra IKM ini bertujuan untuk mewadahi sekumpulan unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama dan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.48 Sebaran IKM di Kabupaten Bandung

No	Sentra	Desa	Kecamatan
1	Dandang	Cileunyi Kulon	Cileunyi
2	Kerajinan Tulang	Cileunyi Wetan	Cileunyi
3	Opak Kelontong	Rancaekek	Rancaekek
4	Kerudung	Tenjolaya	Cicalengka
5	Kerudung	Margaasih	Cicalengka
6	Pakaian Jadi	Keramat Mulya	Soreang
7	Aneka Olahan Kue	Soreang	Soreang
8	Jeans	Kutawaringin	Kutawaringin
9	Boneka	Sayati	Margahayu
10	Topi	Rahayu	Margaasih
11	Alas Kaki	Cangkuang Wetan	Dayeuh Kolot
12	Wayang dan Lukisan	Jelekong	Baleendah
13	Peci	Langonsari	Pameungpeuk
14	Sarung	Solokan Jeruk	Solokan Jeruk
15	Rengginang	Cikoneng	Ciparay
16	Berondong	Majalaya	Majalaya
17	Kecimpring	Mandalahaji	Pacet
18	Perkakas Pertanian	Mekarmaju	Pasir

			Jambu
--	--	--	-------

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

2.4.3 Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Sebagai unit penunjang tugas teknis operasional tertentu, UPT berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan pelayanan masyarakat. Adapun sampai ini Pemerintah Kabupaten Bandung belum memiliki Unit Pelayanan Teknis, hal ini berkaitan masih belum adanya program untuk UPT yang dilaksanakan.

Berdasarkan Permen Perindustrian No. 142/M-IND/PER/10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil Dan Menengah, maka dari itu perlu adanya pembentukan Unit Pelayanan Teknis di Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan Unit Pelayanan Teknis IKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan IKM secara sehat dan mandiri. Dimana peran UPT IKM adalah:

1. Sebagai agen pembangunan, sarana pembinaan dan pelatihan, pelayanan masyarakat IKM dalam mendukung produktifitas kerja IKM, serta menggali sumber dana pembiayaan operasional; dan
2. sebagai fasilitator, inovator, dinamisator dan motivator pengembangan potensi produksi serta pemecahan masalah kewirausahaan bagi kelompok usaha dan/atau perusahaan IKM.

Berdasarkan jenis IKM yang berada di Kabupaten Bandung kemudian dikaitkan dengan Permen Perindustrian No. 142/M-IND/PER/10/2009, maka perlu adanya UPT yaitu industri kimia, industri logam dan industri kerajinan.

Adapun Jenis layanan UPT IKM ini meliputi pengembangan kompetensi SDM; dukungan produksi; dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya; jasa konsultasi pengembangan usaha; dan jasa penelitian dan pengembangan. Adapun penyelenggaraan Jenis layanan UPT IKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49 Penyelenggaraan Jenis Layanan UPT IKM

No	Jenis layanan UPT IKM	Penyelenggaraan
1	Pengembangan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan industri dan kewirausahaan, baik secara klasikal, praktek, magang maupun workshop; b. percontohan mesin/peralatan dan teknologi produksi; dan c. pengorganisasian pengembangan wawasan
2	Dukungan produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. bantuan dan layanan produksi; b. jasa pemeliharaan dan reparasi kerusakan alat produksi; c. bimbingan teknis bidang permesinan/alat produksi; dan d. bimbingan teknis bidang proses produksi
3	Dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan show room / fasilitasi pameran produk; b. penerbitan brosur, leaflet dan sejenisnya c. publikasi film dan media masa; d. fasilitasi temu bisnis; dan e. mediasi dengan sumber daya produktif lainnya.
4	Jasa konsultasi pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. jasa pendampingan usaha/manajemen; b. jasa konsultasi (diagnosa makro maupun mikro); c. jasa kajian proyek investasi (studi kelayakan); d. bimbingan teknis dan manajemen; dan e. fasilitasi layanan hak kekayaan intelektual (HKI).
5	Jasa penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi (produk, desain, teknis produksi); b. inkubator usaha untuk pengujian hasil litbang pada skala UPT IKM; dan c. pemberian layanan pengujian (laboratorium uji sederhana) f. bagi produk IKM.

2.4.4 Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Pelaku industri, terlebih Industri Kecil Menengah sebagian besar sulit untuk berkembang karena berbagai faktor, seperti kurangnya membimbing dalam proses produksi, membantu dalam proses pemasaran, izin dalam menjalankan kegiatan industri dan lainnya. TPL dapat berfungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha khususnya Industri Kecil Menengah. Kabupaten Bandung sendiri pada tahun 2024 saat ini memiliki 22 TPL untuk membimbing industri kecil menengah.

2.4.5 Pusat-Pusat Promosi IKM

Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini memiliki 1 (satu) pusat promosi IKM yaitu Galeri Kriya Bedas yang dijadikan pusat promosi dan pemasaran produk- produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bandung. Galeri Kriya Bedas berfungsi sebagai tempat pameran, penjualan, dan promosi produk-produk unggulan IKM Kabupaten Bandung. Selain itu, Galeri Kriya Bedas juga menyediakan fasilitas pelatihan kemasan atau klinik kemasan bagi para pelaku IKM, dengan tujuan membantu produk mereka menembus pasar nasional dan internasional.

Selain sebagai pusat promosi, galeri ini menjadi tempat berkumpulnya para pelaku industri kreatif untuk berbagi ide dan pengalaman, serta mengadakan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produk IKM. Pemerintah Kabupaten Bandung berharap Galeri Kriya Bedas dapat menjadi destinasi belanja oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut.

2.4.6 Penanaman Modal IKM

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Adapun jenis penanaman modal yaitu adanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah

kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal di Kabupaten Bandung untuk industri kecil dan menengah belum adanya investasi asing sehingga semua penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi total adalah Rp. 5.410.033.215.238,00.

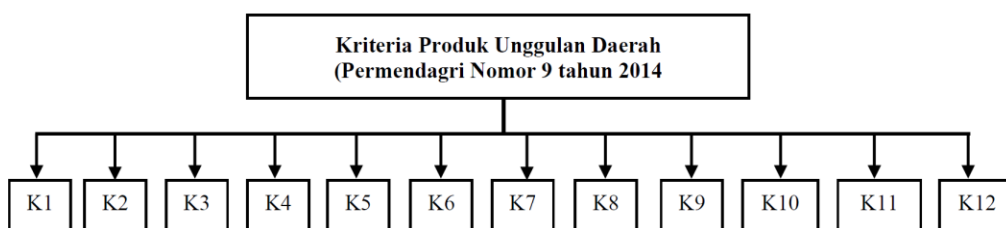
Tabel 2.50 Penanaman Modal IKM Kabupaten Bandung

No.	Penanaman Modal	Nilai Investasi (Rp)
		IKM
1	PMDN	5.410.033.215.238,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2024

2.4.7 Sektor Unggulan Sentra IKM

Dari sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bandung terdapat industri Kecil Menengah (IKM) yang kemudian dilakukan skoring untuk menentukan produk unggulan IKM sektor industri pengolahan dengan menggunakan bobot kriteria produk unggulan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah yaitu (1) penyerapan tenaga kerja, (2) sumbangan terhadap perekonomian, (3) sektor basis ekonomi daerah, (4) dapat diperbaharui, (5) sosial budaya, (6) ketersediaan pasar, (7) bahan baku, (8) modal, (9) sarana dan prasarana produksi, (10) teknologi, (11) manajemen usaha dan (12) harga.



Gambar 2.29 Kriteria Produk Unggulan

Tabel 2.51 Analisis Skoring Produk Unggulan

No	Indikator	Item	Dandang	Kerajinan Tulang	Opak Kolontong	Kerudung	Kerudung	Pakaian Jadi	Aneka Olahan Kue	Jean s	Boneka	Topi	Alas Kakisi	Wayang dan Lukisan	Peci	Sarung	Rangina ng	Berondong	Kecimpri ng	Perkakas Pertanian	Jumlah	
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
		Menggunakan Tenaga Kerja Terampil	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	11
2	Sumbangan Ekonomi	Banyak Sentra Industri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
		Jumlah Pengrajin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
		Kontribusi Ekonomi Lokal	1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	24
3	Sektor Basis	Bahan Baku Lokal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17
		Ketersediaan SDM/Skill Lokal	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	11
		Andalan Penghasilan Masyarakat	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	15
		Inovasi Produk	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	11
4	Keramahan Lingkungan	Dapat Diperbarui	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	13
		Kelestarian Lingkungan	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	7
5	Unsur Sosial Budaya	Memiliki Nilai Sejarah dan Budaya	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	Penguasaan Pasar	Lokal/Regional/Nasional/Global	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Ragam Pembeli	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	12
		Karakteristik dan Potensi Pasar	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	12
		Potensi Pengembangan	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	12
7	Ketersediaan Bahan Baku	Jaminan Ketersediaan Bahan Baku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	15	

		Stabilitas Harga Bahan Baku	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
8	Dukungan Modal	Kelancaran Dana Investasi & Modal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
		Modal Sendiri atau Pinjaman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
9	Sarana dan Prasarana Produksi	Mudah Memperoleh Sarana Produksi	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	15
		Produksi Terpisah dari Rumah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Teknologi	Akses Teknologi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
		Otomasi Teknologi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10
		Pengembangan TTG	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10
		Legalitas Usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
		Sistem Penggajian	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	24
		Memiliki Rencana Produksi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10
12	Harga dan Keuntungan	Proyeksi Keuntungan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10
		Keterjangkauan Harga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Skor Total			14	20	18	26	26	26	26	30	27	24	25	23	22	23	20	18	21	16	

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 2.52 Hasil Skoring Produk Unggulan

Sentra IKM	Nilai	Orde	Kelas IKM
Dandang	14	III	Berkembang
Kerajinan Tulang	20	II	Potensial
Opak Kolontong	18	III	Berkembang
Kerudung	26	I	Unggulan
Kerudung	26	I	Unggulan
Pakaian Jadi	26	I	Unggulan
Aneka Olahan Kue	26	I	Unggulan
Jeans	30	I	Unggulan
Boneka	27	I	Unggulan
Topi	24	II	Potensial
Alas Kaki	25	II	Potensial
Wayang dan Lukisan	23	II	Potensial
Peci	22	II	Potensial
Sarung	23	II	Potensial
Ranginang	20	II	Potensial
Berondong	18	III	Berkembang
Kecimpring	21	II	Potensial
Perkakas Pertanian	16	III	Berkembang

Sumber: Hasil Analisis 2024

Berdasarkan hasil penilaian masing-masing indikator kriteria produk unggulan diperoleh bahwa indikator yang berpengaruh terhadap penentuan produk unggulan daerah adalah sumbangan terhadap perekonomian, hal ini menunjukkan bahwa produk unggulan sentra IKM di Kabupaten Bandung dapat menopang sumbangan terhadap perekonomian lokal.

Setelah dilakukan skoring dan pemeringkatan dari masing-masing sentra IKM yang menghasilkan produk-produk unggulan di Kabupaten Bandung terdapat Sentra IKM yang bersifat potensial dimana seperti sentra alas kaki, topi, wayang dan lukisan, peci, sarung, raginang serta kecimpring.

2.4.8 Sektor Unggulan Industri IKM

Sektor unggulan adalah sektor tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. yang keberadaannya telah berperan besar Pertimbangan utama indikator potensi kepada perkembangan perekonomian sebagai parameter pemetaan urusan yang

suatu wilayah, setelah dilakukan identifikasi terdapat beberapa IKM Unggulan dari setiap masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bandung yang berpotensi menjadi industri unggulan baik dilihat dari nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dimana untuk industri IKM dapat menampung tenaga kerja dari 20 - 99 tenaga kerja.

Tabel 2.53 Industri Unggulan IKM di Setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung (dari Nilai Investasi)

Kecamatan	Industri Unggulan
Arjasari	Industri Pengolahan Kopi
	Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran
Baleendah	Industri Kue Basah
	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang- kacang Lainnya Selain Tahu dan Tempe
Banjaran	Industri Tahu Kedelai
Bojongsoang	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Cangkuang	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
Cicalengka	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
Cikancung	Pengolahan Kopi dan Teh
Cilengkrang	Pengolahan Kopi
Cileunyi	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Dayeuhkolot	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
Ibun	Industri Pengolahan Kopi
Katapang	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Kutawaringin	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Majalaya	Industri Kue Basah
Margaasih	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran

Margahayu	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran
Nagreg	Industri Produk Makanan Lainnya
Pameungpeuk	Industri Barang dari Karet
Paseh	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Rancaekek	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Solokanjeruk	Industri Pengolahan Garam

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 2.54 Industri Unggulan IKM berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja

No	Klasifikasi Industri	Jumlah TKI (Jiwa)
1	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	211
2	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	140
3	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	132
4	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	112
5	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	103
6	Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)	100
7	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	64
8	Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb infusion)	63
9	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya	60
10	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	58
11	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	58

12	Industri Makanan Dari Kedelai Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	56
13	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	54
14	Industri Barang Dari Karet Lainnya	50

Sumber: Hasil Analisis 2024

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG

3.1 Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bandung

Visi misi pembangunan Industri Kabupaten Bandung tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dengan visi yaitu “Visi Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Adapun penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

- **Maju:** Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta bertumpu pada potensi wilayah dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung seaproduktif wilayah yang mampu menempatkan dirinya sejajar dan sederajat dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan potensi sumber manusia yang dimiliki dan kemampuan daya saing sebagai kunci untuk mencapai kemajuan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, merasakan manfaat kebijakan publik, dan memiliki akses yang sama terhadap layanan sumber daya yang tersedia.
- **Agamis:** Kabupaten Bandung yang beriman dan bertakwa, serta menekankan pada nilai dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan lingkungan yang mempromosikan spiritualitas, moralitas dan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam interaksi sosial dimasyarakat. Dalam mewujudkan Visi Agamis, Kabupaten Bandung mendorong kehidupan beragama masyarakatnya, menyelenggarakan

kegiatan keagamaan dan mendukung pengembangan lembaga-lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakatnya. Memperkuat agama dan moral dalam sistem pendidikan, mengadopsi kebijakan yang mempromosikan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama, serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

- **Sejahtera:** Kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang dapat mensejahterakan masyarakat secara holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh masyarakatnya, serta mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati taraf hidup yang layak, merasa aman dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengembangkan potensi di masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Bandung juga perlu memahami adanya sisi ketergantungan dengan wilayah lain yang direspon dengan hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Dalam mewujudkan visi sejahtera, Kabupaten Bandung bertekad untuk memperkuat basis ekonominya dengan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong kewirausahaan, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan kekayaan masyarakat.
- **Berkelanjutan:** Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Bandung bertekad untuk membangun infrastruktur dan melakukan aktivitas pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi,

keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dalam mewujudkan visi keberlanjutan Kabupaten Bandung berkomitmen menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan pelestarian ekosistem alam. Pembangunan di Kabupaten Bandung tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Ketercapaian Visi Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi, yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Per kapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Peningkatan Kerja sama antar Daerah;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission.

Berdasarkan Visi Kabupaten Bandung yang tertuang didalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, visi yang terkait dengan pembangunan industri yaitu visi maju, sejahtera dan berkelanjutan.

- Visi maju didukung oleh sumber daya industri yang berkualitas dan mampu berdaya saing, serta bertumpu pada potensi wilayah yang ada melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan industri berbasis kearifan lokal.
- Visi sejahtera mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh masyarakatnya, serta mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati taraf hidup yang layak, merasa aman dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengembangkan potensi di masyarakat. Aspek kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesejahteraan sosial, seperti perlindungan sosial bagi pekerja, akses pada layanan dasar, dan pengurangan kemiskinan.

Aspek kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah dengan cara diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan berbagai sektor industri yang saling mendukung, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur ekonomi yang mendukung industri.

Aspek kesejahteraan budaya agar memperkuat identitas dan kearifan lokal melalui industri kreatif dan budaya lokal.

- Visi berkelanjutan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan pelestarian ekosistem alam.

Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas

Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing memiliki makna penting dalam beberapa peranan pembangunan. Frasa ini mengandung beberapa makna penting:

Unggul : sumber daya yang “Unggul” merujuk pada individu yang memiliki keterampilan yang sangat baik dan tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidangnya, memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan, mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, sehingga tetap relevan dan efektif.

Berakhlak: sumber daya yang “Berakhlak” merujuk pada individu yang memiliki integritas, bersikap jujur, adil, dan menghormati hak dan martabat orang lain, serta tidak hanya memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi, tetapi juga mendasarkan tindakan dan perilakunya pada nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Bekualitas: Sumber daya yang “Berkualitas “merujuk pada individu yang inovatif dan kreatif, memiliki fokus pada pencapaian hasil dan mencapai tujuan, memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri. Selain itu dalam perwujudan misi ini adanya peran masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera ekonomi, sosial dan psikologis masyarakatnya dengan memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau latar belakang lainnya

Misi 2: Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal

Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing merupakan upaya untuk membangun ekonomi yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal secara optimal, dan

bersaing secara sehat di pasar Nasional dan Global. Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam proses pembangunan ekonomi, serta transformasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang memiliki daya saing tinggi di berbagai tingkatan dengan memanfaatkan potensi keunggulan dan komparatif yang dimiliki daerah, seperti sumber daya alam, budaya lokal dan keunggulan kompetitif lainnya.

Misi 3 : Transformasi tata Kelola

Transformasi Tata Kelola pemerintahan yang transformatif bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mampu untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan cara yang membawa perubahan positif dan transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan teknologi, inovatif, Inklusifitas dan responsif. Teknologi bermakna memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses administratif, memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, juga penting untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat. Responsif bermakna pemerintah yang mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan, aspirasi, serta perubahan dalam masyarakat Inovatif bermakna pemerintah yang mampu menerapkan gagasan-gagasan baru, teknologi, dan pendekatan yang kreatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inklusifitas bermakna Pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, dapat merasakan manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah.

Misi 4 : Mewujudkan kabupaten yang bersih, transparan dan akuntabel

Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bersih, Transparan dan Akuntabel merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam membuka layanan informasi secara terbuka kepada publik baik dari kebijakan, maupun tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dipercaya oleh masyarakat dengan kemampuan pengambilan kebijakan yang cerdas dan responsif.

Misi 5: Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter merupakan upaya untuk membentuk masyarakat tidak hanya memiliki kesejahteraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat dan mencerminkan karakteristik masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Upaya Kabupaten dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu yang berintegritas, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama, serta memperkuat kekayaan budaya sebagai aset penting dalam pembangunan lokal. Selain itu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai budaya dan karakteristik positif, serta melibatkan pembentukan komunitas yang berbasis pada nilai-nilai tersebut melalui pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat keterampilan sosial dan kepemimpinan dalam masyarakat.

Misi 6 : Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata

Mewujudkan pengembangan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata merupakan upaya Kabupaten Bandung dalam memastikan masyarakat memiliki akses yang setara ke layanan publik meliputi pendidikan, kesehatan dan transportasi. Termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai di pedesaan dan perkotaan melalui peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas publik bagi semua masyarakat. Selain itu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar kecamatan di Kabupaten Bandung dengan memprioritaskan pembangunan di wilayah- wilayah yang masih tertinggal, serta mengalokasikan sumber daya yang merata untuk mendukung pembangunan.

Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif

Meningkatkan infrastruktur yang inklusif sebagai upaya Kabupaten Bandung dapat memastikan bahwa Infrastruktur Dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk daerah yang terpencil dan terpinggirkan. Hal ini mencakup pembangunan jembatan, jalan dan transportasi umum yang mudah diakses, serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang merata, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Misi 8 : Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan

Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan

upaya Kabupaten Bandung untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam yang ada, termasuk hutan, air, tanah dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan regulasi yang ketat terhadap eksploitasi yang tidak berkelanjutan, promosi praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, serta program-program restorasi lingkungan. Selain itu perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan berbasis tata ruang yang efisien dan cermat. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, permukiman dan perindustrian yang berfokus pada pembangunan yang rendah karbon dan berwawasan lingkungan

3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Industri Kabupaten Bandung

Strategi dan arah kebijakan di bidang industri yang tercantum dalam misi 1 RPJPD Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Pembangunan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap III (2035-2039) Pemantapan Pembangunan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Bandung
Visi 3: Kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan				
Misi 2: Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal				
1	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan	Perwujudan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
2	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan	Pengembangan kluster pertanian dan perikanan	Pengembangan kluster pertanian dan perikanan berketahanan iklim	Perwujudan kluster pertanian dan perikanan berkelanjutan dan terintegrasi

3	Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan korporasi petani berbasis potensi lokal	Pengembangan korporasi petani
4	Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Pengembangan Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Pengembangan Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Perwujudan industri pertanian atau perikanan berkelanjutan

No	Arah Kebijakan			
	Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Pembangunan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Pembangunan	Tahap III (2035-2039) Pemantapan Pembangunan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Bandung
5	Penataan Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Terintegrasinya Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Terimplementasinya Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Perwujudan pariwisata yang kelas dunia (bertaraf Internasional)
6	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Perwujudan Pusat riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung
7	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif,	Peningkatan skema kerja sama regional pada UMKM	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan maju

	akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	penerapan teknologi dan kemitraan usaha melalui modernisasi koperasi		
8	Penataan dan restrukturisasi BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD	Pengembangan bisnis BUMD	Perluasan bisnis BUMD
9	Hilirisasi Produk Pertanian	Peningkatan hilirisasi produk strategis pertanian	Peningkatan daya saing pertanian	Pemantapan daya saing pertanian
10	Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal	Peningkatan sistem industri yang berdaya saing	Penguatan kualitas sektor industri yang berkelanjutan	Pengembangan daya saing industri
11	Pengembangan Sistem logistik produk strategis	Peningkatan Sistem logistik produk strategis	Penguatan Sistem logistik produk strategis berorientasi pasar global	Perwujudan sistem logistik produk strategi berorientasi pasar global
12	Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau	Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau	Pengembangan Industri Kecil, menengah berbasis Industri Hijau	Perwujudan Industri Kecil, Menengah Berbasis Industri Hijau yang Berkelanjutan
13	Pemenuhan aksesibilitas,	Pengembangan kawasan strategis pariwisata	Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan

	amenitas dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam		berkelanjutan	
14	Pengembangan sentra industri strategis	Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi	Pengembangan industry berbasis inovasi, riset dan teknologi	Perwujudan sentra strategis industri
15	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital	Pengembangan inovasi dan kewirausahaan	Pengembangan ekonomi inklusif dan pengintegrasian rantai pasok pemasaran produk usaha
16	Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif	Optimalisasi penerapan riset dan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Penguatan ekosistem riset dan inovasi Untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Pemantapan riset dan inovasi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing

17	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal	akselerasi investasi berbasis ekonomi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan)	Pemantapan integrasi ekonomi daerah dan konektivitas terhadap ekonomi nasional dan global	Kabupaten Bandung sebagai wilayah investasi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan)
----	---	--	---	--

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi “Peningkatan produktivitas ekonomi daerah” Untuk membangun perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing, beberapa sektor yang menjadi prioritas pengembangan antar lain meliputi sektor perdagangan dan jasa, sektor industri, sektor agrobisnis, sektor pariwisata, serta sektor investasi.

Melalui transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal dengan mendorong pengembangan industri lokal, proses bisnis UMKM dan implementasi riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal. Transisi Industri kecil, menengah. Berbasis industri hijau. Pengembangan sentra industri strategis. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Penataan dan restrukturisasi BUMD. Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal.

Penerapan Ekonomi Hijau berupaya mengurangi risiko lingkungan hidup dan bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dengan melibatkan kebijakan dan praktik yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta perlindungan dan restorasi ekosistem. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui arah kebijakan Transisi Industri kecil, menengah berbasis Industri Hijau dan Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan circular ekonomi.

Arah kebijakan di sektor perdagangan yaitu integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global mewujudkan keterkaitan industri kecil dan menengah dengan menyelaraskan tahapan produksi dan distribusi secara efektif dan respons pasar yang lebih cepat yang didukung dengan berfungsinya infrastruktur dan logistik yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian. Pengembangan Sistem logistik produk strategis. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan. Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat.

Pengembangan kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan melalui perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan. Akses terhadap layanan sosial ekonomi dan pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan perikanan. Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan. Hilirisasi produk pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan. Penataan sumber daya pariwisata berbasis budaya dan alam. Pemenuhan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam. Pengembangan sentra industri strategis. Mengintegrasikan perencanaan tata guna lahan dengan infrastruktur sarana-prasarana dan layanan transportasi, melalui pengembangan kawasan transit/ TOD (Transit Oriented Development). Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan kawasan transit/ TOD (Transit Oriented Development). Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten. Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal. Pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi

Arah kebijakan untuk di sektor perindustrian secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas ekonomi daerah

- Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal;
- Transisi industri kecil, menengah berbasis industri hijau;
- Pengembangan sentra industri strategis;
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
- Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif;

- Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung;
 - Penataan dan restrukturisasi BUMD; dan
 - Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal
2. Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
- Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian;
 - Pengembangan Sistem logistik produk strategis;
 - Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan; dan
 - Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat
3. Pengembangan Klaster Perekonomian di setiap wilayah pengembangan
- Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan;
 - Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan;
 - Hilirisasi Produk Pertanian;
 - Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan;
 - Penataan sumber daya pariwisata berbasis budaya dan Alam;
 - Pemenuhan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam;
 - Pengembangan sentra industri strategis
4. Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
- Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian;
 - Pengembangan Sistem logistik produk strategis
 - Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan; dan
 - Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat.

3.1.2 Visi Misi Pembangunan Industri Kabupaten Bandung

Dalam merumuskan dan menentukan Visi dan Misi pembangunan

industri Kabupaten Bandung kedepan, perlu mempertimbangkan kebijakan dari tingkat pusat dan daerah. Adapaun kebijakan pembangunan dari tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan dari kebijakan mulai dari tingkat pusat dan daerah, maka dapat dirumuskan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Industri Kabupaten Bandung yang Unggul dan Berkelanjutan”. Adapun makna dari Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bandung, adalah:

1. Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam potensial daerah
2. Meningkatkan daya saing IKM-IKM unggulan orientasi ekspor
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan industri
5. Meningkatkan daya dukung infrastruktur industri

Tabel 3.2 Rumusan Visi Misi Industri Kabupaten Bandung

Uraian	Nasional (RIPPIN)	Provinsi Jawa Barat (RPIP)	RPJPD Kab. Bandung	Rumusan Pembangunan Industri Kab Bandung
	A	B	C	D
Visi	Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Jawa barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia	Visi Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Industri Kabupaten Bandung yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3. Meningkatkan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat; 2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan peran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas 2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam potensial daerah 2. Meningkatkan daya saing IKM-IKM unggulan orientasi ekspor 3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri

	<p>yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;</p> <p>4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;</p> <p>5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;</p> <p>6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna</p>	<p>industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;</p> <p>4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja</p> <p>5. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.</p>	<p>3. Transformasi tata Kelola</p> <p>4. Mewujudkan kabupaten yang bersih, transparan dan akuntabel</p> <p>5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter</p> <p>6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata</p> <p>7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif</p> <p>Meningkatkan pembangunan</p>	<p>4. Meningkatkan kerjasama kemitraan industri</p> <p>5. Meningkatkan daya Dukung infrastruktur industri</p>
--	--	---	---	---

	memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.		berwawasan lingkungan	
--	--	--	--------------------------	--

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bandung

Dengan ditetapkannya Visi dan Misi pembangunan industri Kabupaten Bandung, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan sektor industri pengolahan Kabupaten Bandung dengan mengurangi penjualan dalam bentuk bahan baku mentah.
2. Terwujudnya peningkatan nilai jual produk IKM yang berorientasi ekspor.
3. Terwujudnya penurunan angka pengangguran
4. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas
5. Terwujudnya kualitas dan dan inovasi produk industri kecil
6. Terwujudnya peningkatan nilai produksi industri kecil
7. Terwujudnya peningkatan pembangunan industri yang berkualitas dan terpadu
8. Terwujudnya pertumbuhan sektor industri
9. Terwujudnya kontribusi industri terhadap PDRB
10. Terwujudnya nilai ekspor produk industri

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bandung

Sasaran adalah merupakan bagian atau segmen yang akan menjadi fokus dalam pencapaian pembangunan industri, secara mendasar sasaran dibagi menjadi sasaran secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penentuan sasaran harus sesuai dengan visi dan misi agar selaras dari hulu ke hilirnya. Adapun sinkronisasi antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Sinkronisasi Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bandung

VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG			
Visi	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Industri Kabupaten Bandung yang Unggul dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam potensial daerah	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan sektor industri pengolahan Kabupaten Bandung dengan mengurangi penjualan dalam bentuk bahan baku mentah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkannya jumlah industri pengolahan tambang Meningkatkannya jumlah industri pengolahan pangan
	2. Meningkatkan daya saing IKM- IKM unggulan orientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan nilai jual produk IKM yang berorientasi ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pangsa pasar IKM unggulan yang berbasis ekspor Meningkatkan nilai produksi IKM- IKM unggulan
	3. Mengurangi Tingkat Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penurunan angka pengangguran Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bandung Meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor industri
	4. Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kualitas dan inovasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkannya skala produksi industri kecil

kerjasama industri besar dengan industri kecil	<p>industri kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya peningkatan nilai produksi industri kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pangsa pasar industri kecil ▪ Meningkatnya kualitas dan inovasi produk industri kecil
5. Meningkatkan daya dukung infrastruktur industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya peningkatan pembangunan industri yang berkualitas dan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi Penggunaan Lahan Kawasan Peruntukan Industri ▪ Pengembangan Kawasan Industri ▪ Pengembangan sentra IKM berbasis keunggulan lokal:
6. Meningkatkan kontribusi terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya pertumbuhan sektor industri ▪ Terwujudnya kontribusi industri terhadap PDRB ▪ Terwujudnya nilai ekspor produk industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pertumbuhan sektor industri ▪ Meningkatnya kontribusi terhadap PDRB ▪ Meningkatnya nilai ekspor produk industri

3.3.1 Pertumbuhan Sektor Industri

Pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah atau

negara. Sektor industri sendiri mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.

Sektor industri biasanya dibagi menjadi beberapa sub-sektor utama, seperti industri manufaktur, industri pengolahan, dan industri energi. Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, teknologi, ketersediaan tenaga kerja, dan akses ke bahan baku.

Untuk mencapai target pertumbuhan sektor industri yang ambisius hingga 11,81% pada tahun 2045, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu menerapkan strategi pembangunan industri yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi ini meliputi berbagai pendekatan struktural, kelembagaan, infrastruktur, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan teknologi.

Pertama, penguatan infrastruktur industri menjadi dasar utama, terutama melalui pengembangan kawasan industri baru di wilayah yang strategis dan terintegrasi dengan jaringan transportasi nasional. Pembangunan akses jalan, ketersediaan energi listrik dan air, serta konektivitas digital yang andal akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri.

Selanjutnya, diperlukan harmonisasi antara tata ruang wilayah dan rencana pengembangan industri. Integrasi kebijakan RTRW dengan kawasan industri dan sistem perizinan berbasis digital seperti OSS, akan mempercepat realisasi investasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Zona industri yang ditetapkan secara tepat juga akan mengurangi konflik ruang dan mempercepat penyediaan lahan untuk sektor produktif.

Dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan vokasional dan pendidikan kejuruan berbasis industri menjadi fokus utama. Pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan perguruan tinggi, politeknik, dan industri dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi. Selain itu, riset dan pengembangan inovasi industri harus didorong, khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti tekstil, makanan-minuman, dan manufaktur logam.

Strategi berikutnya adalah pemberian insentif investasi yang kompetitif, baik fiskal maupun non-fiskal, kepada investor di sektor industri unggulan. Dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok industri.

Melalui kemitraan antara industri besar dan IKM lokal, akan terbentuk ekosistem produksi yang saling menguatkan dan menyerap tenaga kerja lokal.

Transformasi digital melalui penerapan teknologi industri 4.0 juga menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi. Adopsi Internet of Things (IoT), otomasi, dan manajemen data akan membantu industri menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan pasar.

Penting pula memastikan bahwa pertumbuhan industri berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan industri harus memperhatikan daya dukung lingkungan melalui penerapan prinsip green industry, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah yang baik. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengembangan industri juga harus diutamakan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif.

Akhirnya, kolaborasi lintas wilayah perlu dibangun untuk memperkuat posisi Kabupaten Bandung dalam sistem industri regional Jawa Barat. Integrasi dengan kawasan Bandung Raya, Purwasuka, dan Rebana akan menciptakan jejaring industri yang saling menopang dan memperluas akses pasar serta logistik produk industri.

Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Bandung diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri secara signifikan, mendorong transformasi ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan hingga tahun 2045.

Tabel 3.4 Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

Indikator	Tahun (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pertumbuhan Sektor Industri (%)	6,47	7,56	8,64	9,73	11,81

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3.5 Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

PDRB Kab Bandung	PDRB (%)										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Pertumbuhan Sektor Industri (%)	6,47	6,65	6,72	6,8	7,2	7,56	7,75	7,95	8,25	8,44	8,64
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	9,12	9,24	9,55	9,65	9,73	10,4	10,65	11,28	11,54	11,81	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.3.2 Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan sektor ekonomi yang menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Bandung, dimana saat ini kontribusi sektor industri sebesar 54% dari total PDRB. Adapun salah satu rencana untuk pengembangan industri di Kabupaten Bandung yaitu salah satunya peningkatan kontribusi PDRB sektor industri. Dengan adanya industri, daerah dapat menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam atau bahan baku yang ada, yang kemudian menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tinggi. Hal ini meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Untuk mencapai target kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung sebesar 58% pada tahun 2045, diperlukan strategi pembangunan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Kenaikan kontribusi dari 54,05% pada tahun 2024 menjadi 58,00% pada tahun 2045 mencerminkan proyeksi pembangunan Kabupaten Kota Bandung

, bahwa pertumbuhan sektor industri tidak bisa setinggi karena dengan berbagai keterbatasan sumber daya dukung, maka strategi kedepan bagaimana mempertahankan stabilisasi sektor industri tidak mencapai decline,.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendorong diversifikasi sektor industri. Kabupaten Bandung tidak hanya perlu memperkuat sektor industri yang sudah mapan seperti tekstil, pakaian jadi, dan makanan-minuman, tetapi juga harus mengembangkan sektor-sektor industri baru yang lebih kompetitif dan berbasis teknologi. Pengembangan industri berbasis logam, kimia, peralatan elektronik, serta industri kreatif digital akan menjadi motor pertumbuhan baru yang mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan pengembangan dan revitalisasi kawasan industri. Kawasan industri eksisting seperti Rancaekek, Majalaya, dan Katapang perlu ditingkatkan daya dukung infrastrukturnya, baik dari sisi transportasi, energi, air baku, maupun pengelolaan limbah. Di sisi lain, kawasan industri baru harus disiapkan di wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti Cicalengka, Cangkuang, atau Solokanjeruk dengan memperhatikan keterpaduan dalam tata ruang, akses logistik, dan konektivitas antarwilayah.

Agar industri mampu berkembang secara optimal, perlu pula dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan kapasitas inovasi daerah. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan tinggi dan pelaku industri harus bersinergi dalam menyediakan program pelatihan vokasi, pendidikan dual system, serta inkubasi bisnis bagi pelaku industri pemula dan UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan industri dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan nilai tambah secara lebih luas.

Selanjutnya, strategi peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB juga harus mencakup penguatan ekosistem investasi dan kemudahan usaha. Penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, dan fasilitasi ekspor menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah daerah juga perlu aktif dalam memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri Kabupaten Bandung ke pasar nasional maupun global. Sebagai penyeimbang pertumbuhan ekonomi yang cepat, pembangunan industri juga harus diarahkan pada prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan industri hijau, penggunaan energi terbarukan, serta pengendalian pencemaran lingkungan menjadi aspek penting agar pertumbuhan industri tidak menimbulkan tekanan terhadap daya dukung ekologis.

Terakhir, sinergi antar wilayah di kawasan Bandung Raya dan regional Jawa Barat harus diperkuat melalui pembangunan koridor ekonomi terpadu, jaringan logistik, dan integrasi perencanaan. Dengan konektivitas yang semakin kuat, industri Kabupaten Bandung dapat mengakses bahan baku, pasar tenaga kerja, dan pusat distribusi secara lebih efisien.

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan sektor industri tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan daya saing Kabupaten Bandung di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 3.6 Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

PDRB Kab Bandung	PDRB (%)				
	2024	2030	2035	2040	2045
Kontribusi Sektor Industri (%)	54,05	55,04	56,02	57,01	58,00

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 3.7 Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

PDRB Kab Bandung	PDRB (%)										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Kontribusi Sektor Industri (%)	54,05	54,07	54,1	54,15	54,32	55,04	55,12	55,22	55,31	55,42	56,02
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	56,09	56,11	56,24	56,42	57,01	57,15	57,25	57,43	57,5	58	

Sumber: Hasil Analisis 2024

3.3.3 Peningkatan Pengembangan Ekspor Non-Migas

Program untuk meningkatkan pengembangan ekspor non-migas dapat mencakup beberapa strategi dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing produk dalam pasar global. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. Identifikasi Potensi Produk: Lakukan identifikasi terhadap produk-produk unggulan dan berpotensi dari Kabupaten Bandung yang dapat dijual ke pasar internasional. Ini bisa meliputi produk-produk seperti tekstil, kerajinan tangan, produk pertanian, serta produk industri kecil dan menengah
2. Peningkatan Kualitas dan Standar: Dorong produsen dan eksportir untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar memenuhi standar internasional. Ini dapat meliputi sertifikasi produk, peningkatan proses produksi, dan penggunaan teknologi yang lebih modern.
3. Pemasaran dan Promosi: Kembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas produk di pasar internasional. Ini termasuk penggunaan pameran dagang, promosi digital, partisipasi dalam misi dagang, dan pembentukan kemitraan dengan distributor dan agen pemasaran di luar negeri.
4. Dukungan Keuangan dan Fasilitasi: Sediakan dukungan keuangan seperti insentif perpajakan, kredit ekspor, dan bantuan pendanaan untuk membantu produsen dan eksportir mengembangkan kapasitas produksi mereka dan memasuki pasar internasional.
5. Pendidikan dan Pelatihan: Berikan pelatihan kepada produsen dan eksportir tentang persyaratan perdagangan internasional, manajemen risiko ekspor, serta teknik negosiasi dan penjualan di pasar global.
6. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi: Bangun jaringan bisnis dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan swasta, lembaga riset, dan asosiasi industri untuk mendukung pertumbuhan ekspor dan memfasilitasi akses pasar internasional.
7. Evaluasi dan Penyesuaian: Lakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan untuk mengukur efektivitasnya dan menyesuaikan strategi yang diperlukan agar sesuai dengan perkembangan pasar global.
8. Pengembangan Infrastruktur: Pastikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekspor seperti transportasi, logistik, dan teknologi informasi tersedia dan berfungsi dengan baik.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara holistik dan terintegrasi, diharapkan Kabupaten Bandung dapat meningkatkan ekspor produk non-migasnya secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.8 Target Pengembangan Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

Indikator	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pengembangan	727.287.1	729.292.8	731.618.2	733.943.7	736.269.2
Ekspor (\$)	22,00	31,80	92,80	53,80	14,80

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 3.9 Target Pengembangan Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Indikator	Tahun									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pengembangan	727.287.122	727.432.463	727.897.555	728.362.647	728.827.739	729.292.8	729.757.9	730.223.0	730.688.108	731.153.201
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Ekspor (\$)	732.083.385	732.548.477	733.013.569	733.478.662	733.943.754	734.408.8	734.873.9	735.339.0	735.804.123	736.269.215
						46	38	30		

Sumber: Hasil Analisis 2024

3.3.4 Peningkatan Tenaga Kerja Industri

Berdasarkan dari visi dan misi arahan pembangunan industri di Kabupaten Bandung salah satunya adalah dengan mengurangi pengangguran yaitu dengan meningkatkan daya serap untuk tenaga kerja industri, dimana saat ini pada tahun 2024 daya serap tenaga kerja industri sebesar 135.340 di bidang industri kecil, menengah dan industri besar dan pada perencanaan pembangunan industri diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan tenaga kerja industri sampai tahun akhir perencanaan tahun 2045.

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2025 hingga 2045. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 262.721 orang bekerja di sektor industri, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 1.386.891 orang pada tahun 2045. Peningkatan ini menandakan pergeseran struktur ekonomi dan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja yang kompeten, terlatih, dan adaptif terhadap perkembangan industri modern.

Untuk mencapai target tersebut, strategi utama yang harus dijalankan adalah penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan erat dengan SMK, politeknik, perguruan tinggi, serta balai latihan kerja (BLK) guna menyusun kurikulum berbasis kompetensi sesuai standar industri. Selain itu, implementasi dual track system (pendidikan dan praktik kerja di industri secara bersamaan) menjadi strategi kunci dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja baru.

Selanjutnya, penting untuk menciptakan ekosistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pelatihan kerja industri yang tersebar di wilayah-wilayah dengan potensi industri tinggi seperti Majalaya, Rancaekek, Katapang, dan Cicalengka. Pusat-pusat pelatihan ini harus terhubung dengan sistem informasi pasar tenaga kerja agar lulusan pelatihan dapat langsung terserap ke dunia kerja.

Peningkatan jumlah tenaga kerja juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya difokuskan pada keterampilan teknis, tetapi juga pada soft skills, kemampuan digital, manajerial, dan pemahaman terhadap standar industri internasional. Program sertifikasi profesi dan pelatihan berbasis teknologi industri

4.0 seperti otomasi, robotika, dan *Internet of Things* (IoT) juga perlu diperluas.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong sektor industri untuk melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal melalui insentif kebijakan, misalnya pemberian kemudahan investasi bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Strategi ini sekaligus menjadi alat untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak kalah penting adalah dukungan terhadap pengembangan wirausaha industri dan industri kecil-menengah (IKM) yang mampu menyerap tenaga kerja di luar sektor industri besar. Dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM industri, pemerintah daerah dapat memperluas basis lapangan kerja, terutama di sektor-sektor padat karya dan berbasis potensi lokal.

Tabel 3.10 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

Indikator	Tahun (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Tenaga Kerja Industri (Jiwa)	262.721	543.764	824.806	1.105.849	1.386.891

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 3.11 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

Indikator	Tahun (Jiwa)										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Tenaga Kerja Industri (Jiwa)	262.721	318.930	375.138	431.347	487.555	543.764	599.972	656.181	712.389	768.598	824.806
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	881.015	937.223	993.432	1.049.640	1.105.849	1.162.057	1.218.266	1.274.474	1.330.683	1.386.891	

Sumber: Hasil Analisis 2024

3.3.5 Nilai Investasi Sektor Industri

Nilai investasi industri adalah total dana yang ditanamkan oleh investor dalam sektor industri, baik oleh investor domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) maupun asing (Penanaman Modal Asing/PMA). Adapun nilai investasi di Kabupaten pada tahun 2024 sebesar Rp. 20.880.930.574.542,00.

Untuk mewujudkan target pada tahun 2045, strategi utama yang harus diterapkan adalah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi perizinan yang menyeluruh melalui digitalisasi layanan dan penerapan sistem berbasis OSS (Online Single Submission), sehingga investor dapat mengakses layanan perizinan secara cepat, efisien, dan bebas hambatan birokrasi.

Selanjutnya, penting untuk menyediakan infrastruktur industri yang berkualitas dan terintegrasi, termasuk pengembangan kawasan industri baru, peningkatan kapasitas energi dan air baku, serta aksesibilitas transportasi darat dan multimoda. Pemerintah juga dapat mendorong pembangunan smart industrial park yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga layanan pendukung seperti inkubator bisnis, layanan riset, pusat pelatihan, dan integrasi digital.

Strategi lain yang harus dijalankan adalah pemberian insentif investasi yang menarik, terutama untuk sektor industri prioritas seperti industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri ramah lingkungan. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak daerah, keringanan retribusi, kemudahan lahan, hingga dukungan pemasaran dan ekspor.

Agar investasi dapat terus tumbuh dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu membangun sistem promosi investasi yang proaktif dan adaptif terhadap tren global. Promosi tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional, melalui partisipasi dalam forum investasi, misi dagang, dan penyediaan profil investasi daerah (investment project ready to offer/IPRO). Strategi ini harus disertai dengan data potensi dan peluang investasi yang akurat dan menarik.

Peningkatan nilai investasi juga harus dikaitkan dengan ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja lokal yang kompeten, agar investor mendapatkan keyakinan bahwa mereka dapat menjalankan usahanya secara produktif. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan SDM industri menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting.

Terakhir, untuk menjaga keberlanjutan investasi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengembangan industri tidak bertentangan dengan daya dukung lingkungan dan konsistensi tata ruang. Penataan kawasan industri secara legal dan teknis akan memberikan kepastian hukum kepada investor dan mencegah konflik penggunaan lahan di masa depan.

Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Bandung dapat mengamankan dan meningkatkan arus investasi di sektor industri, memperkuat daya saing wilayah, serta mempercepat transformasi ekonomi yang berbasis manufaktur dan industri bernilai tambah tinggi.

Tabel 3.12 Nilai Investasi Sektor Industri Kabupaten Bandung Per Lima Tahun

Indikator	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Nilai Investasi (Rp)	22.232.386.033.1 69,50	28.989.663.326.3 07,20	35.746.940.619.44 4,90	42.504.217.912.5 82,50	49.261.495.205.7 20,20

Sumber: Hasil Analisis 2024

Tabel 3.13 Nilai Investasi Sektor Industri Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Indikator	Tahun (Rupiah)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nilai Investasi (Rp)	22.232.386.03 3.170	23.583.841.4 91.797	24.935.296.9 50.425	26.286.752.4 09.052	27.638.207.8 67.680	28.989.663.3 26.307	30.341.118.7 84.935	31.692.574.2 43.562	33.044.029.7 02.190	
	34.395.485.16 0.817	35.746.940.6 19.445	37.098.396.0 78.072	38.449.851.5 36.700	39.801.306.9 95.328	41.152.762.4 53.955	42.504.217.9 12.583	43.855.673.3 71.210	45.207.128.8 29.838	
	46.558.584.28 8.465	47.910.039.7 47.093	49.261.495.2 05.720							

Sumber: Hasil Analisis 2024

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Gambaran mengenai kondisi internal dan eksternal perkembangan industri di Kabupaten Bandung saat ini berdasarkan hasil survei dan data-data sekunder penunjang terkait dengan pengembangan industri adalah:

4.1.1 Faktor Internal

Merupakan hal yang terkait dengan kemampuan, potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Bandung, ini akan menjadi kelemahan atau kekuatan tergantung dalam pengelolaannya.

Bentuk kelemahannya yang dimiliki adalah:

1. Potensi yang berbasis sumber daya alam lokal masih kurang optimal
2. Masih rendahnya sarana penunjang di kawasan sentra IKM.
3. Lemahnya sumber daya manusia di sentra IKM terkait keterampilan
4. Masih banyak peralatan produksi barang impor
5. Masih rendahnya pengetahuan digital dari pelaku IKM.
6. Masih lemahnya kemitraan IKM dengan perusahaan besar.
7. Masih tingginya tingkat pengangguran

Bentuk kekuatannya yang dimiliki adalah:

1. Potensi industri pengolahan seperti industri kain dan alas kaki yang sudah berbasis eskpor.
2. Potensi industri pertanian seperti industri teh dan kakao.
3. Ketersediaan bahan baku mineral yang tinggi di Kabupaten Bandung.
4. Industri Tekstil, Aneka Industri masih diminati di Kabupaten Bandung pada skala Industri Besar (PMA/PMDN)
5. Pengembangan kawasan industri yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Bandung.

4.1.2 Faktor Eksternal

Merupakan hal yang terkait dengan penawaran, permintaan, kondisi perkembangan ekonomi, politik, teknologi, yang mempengaruhi perkembangan industri dari luar Kabupaten Bandung terhadap pelayanan industri.

Bentuk peluang yang dimiliki adalah:

1. Adanya regulasi yang menunjang pengembangan industri, dengan adanya OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah izin investasi.

2. Regulasi program nasional terkait transisi energi menuju emisi nol karbon
3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bantuan modal, adanya pelatihan, layanan pengembangan bisnis.
4. Mendorong pengembangan industri digitalisasi penerapan teknologi industri 4.0 (IoT)
5. Dukungan Kementerian Perindustrian kepada pengembangan material center di Desa Mekarmaju melalui BUMDES untuk dukungan sentra IKM Logam.
6. Adanya pangsa pasar untuk produksi pemasaran

Bentuk ancaman yang dimiliki adalah:

1. Tuntunan masyarakat perihal mutu pelayanan produk
2. Masuknya produk impor mengancam produk lokal
3. Rendahnya investasi untuk industri di Kabupaten Bandung
4. Regulasi pemerintah pusat terkait barang impor
5. Kesulitan barang lokal untuk melakukan ekspor ke luar negeri
6. Rentannya industri tekstil terhadap pemutusan hubungan kerja
7. Berdirinya pusat-pusat pasar modern yang mengancam produk IKM

Tabel 4.1 Matriks SWOT

	Peluang	Ancaman
	<p>a. Regulasi yang menunjang pengembangan industri, dengan adanya OSS dan UU Cipta Kerja yang mempermudah izin investasi.</p> <p>b. Regulasi program nasional terkait transisi energi menuju emisi nol karbon (panas bumi menjadi alternatif energi masa depan)</p> <p>c. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bantuan modal, adanya pelatihan, layanan pengembangan bisnis.</p> <p>d. Percepatan pemasaran dengan digital marketing</p> <p>e. Dukungan Kementerian Perindustrian kepada</p> <p>f. pengembangan sentra IKM</p>	<p>a. Daya beli masyarakat relatif menurun</p> <p>b. Masuknya produk impor</p> <p>c. mengancam produk lokal Minat investasi untuk industri skala besar masih rendah di Kabupaten Bandung</p> <p>d. Regulasi pemerintah pusat terkait barang impor belum selaras dengan pertumbuhan industri</p> <p>e. Rentannya industri besar terhadap pemutusan hubungan kerja</p> <p>f. Digitalisasi dan Online marketing trend branding dan pemasaran saat ini.</p> <p>g. Gangguan sosial (premanisme, pungli, kerawanan sosial)</p>

Kekuatan	<i>Strategi Strength – Opportunity</i>	<i>Strategi Strength – Threaten (Proteksi, Sustainability)</i>
a. Potensi industri pengolahan seperti industri kain dan alas kaki yang sudah berbasis ekspor.	a. Strategi pengembangan sentra industri kain dan alas kaki (Pemberdayaan Industri)	a. Penguatan daya saing produk tekstil , hasil Perkebunan dan Migas (Pemberdayaan Industri)
b. Potensi industri pertanian seperti industri teh dan kakao.	b. Strategi pengembangan industri dengan didukung bantuan modal, pelatihan dan layanan pengembangan bisnis (Pemberdayaan Industri)	b. Penguatan ketahanan industry panas bumi (Sumber Daya Industri)
c. Ketersediaan bahan baku mineral yang tinggi di Kabupaten Bandung.	c. Peningkatan pangsa pasar industri Tekstil, Hasil Perkebunan dan Migas (Perwilayahan Industri)	c. Strategi peningkatan investasi di sektor industry (Perwilayahan Industri)
d. Industri Tekstil, Aneka Industri masih diminati di Kabupaten Bandung pada skala Industri Besar (PMA/PMDN)	d. Strategi pemanfaatan bahan baku mineral untuk meningkatkan nilai produksi (Sumber Daya Industri)	d. Penguatan regulasi dan fasilitas Kawasan industri. (Perwilayahan Industri)
e. Pengembangan kawasan industri yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Bandung.	e. Optimalisasi potensi industri ekspor seperti tekstil, alas kaki, teh, dan kakao melalui pemanfaatan regulasi kemudahan investasi (OSS dan UU Cipta Kerja) (Pemberdayaan Industri)	e. Penguatan ketahanan industri tekstil dan aneka industri besar (Sumber Daya Industri)
f. Industri Panas Bumi yang sudah berkembang	f. Pengembangan hilirisasi sumber daya alam panas bumi . (Sumber Daya Industri)	

Kelemahan	<i>Strategi Weakness – Opportunity (Improvement, Upgrading)</i>	<i>Strategi Weakness – Threaten (Defensif, Exit, Shifting)</i>
a. Potensi yang berbasis sumber daya alam lokal masih kurang optimal	a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam lokal (Sumber Daya Industri)	a. Strategi Kerjasama dengan Swasta Lokal dan Asing Ekplorasi SDA (Sumber Daya Industri)
b. Masih rendahnya sarana penunjang di kawasan sentra IKM.	b. Strategi pemberdayaan terhadap pelaku IKM dalam pengetahuan digital (Pemberdayaan Industri)	b. Strategi Kerjasama pembangunan sarana prasarana penunjang IKM (Sarana Prasarana Industri)
c. Lemahnya sumber daya manusia di sentra IKM terkait keterampilan	c. Strategi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kemitraan IKM (Pemberdayaan Industri)	c. Strategi efisiensi dan efektivitas pembinaan sumber daya sentra IKM (Pemberdayaan Industri)
d. Masih banyak peralatan produksi barang impor	d. Strategi peningkatan daya serap tenaga kerja sekitar wilayah industri (Perwilayahan Industri)	d. Strategi Kerjasama pengembangan pemanfaatan sumber daya lokal (Sumber Daya Industri)
e. Masih rendahnya pengetahuan digital dari pelaku IKM.	e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri kecil dan menengah (IKM) melalui pelatihan teknis dan digitalisasi. (Sumber Daya Industri)	e. Reformulasi kebijakan perlindungan IKM dalam menghadapi tekanan dari produk impor dan pasar modern. (Sumber Daya Industri)
f. Masih lemahnya kemitraan IKM dengan perusahaan besar.	f. Fasilitasi IKM dan industri besar dengan dukungan kelembagaan dan peraturan yang kondusif. (Pemberdayaan Industri)	f. Kerjasama
g. Masih tingginya tingkat pengangguran	g. Peningkatan kapabilitas kawasan sentra IKM yang sudah dibangun	

	(Perwilayahan Industri)	modernisasi peralatan produksi IKM dan peningkatan akses terhadap teknologi (Pemberdayaan Industri) g. Kolaborasi digital marketing dengan IKM Kab Bandung dan stakeholder marketing nasional
--	-------------------------	--

Dalam penentuan strategi, lebih kepada *klasterisasi strategi* berdasarkan nomenklatur Kementerian Perindustrian UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014, bahwa strategi dikelompokkan kepada :

a. Perwilayahan Industri

Meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan peruntukkan industri, diturunkan menjadi kawasan industri, kawasan sentra industri kecil dan menengah dan Lingkungan Industri

b. Sarana dan Prasarana Industri

Meliputi kepada pembangunan sarana penunjang industri (energi, transportasi, lingkungan, kelistrikan, jalan, jembatan , pelabuhan, pergudangan)

c. Sumber Daya Industri

Meliputi kepada pemanfaatan sumber daya alam , energi, sumber daya manusia industri, sumber daya teknologi, dan Informasi, dan inovasi.

d. Pemberdayaan Industri

Meliputi program pendampingan, kerjasama dan fasilitasi (permodalan, pelatihan, peralatan dan mesin, teknologi, pemasaran) kepada Industri untuk meningkatkan kemampuan daya saing nya agar bisa meningkat produksi, pemasaran , kualitas dan mutu, manajerial dan SDM nya.

4.2 Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penentuan Industri Unggulan di Kabupaten Bandung

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor industri, Pemerintah Kabupaten Bandung mengelompokkan sektor industri ke dalam tiga kategori utama, yaitu industri unggulan, industri potensial, dan industri berkembang. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, daya saing, kapasitas produksi, keterkaitan dengan sumber daya lokal, serta prospek pengembangan ke depan. Adapun dalam penentuan sektor unggulan dilihat dari kontribusi nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja, adapun hasil dari skoring tersebut termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Penentuan Industri Unggulan di Kabupaten Bandung

Jenis Industri	Skoring Investasi	Skoring Penyerap Tenaga Kerja	Total Skor	Kelas	Klasifikasi
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	7	11	18	I	Unggulan
Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	1	1	2	III	Berkembang
Industri karet & Plastik	8	5	13	II	Potensial
Industri kayu	2	6	8	III	Berkembang
Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain	4	3	7	III	Berkembang
Industri kertas & percetakan	10	9	19	I	Unggulan
Industri kimia farmasi	9	10	19	I	Unggulan
Industri Lainnya	5	2	7	III	Berkembang
Industri Logam, mesin & elektronika	6	7	13	II	Potensial
Industri makanan	11	12	23	I	Unggulan
Industri mineral non logam	3	4	7	III	Berkembang
Industri tekstil	13	13	26	I	Unggulan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.2 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten Bandung

Pendekatan kompetensi inti industri daerah yang mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten/kota, adalah pendekatan yang sangat strategis untuk menentukan industri unggulan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada potensi dan keunggulan daerah itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan sinergi antar kebijakan di tingkat daerah dan pusat.

Penentuan industri unggulan Kabupaten Bandung berdasarkan pendekatan analisis sektor ekonomi. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap sektor-sektor ekonomi untuk mengidentifikasi mana yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Penentuan industri unggulan yang disesuaikan dengan kondisi yang memiliki nilai investasi besar dan penyerap tenaga kerja adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan sektor-sektor yang dipilih dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Industri yang memiliki karakteristik ini tidak hanya dapat mendatangkan modal yang besar, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Berikut ini industri unggulan di Kabupaten Bandung berdasarkan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun penentuan industri unggulan Kabupaten Bandung berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional (RIPIN tahun 2015-2035), mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian wilayah dan mampu menyerap tenaga kerja. Penetapan industri unggulan Provinsi Jawa Barat mengacu Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 mengenai industri prioritas nasional dilakukan dengan memperhatikan kompetensi inti industri yang dimiliki atau akan dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat berdasarkan potensi yang dimiliki kabupaten/kota.

Terkait dengan Industri Prioritas Nasional, penggerak perekonomian wilayah dan menyerap tenaga kerja, di Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa industri unggulan meliputi (1). industri tekstil, aneka dan kerajinan (2) industri alas kaki (3). industri kertas dan barang dari kertas

(4). industri pangan (5). industri farmasi (6). industri logam dasar dan bahan galian bukan logam (7). industri mainan (8). industri elektronika dan telematika, dan (9). industri pembangkit energi. Adapun terkait industri unggulan tertuang pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Bandung

No	3 Digit	KBLI	4 Digit	KBLI	5 Digit	KBLI
1	131, 141	industri tekstil, aneka dan kerajinan	1311, 1312, 1313	Industri Tekstil, Industri aneka dan pakaian jadi Industri kerajinan	13111 13121 13132 14111 32903	Persiapan dan Pemintalan Serat Tekstil Industri Pertenunan Tekstil Industri Penyempurnaan Tekstil Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil Industri Kerajinan YTDL (Yang Tidak Tercakup Dalam Lainnya)
2	152	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	15202	Industri sepatu olahraga
3	170	Industri kertas dan barang dari kertas	1702	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah Dari Kertas dan Papan Kertas	17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang

4	107	Industri pangan	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	10731 10734	Industri kakao Industri Kembang Gula
			1071	Industri produk roti dan kue	10710	Industri produk roti dan kue
			1076	Industri pengolahan kopi, herbal dan teh	10761	Industri pengolahan kopi
10762 10763	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) Industri pengolahan teh					
5	210	Industri Farmasi	2101	Industri Farmasi dan Obat Kimia	21011 21012	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
6	251, 259,	industri logam	2511	Industri Barang dari logam	25111- 25113	Berbagai jenis industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi Industri Barang Lainnya Dari Logam Logam Lainnya YTDL
			2591	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25999	
	239	industri bahan galian bukan logam	2399	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya yang mencakup berbagai produk dari bahan galian bukan logam seperti tepung kaolin, kertas penggosok, barang dari mika, dan barang dari aspal

7	324	Industri Mainan	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	32402	Industri Mainan Anak-Anak yang mencakup pembuatan berbagai jenis mainan seperti boneka, mainan senjata, dan tokoh mainan
8	261	industri elektronika	2612	Industri Komponen Semikonduktor dan Komponen Elektronik Lainnya) untuk manufaktur	26120	industri semikonduktor dan komponen elektronik lainnya (transistor, IC, resistor, kapasitor)
9	351	Ketenagalistrikan	3511	Penyediaan tenaga listrik	35111	Industri Pembangkitan Tenaga Listrik

Tabel 4.4 Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bandung

No.	Industri Unggulan	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	industri tekstil, aneka dan kerajinan	industri tekstil, aneka dan kerajinan	industri tekstil, aneka dan kerajinan	industri tekstil, aneka dan kerajinan	industri tekstil, aneka dan kerajinan
2	Industri alas kaki dan Sepatu Olahraga	Produk kulit khusus <i>(advanced material)</i>	Produk kulit khusus <i>(advanced material)</i>	Produk kulit khusus <i>(advanced material)</i>	Produk kulit khusus <i>(advanced material)</i>

3	Industri kertas dan barang dari kertas	Industri daur ulang, karton dan duplex board	Industri daur ulang, karton dan duplex board	Industri daur ulang, karton dan duplex board	Industri daur ulang, karton dan duplex board
4	Industri kakao	Bubuk coklat, Pasta coklat	Makanna dan Minuman berbahan dasar Coklat bubuk	Makanna dan Minuman berbahan dasar Coklat bubuk	Makanna dan Minuman berbahan dasar Coklat bubuk
		Lemak coklat (cacao Butter)	Aneka pangan olahan	Suplemen berbasis coklat	kosmetik, dan farmasi dari lemak coklat
		Makanan dan minuman berbasis coklat	Makanan dan minuman berbasis coklat	Makanan dan minuman berbasis coklat	Suplemen dan Pangan fungsional berbasis coklat

No.	Industri Unggulan	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
5	Industri produk roti dan kue	<i>Bakery</i> , dan <i>Cake</i>	<i>Bakery</i> dan <i>Cake</i>	<i>Bakery</i> dan <i>Cake</i>	<i>Bakery</i> dan <i>Cake</i>
6	Industri Pengolahan teh	Olahan makanan dan minuman berbasis teh	Teh organik, herbal dan Ekstrak teh	Teh organik, herbal dan Ekstrak teh	Suplemen berbasis teh
7	Industri Pengolahan Kopi	Green bean, Roasted bean, grounding bean, aneka olahan minuman kopi siap minum (ready to drink)	Green bean, Roasted bean, grounding bean, aneka olahan minuman kopi siap minum (ready to drink)	Green bean, Roasted bean, grounding bean, aneka olahan minuman kopi siap minum (ready to drink)	Kualitas biji kopi dan diversifikasi produk kopi
8	Industri Farmasi	Industri Farmasi	Industri Farmasi	Industri Farmasi	Industri Farmasi
9	industri logam	industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi	industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi	industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk, dan industry	industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk, dan industry

		Bubuk, dan industry logam lainnya	Bubuk, dan industry logam lainnya	logam lainnya	logam lainnya
10	Industri Mainan	Industri Mainan Anak-Anak yang mencakup pembuatan berbagai jenis mainan seperti boneka, mainan senjata, dan tokoh mainan	Industri Mainan Anak-Anak yang mencakup pembuatan berbagai jenis mainan seperti boneka, mainan senjata, dan tokoh mainan	Industri Mainan Anak-Anak yang mencakup pembuatan berbagai jenis mainan seperti boneka, mainan senjata, dan tokoh mainan	Industri Mainan Anak-Anak yang mencakup pembuatan berbagai jenis mainan seperti boneka, mainan senjata, dan tokoh mainan
11	industri elektronika	inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan material elektronik canggih, dengan fokus pada keberlanjutan dan perangkat yang lebih cerdas	inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan material elektronik canggih, dengan fokus pada keberlanjutan dan perangkat yang lebih cerdas	inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan material elektronik canggih, dengan fokus pada keberlanjutan dan perangkat yang lebih cerdas	inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan material elektronik canggih, dengan fokus pada keberlanjutan dan perangkat yang lebih cerdas

12	Industri Pembangkitan Tenaga Listrik	PLTA, PLTP	PLTA, PLTP,	PLTA, PLTP,	PLTA, PLTP, PLTBM, Peningkatan energi terbarukan (EBT), pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan transformasi jaringan listrik menjadi 'supergrid' yang cerdas untuk mengatasi intermitensi EBT
----	---	------------	-------------	-------------	--

Tabel 4.5 Lokasi Terdapatnya Sumber daya Alam Kabupaten Bandung Untuk Mendukung Pengembangan Industri Unggulan

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri Unggulan	Wilayah Potensial
1	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki	Industri Tekstil	
		Rajut	<ul style="list-style-type: none"> • Dayeuhkolot • Majalaya • Solokanjeruk
		Tekstil Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Rancaekek • Margaasih
		Industri Kulit dan Alas Kaki	
		Industri Alas Kaki	<ul style="list-style-type: none"> • Dayeuhkolot • Pameungpeuk • Katapang • Cimaung
		Bahan Kulit non Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> • Katapang • Margahayu
		Kulit sintesis	<ul style="list-style-type: none"> • Katapanag • Margahayu
Sepatu Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Katapang • Arjasari • Cikancung 		

			<ul style="list-style-type: none">• Margaasih
2	Industri Pangan	Industri pengolahan teh	<ul style="list-style-type: none">• Pasirjambu• Kertasari• Pangalengan• Ciwidey
		Industri Pengolahan kopi	<ul style="list-style-type: none">• Ciwidey• Pangalengan• Cimauang• Cilengkrang• Ibum
		Industri kakao	<ul style="list-style-type: none">• Cileunyi• Rancaekek• Dayeuhkolot• Baleendah
		Industri produk roti dan kue	<ul style="list-style-type: none">• Bojongsoang• Cicalengka• Kutawaringin• Soreang

3	Industri kertas dan barang dari kertas	Industri Kertas	<ul style="list-style-type: none">• Bojongsoang• Cimaung• Soreang
4	Industri Farmasi	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Dayeuhkolot
		Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	<ul style="list-style-type: none">• Cileunyi
5	Industri Logam	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	<ul style="list-style-type: none">• Pasirjambu
6	Industri elektronik dan telematika	manufaktur dan sistem integrator peralatan telekomunikasi serta elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Dayeuhkolot• Bojongsoang
7	Industri Pembangkitan Tenaga Listrik	PLTA, PLTP	<ul style="list-style-type: none">• PLTA Bengkok, PLTA dago (cimenyan)• PLTA Plengan, PLTA Lamajang

			<p>(pangalengan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLTA Cikalong (Cimaung) • PLTP Kamojang (Ibun) • PLTP Wayang Windu (pangalengan) • PLTP Patuha (Pasir jambu, Rancabali)
--	--	--	---

Tabel 4.6 Sasaran dan Program Industri Pangan Untuk Mendukung Pengembangan Industri Unggulan

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan			
			2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Industri Makanan dan Minuman (Kakao, Minuman, teh dan kue)					
1.1	Dukungan ketersediaan bahan baku dan penolong (kualitas dan kuantitas) serta simplifikasi rantai pasok untuk industri pangan	Koordinasi terkait Ketersediaan bahan baku	□			
		Kemitraan hulu dan hilir Industri	□	□	□	□

		Makanan dan Minuman				
1.2	Dukungan pemasaran produk olahan pangan	Kegiatan pameran produksi olahan pangan nasional maupun internasional	<input type="checkbox"/>			
1.3	Meningkatnya kemitraan pengusaha makanan dengan kegiatan pariwisata, pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, distributor dan pasar modern	Pendampingan IKM Pengolahan pangan untuk kontrak kerjasama dengan pihak penunjang pemasaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Pembangunan Sentra IKM Olahan Pangan	Penataan dan pembentukan sentra IKM pangan berbasis SK Bupati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Tercapainya Industri Makanan dan Minuman hemat energi dan ramah lingkungan	Sosialisasi industri hijau bagi IKM serta pelatihan penyusunan sustainability	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		action plan bagi IKM				
1.6	Terpenuhinya standarisasi untuk produk Industri Makanan dan Minuman	Sosialisasi CPPOB/G MP. Pelatihan dan Pendampingan CPPOB/GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan			
			2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1.7	Meningkatkan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	Pendampingan dan fasilitasi izin edar BPOM/PIRT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Pengembangan kemasan produk olahan pangan	Kurasi produk pangan unggulan untuk fasiltasi pembuatan kemasan modern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Meningkatnya diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah	Kerjasama penelitian produk olahan pangan dengan lembaga riset (Perguruan tinggi, BRIN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Pengadaan permesinan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.10	Pengembangan IKM Olahan pangan melalui revitalisasi peralatan dan permesin	skala IKM olahan pangan unggulan				
		Perbaikan peralatan dan pembaharuan mesin IKM yang sudah tidak update	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil					
2.1	kontinuitas ketersediaan bahan baku dan bahan penolong	Koordinasi dengan vendor bahan kain untuk kerjasama dengan IKM Konveksi	<input type="checkbox"/>			
2.2	perdagangan produk Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil tingkat regional, nasional dan internasional	Pameran produk tekstil dan pakaian di level nasional dan internasional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Pengembangan <i>green</i> industri IKM	Sosialisasi Industri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari tekstil	Hijau untuk IKM Tekstil dan Garment Lokal				
2.6	Pengadaan peralatan dan permesinan untuk IKM Tekstile dan Pakaian	Pembaharuan peralatan dan mesin IKM tekstile dengan teknologi 4.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Standar Mutu dan Kualitas Produk Tekstile dan Pakaian	Pendampingan SNI 8856.2020 untuk pakaian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan			
			2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
3	Industri Alas Kaki					
3.2	Peningkatan perdagangan Produk Alas kaki tingkat regional dan nasional	Pameran produk alas kaki Kab Bandung di level nasional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kerjasama dengan Digital Marketing (Tokopedia, Lazada dan Shoppe) melalui pendampingan.				
3.3	Peningkatan Mutu Produk Alas Kaki	SKKNI 2212019 dan KKNi 43 2020 untuk kompetensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		keahlian produk alas kaki				
3.4	Peningkatan Teknologi dan Permesinan	Pemutakhiran mesin compression/injection/castin g untuk produksi alas kaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Industri kertas dan barang dari kertas					
4.1	Penjaminan ketersediaan bahan baku produk kertas	Koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan untuk produk hasil hutan dan kebun yang menjadi bahan baku utama kertas	<input type="checkbox"/>			
4.2	Pengembangan Mutu Produk Kertas	SNI 7188.1.3:2016 Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan			
			202 5- 20 30	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
		produk kertas - Seksi 3 : Kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna				
		Penelitian Data mining untuk peningkatan mutu produk pada industri kertas di Kab Bandung				
4.3	Pengembangan teknologi dan permesinan produksi kertas	Pemutakhiran mesin forming, mesin press dan mesin dryer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Implementasi Industri 4.0 di Industri Kerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5	Industri Farmasi					
5.1	Pengembangan Produk Farmasi	Pelatihan kemasan produk farmasi (tablet, cairan, serbuk)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Uji dan Penelitian produk farmasi herbal alami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Penelitian produk farmasi untuk kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Uji dan Penelitian obat tradisional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Penguatan klaster produk farmasi	Koordinasi dengan pemasok bahan baku farmasi untuk volume yang akan disalurkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Kerjasama dengan BRIN untuk pengembangan bahan baku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		produk farmasi				
		Kerjasama dengan distributor dan eksportir produk farmaasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2.3 Pengembangan Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri merupakan tatanan wilayah dan segala upaya untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri. Perwilayahan industri. Di Kabupaten Bandung, industri yang berkembang adalah industri menengah. Industri di Kabupaten Bandung merupakan sektor yang menunjang dalam perekonomian adalah industri pengolahan.

Program Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
1	Pengembangan Percepatan						
1.1	Program Pengembangan Ekspor						
	a. Peningkatan standar mutu IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan Mutu Produk Standar Ekspor ▪ Pendampingan Mutu Manajemen Usaha (K3, Proses Bisnis, SCM) ▪ Sertifikasi Halal, HACCP, dan Hijau Produk 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov Jawa Barat

		<p>IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Dokumentasi Ekspor dan Legal 				
	b. Peningkatan pangsa pasar di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama IKM dengan Eksportir Wilayah Asia Tenggara ▪ Pendampingan Ekspor ke Negara Eropa , Amerika, dan Cina ▪ Kerja sama dengan broker luar negeri dan retail luar untuk produk lokal 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov Jawa Barat 3. Kementerian Perdagangan
	c. Pengembangan Brand Produk Lokal di Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan mutu kemasan produk untuk ekspor 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Perdagangan dan

		<ul style="list-style-type: none">▪ Sertifikasi Usaha Standar Internasional (ISO)					Perindustrian Prov Jawa Barat
--	--	---	--	--	--	--	-------------------------------

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>Websit</i> e atau kerja sama dengan Amazon, dllnya. 					3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Luar Negeri
1.2	Peningkatan investasi industri						
	a. Peningkatan Iklim Investasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait dengan pengendalian Upah Buruh Minimum tidak melebihi UMR sesuai dengan kemampuan perusahaan Koordinasi terkait 					1. Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Satu Pintu Kab Bandung 2. APINDO Prov Jawa Barat 3. Organisasi Masyarakat dan LSM 4. Kementerian Investasi Republik Indonesia 5. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung

		<p>dengan Kemudahan Proses Perizinan Investasi Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan organisasi masyarakat untuk jaminan keamanan investasi ▪ Koordinasi terkait dengan Insentif Fiskal dan Non Fiskal di Kab Bandung 					
	<p>b. Peningkatan Jumlah Investasi PMA dan PMDN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan Promosi Kawasan Industri ▪ Partisipasi dalam pameran industri di level nasional dan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Satu Pintu Kab Bandung dan Provinsi 2. Kementerian Investasi Republik Indonesia 3. Dinas Perdagangan dan

		internasional					Perindustrian bandung	Kabupaten
--	--	---------------	--	--	--	--	--------------------------	-----------

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
	c. Pengembangan Hilirisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Terkait dengan potensi panas bumi di Kab Bandung ▪ Koordinasi Terkait dengan potensi material logam dan non logam di Kab Bandung ▪ Koordinasi Terkait dengan potensi agro industri di Kab Bandung ▪ Diseminasi dan Worshop Hasil Riset Sumber Daya Alam di Kab Bandung 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan di Kabupaten Bandung 3. Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat 4. Lembaga Riset BRIN dan Pusat Penelitian Perguruan Tinggi di Jawa Barat

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian dan Penelitian Industri Hilir di Kab Bandung ▪ Penyusunan Rencana Hilirisasi Industri di Kab Bandung 					
1.3	Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB						
	a. Peningkatan produksi industri besar menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan penambahan kapasitas produksi untuk pemenuhan <i>demand</i> nasional 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Industri 2. Eksportir 3. Asosiasi Pengusaha Indonesia 4. Investor

		Koordinas terkait dengan perluasan industry di wilayah kawasan industri kab Bandung				
	b. Perluasan Kapasitas Industri besar dan menengah	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait dengan promosi penambahan pabrik baru▪ Koordinasi terkait dengan penambahan investasi dan▪ turunannya di Kab bandung				<ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan Industri2. Investor Industri
	c. Industri besar menengah yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi Stabilisasi Industri di Kab Bandung▪ Koordinasi terkait				<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat

		<p>dengan rantai pasok industri di Kab Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan daya tahan IKM di Kab Bandung (Perpajakan, Keamanan Sosial, Kemudahan Izin dan Pemasaran) 				<ol style="list-style-type: none"> 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 4. Pelaku Industri Besar 5. Pelaku IKM 6. Dinas Sosial Kab Bandung 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bandung
1.4	Pengurangan tingkat pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 				
	a. Pengembangan Industri Padat Karya baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan Pembangunan Industri Tekstile , Otomotif, di Kab Bandung 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas DPMPTSP Kabupaten Bandung 2. Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung

	<p>b. Peningkatan kewirausahaan Industri Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan wirausaha industri makanan,▪ Pelatihan industri start up▪ Koordinasi terkait dengan dukungan permodalan usaha dengan fihak perbankan▪ Koordinasi terkait dengan penambahan atau pergeseran alokasi anggaran untuk▪ pemberdayaan wirausaha					<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha IKM2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung3. Perbankan nasional dan swasta4. Bappeda Kab Bandung
--	---	---	--	--	--	--	--

2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 				5.
2.1	Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 				6.
	a. <i>Mapping</i> Kawasan Peruntukkan Industri dan Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaharuan data kawasan peruntukkan industri ▪ Pembaharuan data kawasan industri ▪ Studi kelayakan kawasan – kawasan peruntukkan industri 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bandung 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 7. Bapperida Kab Bandung

	b. Alokasi industri sesuai dengan KPI mencapai 90 %	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemutakhiran regulasi▪ pembangunan industri					1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bandung
--	---	--	--	--	--	--	--

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
		<p>melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait pendanaan alokasi industri yang tidak tertib kepada kawasan industri. ▪ Koordinasi terkait dengan infrastruktur penunjang industri di wilayah KPI 					<p>2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bandung</p> <p>3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung</p> <p>4. Pemda Kab Bandung</p> <p>5. Bapperida</p>
2.3	Pengembangan kawasan						

	industri						
	<p>a. Peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang kawasan industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait ketersediaan air baku untuk kawasan industri ▪ Koordinasi terkait kelayakan jalan masuk ke kawasan industri ▪ Koordinasi terkait ketersediaan energi listrik untuk kawasan industri ▪ Koordinasi terkait ketersediaan jaringan telekomunikasi untuk kawasan industri 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab Bandung 3. Dinas Lingkungan Kab Bandung 4. PT.Telkom Kab Bandung 5. Dinas Kominfo Kab Bandung

		<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait ketersediaan jalur					
--	--	---	--	--	--	--	--

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
		pembuangan limbah dan sampah dari kawasan industri					
	b. Pengembangan tata kelola kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminar dan Worshop Manajemen Kawasan Industri ▪ Standarisasi Kawasan Industri Hijau ▪ Koordinasi Terkait dana CSR Kawasan Industri untuk mitra IKM disekitarnya. 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung dan Provinsi Jawa Barat 2. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Direktorat Kawasan Industri 3. Pengelola Kawasan Industri

	c. Pembangunan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Masteplan dan DED Kawasan Industri di Kab Bandung ▪ Koordinasi terkait clear and clean lahan kawasan industri 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bandung 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 3. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 4. Investor Kawasan Industri 5. Dinas ATR BPN Kab Bandung 6. Pemilik Lahan dan masyarakat 7. Aparatur Desa dan Kecamatan
2.4	Pengembangan kawasan sentra IKM						
	a. Pengembangan Kawasan Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masterplan Kawasan Sentra IKM Unggulan ▪ DED Kawasan Sentra IKM Unggulan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas ATR BPN Kab Bandung 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bandung 4. Pelaku IKM Unggulan 5. BUMD Kab Bandung

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait kelembagaan dan pembiayaan operasinal sentra IKM ▪ Pendampingan dan pembinaan IKM Unggulan untuk di kawasan sentra ▪ IKM 					6. Swasta
	<p>b. Keberlanjutan</p> <p>Kawasan Sentra IKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Kawasan Sentra IKM ▪ Pelatihan manajemen bisnis untuk pengelola kawasan sentra IKM ▪ Koordinasi terkait dengan pemeliharaan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. BUMD Kabupaten Bandung 3. Perusahaan Swasta 7. Pelaku IKM

		fasilitas						
		▪ kawasan sentra						
		IKM						

4.2.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

Adapun tujuan pembangunan SDM Industri meliputi (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Program Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
1	Pembangunan Sumber Daya Industri						
1.1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri						
	a. Kompetensi SDM Tenaga Kerja Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait pelatihan kompetensi berdasarkan SKKNI Bidang Industri ▪ Koordinasi terkait sertifikasi profesi kerja industri ▪ Koordinasi 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Ketenagakerjaan Kab Bandung 3. Balai Pelatihan Kerja 4. Perguruan Tinggi dan Vokasi

		<p>terkait dengan Balai balai pelatihan kerja atas relevansi kurikulum dan kebutuhan kerja industri saat ini</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja di industri saat ini.					
1.2	Pembangunan Sarana Prasarana SDM Industri						

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
	a. Sarana dan prasarana SDM Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan pemutakhiran Fasilitas Diklat Industri ▪ Koordinasi dengan perusahaan terkait dengan unit diklat internal di perusahaan ▪ Koordinasi dengan tempat uji kompetensi industri di wilayah kab bandung 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Dinas Ketengakerjaan Kab Bandung 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

2	Pembangunan Sumber Daya Teknologi						
2.1	Pengembangan Industri 4.0						
	a. Pemetaan kesiapan Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Assesment</i> Industri 4.0 di wilayah Kab Bandung▪ Pelatihan kepada industri terkait dengan borang Ind 4.0▪ Koordinasi terkait dengan perbaikan peralatan dan mesin▪ Koordinasi terkait dengan Instalasi					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov Jawa Barat3. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia4. Pelaku Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
		Teknologi 4.0 pada industri Organisasi					
2.2	Digitalisasi IKM						
	a. Pelatihan dan Pemanfaatan Platform Teknologi Digital	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan Digital <i>Marketing</i> di IKM ▪ Bantuan Peralatan Internet kepada IKM ▪ Perancangan Web IKM secara terpadu ▪ Pelatihan konten kreator bagi 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Diskominfo Kab Bandung 3. Lembaga Pelatihan 4. Perguruan Tinggi

		IKM					
	b. Peningkatansarana penunjang digitalisasi IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modernisasi Komputer di IKM ▪ Dukungan Peralatan <i>Wifi</i> dan Sinyal ▪ Bantuan Tablet komputer bagi IKM ▪ Peningkatan jaringan Fiber Optik 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Diskominfo Kab Bandung 3. Vendor Komputer dan perlengkapannya
2.3	Pengembangan teknologi tepat guna						
	a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna di IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama dengan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung

		Perguruan Tinggi Riset Teknologi permesinan					2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat
--	--	---	--	--	--	--	--

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025-2030	2031-2035	2036 - 2040	2041-2045	
		<ul style="list-style-type: none"> Kajian Efektivitas Teknologi Tepat guna bagi IKM 					3. Perguruan Tinggi 4. Balai Penelitian Industri
2.4	Pengembangan Pusat Teknologi						
	a. Pusat Pengembangan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait dengan lokasi untuk Pusat Pengembangan Teknologi Industri Koordinasi terkait dengan pengadaan fasilitas permesinan, peralatan terkini untuk pusat pengembangan 					1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Pemerintah Kab Bandung 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat

		teknologi industri.					
3	Pembangunan Kreativitas dan Inovasi						
3.1	Pengembangan Produk IKM						
	a. Pelatihan desain produk dan kemasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan Produk dan Desain Kemasan IKM▪ Kurasi kemasan IKM yang ada memenuhi keamanan lingkungan					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Perguruan Tinggi3. Balai Penelitian Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
	b. Inovasi produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pameran Inovasi Produk Unggulan Kab Bandung ▪ <i>Workshop</i> dan diseminasi inovasi IKM Kab Bandung 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Perguruan Tinggi 3. Bapperida Kab Bandung
	c. Teknologi IoT dalam desain produk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan Adopsi <i>Internet of Things</i> dalam desain produk dan kemasan ▪ Pelatihan pemanfaatan AI dalam inovasi produk IKM. 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Perguruan Tinggi 3. Dinas Kominfo Kab Bandung 4. <i>Provider</i> Internet
3.2	Pengembangan Digital Marketing						

	a. Peningkatan Literasi Digital untuk pelaku usaha industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan Digital <i>marketing</i> ke pelaku IKM▪ Pendampingan pembuatan akun medsos IKM yang berdaya jual tinggi▪ Kerja sama dengan Shopee, Lazada, Tokopedia					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Perguruan Tinggi3. Dinas Kominfo Kab Bandung4. Provider Internet5. Pelaku Usaha
--	---	--	--	--	--	--	--

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
		<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi <i>Mobile Phone</i> bagi pelaku usaha untuk pemasaran 					
	b. Pusat Bigdata Pasar IKM di Kab Bandung	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan database pasar dan konsumen nasional Membangun Bigdata pasar dan konsumen Integrasi dengan SIINAS 					<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung Perguruan Tinggi Dinas Kominfo Kab Bandung Pengelola Server
4	Pembiayaan Industri						
4.1	Pendanaan Nasional dan Daerah						

	<p>a. Peningkatan bantuan pemerintah pusat untuk permesinan</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi untuk pengajuan penambahan kuota bantuan peralatan dari pusat▪ Koordinasi terkait dengan alokasi dana APBD untuk peralatan dan permesinan industri▪ Koordinasi terkait dengan pengajuan pendanaan kepada					<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia2. Badan Riset dan Inovasi Nasional3. Bappenas
--	---	---	--	--	--	--	---

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
		swasta untuk permesinan dan peralatan bagi IKM					
	b. Peningkatan DAK pengembangan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan pengembangan dana DAK Pusat ke Kab Bandung 					1. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Bappenas
4.2	Pendanaan melalui Perbankan						
	a. Kerja sama dengan Bank Daerah untuk pembiayaan IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan bank daerah kemudahan pendanaan usaha IKM 					1. Bank Daerah 2. Pelaku Usaha 3. Pemerintah Daerah Kab Bandung

		<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi untuk relaksasi dan penghapusan hutang IKM					
4.3	Kerja sama dengan Swasta						
	a. Kerja sama pendanaan/bantuan oleh perusahaan swasta besar ke IKM daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyusunan MOU Pemda dengan Perusahaan Besar dalam pendanaan kepada IKM di Kab Bandung▪ Koordinasi dana CSR untuk pendanaan IKM					<ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan Swasta2. Pelaku Usaha3. Pemerintah Kab Bandung

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
4.4	Pendanaan dari Perguruan Tinggi						
	a. Kerja sama hibah peralatan dan mesin dengan perguruan tinggi bagi IKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MOU Pemda dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk pengabdian masyarakat di Kab Bandung ▪ Koordinasi untuk penetapan desa dan IKM binaan Perguruan tinggi di Kab Bandung 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Perguruan Tinggi 3. Pelaku Usaha

4.2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi:

a. Standarisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- Mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
1	Standarisasi Industri						
1.1	Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan Produk Halal Industri ▪ Kajian Kawasan Industri Halal di Kab Bandung ▪ Pembinaan secara berkala kepada industri untuk 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Kabupaten Bandung 3. MUI Provinsi Jabar

		peningkatan produk halal					
1.2	Sertifikasi Industri Hijau	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelatihan sertifikasi industri Hijau bagi Industri▪ Pendampingan sertifikasi industri Hijau▪ Lembaga penilai standar industri hijau					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau3. Pelaku Usaha Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan <i>wokrshop</i> industri hijau di IKM 					
1.3	Pengembangan laboratorium uji produk industri	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama dengan perguruan tinggi Kerja sama dengan laboratorium Uji Balai Besar Industri Dukungan sarana laboratorium 					<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung BPOM Laboratorium Kesehatan Daerah Perguruan tinggi

1.4	Kelembagaan penilai standar industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Kerja sama dengan standar industri nasional▪ Kapabilitas penilai standar industri lokal▪ Tata kelola kelembagaan yang terpadu					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung2. BSN Indonesia
2	Infrastruktur Industri						

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
2.1	Usulan Peningkatan Energi Bagi Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi untuk penambahan jumlah jaringan listrik ke wilayah <i>remote area</i> IKM ▪ Koordinasi pengembangan energi alternatif bagi IKM ▪ Usulan pembangunan PLTS di daerah IKM ▪ Koordinasi terkait dengan pemanfaatan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.PLN 2. Perusahaan Listrik swasta 3. Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

		energi panas bumi untuk IKM di wilayah IKM					
2.2	Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait dengan akses jalan menuju daerah Kawasan Peruntukkan Industri					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung2. Dinas Tata ruang dan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
2.4	Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan penambahan utilitas dan kapabilitas BTS di Wilayah Kawasan Industri ▪ Koordinasi terkait dengan jaringan fiber optik di wilayah industri 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskominfo Kabupaten Bandung 2. PT. Telkom 3. Provider dan Jasa Internet

2.5	Peningkatan kualitas pembuangan limbah dan sampah industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait dengan jalur pembuangan limbah industri▪ Koordinasi terkait dengan penambahan TPS untuk wilayah sentra IKM▪ Koordinasi terkait usulan pembentukan TPS Khusus industri di wilayah KPI					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung2. Dinas PUTR Kab Bandung
-----	--	---	--	--	--	--	---

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036- 2040	2041- 2045	
2.7	Peningkatan Kualitas jaringan sumber air baku industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan pipanisasi air baku industri di wilayah KPI dan KI ▪ Koordinasi terkait dengan pemanfaatan air permukaan sungai di kab Bandung untuk industri ▪ Koordinasi terkait dengan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung 2. BBWS Wilayah Kab Bandung

		pengembangan embung di wilayah KPI					
3	Sistem Informasi Industri Nasional						
3.1	Pemutakhiran database industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Survei Industri setiap tahun 1.000 industri▪ Input data baru industri▪ Seminar dan Workshop Database Industri					1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
3.2.	Peningkatan kompetensi SDM pengelola Silnas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan SDM Pengelola Data Industri ▪ Pelatihan SDM Operator Data Industri ▪ Pelatihan Iot Sistem Informasi Database 					1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

3.3	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan Fitur dalam Aplikasi SIINAS▪ Sinkronisasi SIINAS▪ Pengembangan <i>Blockchain</i> Database Industri▪ Peningkatan <i>Security</i> Data Industri				1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
-----	---	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.2.6 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Program Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)						
1.1	Kemampuan Industri Lokal						
	a. Penyiapan standar mutu produk lokal untuk Industri besar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan dan pengembangan standar mutu industri bagi IKM Lokal ▪ Membantu medias kerja sama dengan industri besar untuk pelatihan dan pembinaan 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Pelaku Usaha 3. Mitra Usaha Besar 4. Lembaga Standar Mutu

	b. Pembinaan pengembangan mutu produk lokal sebagai komponen penunjang	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembinaan IKM produksi produk komponen otomotif▪ Pembinaan IKM Produksi produk komponen tekstil▪ Pembinaan IKM produksi produk komponen elektronika					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Pelaku Usaha3. Mitra Usaha Besar4. Lembaga Standar Mutu
1.2	Pengembangan insentif untuk TKDN						
	a. Insentif untuk Industri besar kerja sama dengan IKM Lokal dalam pemenuhan TKDN	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi terkait dengan insentif bagi industri besar					<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
		menerima pasokan komponen dari IKM Lokal ▪ MOU Industri besar dengan IKM serta Pemda					3. Pelaku Usaha Besar
	b. Peningkatan TKDN Produk Industri Besar	▪ Koordinasi terkait dengan monev TKDN bagi Industri besar di Kab Bandung					1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Pelaku Usaha 3. Mitra Usaha Besar 4. Kementerian Perindustrian
	c. Insentif bagi Industri lokal penunjang TKDN	▪ Koordinasi terkait dengan pendanaan khusus bagi IKM yang mampu pasok ke industri besar ▪ Pembinaan dan Pendampingan IKM					1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 3. Pelaku Usaha Lokal

		Lokal ke TKDN <ul style="list-style-type: none">▪ Insentif Fiskal dan Non Fiskal					
2	Kerja sama Internasional						
	a. Kerja sama Internasional dengan Kabupaten Bandung untuk ekspor produk lokal	<ul style="list-style-type: none">▪ MOA Pemda Kab Bandung dengan Negara tujuan ekspor					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Pemerintah Kab Bandung3. Perusahaan Internasional

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan penyusunan Panduan Kerja sama Internasional ▪ <i>Worskop</i> dan Seminar Internasional Produk Lokal 					
	b. Kerja sama Internasional bidang teknologi dan inovasi untuk Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama Internasional pembinaan wirausaha lokal dengan <i>Start Up</i> Internasional ▪ Kerja sama internasional desainer asing dengan IKM Lokal ▪ Kerja sama 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Pemerintah Kab Bandung 3. Perusahaan Start Up Internasional

		internasional dengan inovator dunia					
	c. Kerja sama Internasional untuk Pengembangan standar mutu industri kelas dunia	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Workshop dan Seminar Internasional Green Industry</i>▪ <i>Workshop dan Seminar Internasional ISO 9001 dan 14000 bagi Industri Lokal</i>▪ <i>Forum Internasional Small Medium Enterprise.</i>					<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung2. Pemerintah Kab Bandung3. Lembaga Internasional Bidang Standarisasi Industri

No.	Sub Program	Indikasi Kegiatan	Pentahapan				Pemangku Kepentingan
			2025- 2030	2031- 2035	2036 - 2040	2041- 2045	
	d. Kerja sama Internasional Investasi dengan Kab Bandung dalam Pembangunan kawasan industri taraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait dengan investor Asing untuk Kawasan Industri ▪ Seminar dan Diseminasi kerjasama investor dengan pemerintah daerah Kab Bandung dalam rangka pembangunan industri, ▪ Seminar dan diseminasi dengan pengelolaan kawasan industri level internasional dengan kawasan industri Kab Bandung 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Bandung 2. Pemerintah Kab Bandung 3. Perusahaan Milik Asing dan PMDN Kelas Dunia 4. Investor Kawasan Industri

Sumber: Hasil Analisis,2024

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan laporan kegiatan “Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung” berikut ini ringkasan keterkaitan dari BAB I s/d Bab IV.

- Industri unggulan di Kabupaten Bandung terdiri dari industri tekstil, aneka dan kerajinan, industri alas kaki, industri kertas dan barang dari kertas, industri pangan, industri farmasi, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, industri mainan, industri elektronika dan telematika, dan industri pembangkit energi.
- Permasalahan industri di Kabupaten Bandung adalah kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang berbasis sumber daya alam lokal, masih rendahnya sarana penunjang di kawasan sentra IKM, lemahnya sumber daya manusia di sentra IKM terkait keterampilan, masih banyak peralatan produksi barang impor, masih rendahnya pengetahuan digital dari pelaku IKM, masih lemahnya kemitraan IKM dengan perusahaan besar, masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung.
- Untuk menanggulangi permasalahan sektor industri di Kabupaten Bandung diperlukan strategi percepatan pengembangan industri yang terdiri dari peningkatan sumber daya industri, hilirisasi sumber daya, dan penguatan daya saing IKM. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilannya. Meningkatkan daya saing produk lokal dengan standar internasional. Melalui

1. Percepatan Pengembangan Industri

Percepatan pengembangan industri bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun strateginya adalah:

- Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
- Mendorong digitalisasi penerapan teknologi industri 4.0 (IoT)
- Peningkatan iklim investasi dan regulasi yang mendukung
- Peningkatan efisiensi transportasi bahan baku dan produk industri

2. Peningkatan sumber daya industri

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan kualitas sumber daya industri, baik dari segi tenaga kerja, bahan baku, maupun teknologi. Adapun strateginya adalah:

- Peningkatan kualitas SDM Industri dengan meningkatkan pendidikan vokasi, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan.
- Optimalisasi pemanfaatan bahan baku.
- Mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses produksi.

3. Strategi hilirisasi sumber daya

Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun ekspor. Adapun strateginya adalah:

- Penguatan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
- Meningkatkan kapasitas produksi industri hilir agar dapat menyerap bahan baku lokal
- Penguatan branding dan sertifikasi produk industri hilir
- Memfasilitasi industri untuk meningkatkan standar kualitas ekspor

4. Strategi peningkatan daya saing industri kecil menengah

IKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan perlu didorong agar lebih kompetitif. Adapun strateginya adalah:

- Memberikan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan modal ventura.
- Memberikan insentif bagi IKM yang berorientasi ekspor.
- Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produk.
- Mendorong penggunaan teknologi dalam proses produksi IKM.
- Mendorong IKM untuk memanfaatkan e-commerce dan platform digital.

5.2 Harapan

Harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri selama 20 tahun ke depan dalam jangka panjang, diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang kuat dan berkelanjutan. Harapan utama adalah tercapainya peningkatan daya saing industri daerah yang mampu

beradaptasi dengan perkembangan global, serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan IKM diharapkan dapat meningkat, sehingga mampu berperan lebih besar dalam perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai, baik itu dalam hal transportasi, energi, maupun telekomunikasi, menjadi faktor kunci agar industri dapat berkembang dengan lancar. Ke depan, diharapkan pula adanya inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri, serta dukungan pembiayaan yang memadai bagi pengusaha, terutama di sektor IKM. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Bandung dapat menjadi pusat industri unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional.


BUPATI BANDUNG,
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR SINGKATAN

IKM	:	Industri Kecil Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDB	:	Produk Domestik Bruto
ADHB	:	Atas Dasar harga Berlaku
LQ	:	<i>Location Quotient</i>
SIINAS	:	Sistim Informasi Industri Nasional
RIPIN	:	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
RPIK	:	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota
IT	:	<i>Information Technology</i>
UPT	:	Unit Pelayanan Teknis
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
GIS	:	<i>Geographic Information System</i>
PLN	:	Perusahaan Litsrik Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	:	Penanaman Modal Asing
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
ODTW	:	Objek Daya Tarik Wisata
WKP	:	Wilayah Kerja Panas Bumi
LPK	:	Lembaga Pendidikan Kerja
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
IoT	:	<i>Internet of Things</i>
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
SPA	:	Stasiun Peralihan Antara
PS3R	:	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce- Reuse-Recycle</i>
TPS	:	Tempat Pengolahan Sampah
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	:	Sumber Daya Manusia

RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
GRK	:	Gas Rumah kaca
IPTEK	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
TOD	:	<i>Transit Oriented Development</i>
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>
IPRO	:	<i>Investment Project Ready to Offer</i>
SWOT	:	<i>Strengths</i> (Kekuatan), <i>Weaknesses</i> (Kelemahan), <i>Opportunities</i> (Peluang), dan <i>Threats</i> (Ancaman)
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas
PLTBM	:	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
EBT	:	Energi Baru Terbarukan
BTS	:	<i>Base Transceiver Station</i>
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HACCP	:	<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>
CPPOB	:	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
GMP	:	<i>Good manufacturing Practices</i>
ISO	:	<i>International Organization for Standardization</i>
PIRT	:	Pangan Industri Rumah Tangga
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SCP	:	<i>Secure, Contain, Protect</i>
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
UMR	:	Upah Minimum Regional
KPI	:	Kawasan Peruntukan Industri
DED	:	<i>Detail Engineering Design</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>

MoA : *Memorandum of Agreement*